



**NASKAH AKADEMIK  
HASIL PENELITIAN**

**Judul Penelitian**

**MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM  
PESISIR PANTAI UTARA JAWA (PANTURA)**  
(Survey di Desa Eretan Kulon Indramayu, Desa Gebang Mekar Cirebon,  
Desa Kluwut dan Desa Pulolampes-Pulogading Brebes)

**Penelitian:**

Dr. Abdul Aziz, M.Ag  
Akhnad Shodikin, M.H.I  
Mohammad Rana, M.H.I

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN 2018**

## IDENTITAS PENELITIAN DAN HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Pesisir Pantai Utara Jawa (PANTURA) (Survey di Desa Eretan Kulon Indramayu, Desa Gebang Mekar Cirebon, Desa Kluwut dan Desa Pulolampes-Pulogading Brebes)
2. Kategori/Kluster Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
3. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : **Dr. Abdul Aziz, M.Ag**
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIDN : 2026057304
  - d. Disiplin Ilmu : Ekonomi Syariah
  - e. Pangkat/Golongan : Pembina/IV A
  - f. Jabatan : Lektor Kepala
  - g. Fakultas/Jurusan : FSEI / Akuntansi Syariah
  - h. Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Cirebon
  - i. Telpon/Fax/E-mail : 08172300226
  - j. Alamat Rumah : Jl. Kapuk II Taman Kapuk Permai Blok G 07 RT 1 RW 11 Kedungjaya Kedawung Cirebon
4. Jumlah Anggo Peneliti : 2 (Dua) Orang
  1. Nama Anggota : Akhmad Shodikin, M.H.I
  2. Nama Anggota : Mohamad Rana, M.H.I
5. Lokasi Penelitian :
  - a. Desa Eretan Kulon Indramayu
  - b. Desa Gebang Mekar Cirebon
  - c. Desa Kluwut Brebes
  - d. Ds. Pulolampes Desa Pulogading Brebes
6. Jangka Waktu : 6 (Enam) Bulan
7. Sumber Dana Penelitian : DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Th. 2018
8. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 21.000.000

Cirebon, 26 Desember 2018

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
dan Ekonomi Islam

Peneliti,

**Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag**  
NIP 19750601 200501 1 008

**Dr. Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP 19730526 200501 1 004



Mengesahkan,  
Ketua LP2M

**Dr. H. Bambang Yuniarto, M.Si**  
NIP 19630618 199603 1 001

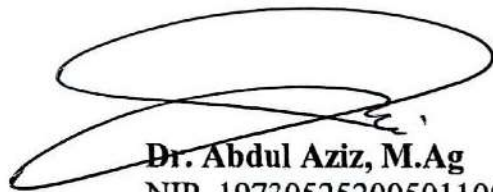
**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN KEORISINILAN**

Dengan ini saya Ketua Peneliti:

Nama : Dr. Abdul Aziz, M.Ag  
NIP : 19730526 20050 1 1004

Menyatakan bahwa Laporan penelitian yang kami buat dengan judul **“MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR PANTAI UTARA JAWA (PANTURA) DI DESA ERETAN KULON INDRAMAYU, DESA GEBANG MEKAR CIREBON, DESA KLUWUT DAN DESA PULOLAMPES-PULOGADING BREBES”** adalah orisinal yang belum pernah diteliti sebelumnya dan naskah laporan penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian kami sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Cirebon, Desember 2018  
Yang Menyatakan,

  
**Dr. Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 197305252005011004

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan Pencipta dan Tuhan Pemelihara Alam, atas berkat nikmat karunia, taufik dan pertolongan-Nya lah penelitian dengan judul: "*MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR PANTAI UTARA JAWA (PANTURA) DI DESA ERETAN KULON INDRAMAYU, DESA GEBANG MEKAR CIREBON, DESA KLUWUT DAN DESA PULOLAMPES-PULOGADING BREBES*" ini dapat kami selesaikan, meskipun tentu penelitian melalui survei ini belum sempurna sepenuhnya.

*Amma ba'du*: Penelitian merupakan bagian dari salah satu fungsi dan tugas dosen dalam memenuhi unsur-unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, karena itu kegiatan dan aktivitas penelitian merupakan suatu keniscayaan. Salah satu dari aktivitas itu adalah melakukan survei pada aktivitas masyarakat nelayan pesisir utara Jawa yang difokuskan pada pemberdayaan keluarga muslimnya. Kenapa difokuskan pada keluarga muslim pesisir adalah ingin mengetahui bagaimana tipologi masyarakatnya itu dan bagaimana pula model yang efektif guna memberdayakannya. Masyarakat pesisir pantai utara Jawa atau yang disebut PANTURA merupakan suatu masyarakat yang secara geografis (pemukiman) dekat dengan pantai atau laut yang tentu mata pencaharian adalah melaut (nelayan).

Akan tetapi ada yang menarik dari hasil survei bahwa Desa Kluwut yang berada di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes justru secara geografis tidak termasuk pada pinggir pantai/laut, melainkan hanya dibelah oleh sungai sepanjang  $\pm 4$  Km. Bahkan sudah memasuki desa tentangga sungai, yaitu Desa Grinting, akan tetapi justru kebanyakan dari masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, baik nelayan tangkap ikan maupun nelayan pedagang dan ini menjadi profesi utama mereka. Hal ini berbeda dengan Desa Eretan Kulon Indramayu, Desa Gebang Mekar Cirebon dan Dusun Pulolampes Desa Pulogading Brebes yang memang pemukiman warga berada di samping laut dan sungai.

Dengan kondisi demikian, kami bersyukur melalui survei dan proses dialog serta interaksi dengan mereka akhirnya persoalan terkait tipologi dan model pemberdayaan yang efektif bagi masyarakat nelayan pesisir utara Jawa (PANTURA) dapat terselesaikan dan terjawab melalui penelitian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa semua itu tidak mungkin berjalan tanpa bantuan dari pihak lain, tim peneliti, anggota keluarga muslim, informan kunci, dan lainnya, sehingga pantas jika kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka, ucapan yang sama tentu juga kami sampaikan kepada pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Kepala LP2M, Kepala Unit Penelitian, Para Kuwu/Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala/Sekretaris KUD, atas dukungan kesempatan dan kepercayaan yang diberikan selama berlangsungnya penelitian ini. Semoga atas semuanya diberikan imbalan dan merupakan bagian dari ibadah kepada-Nya. Amin

Cirebon, Desember 2018

Ketua Peneliti

## DAFTAR ISI

Lembar Identitas Penelitian dan Pengesahan .....	ii
Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Kajian Teori dan Pustaka .....	5
D. Literatur Review .....	12
E. Metode Penelitian .....	15
F. Data dan Sumber Data .....	15
BAB II KONDISI MASYARAKAT PESISIRI UTARA JAWA .....	16
A. Kondisi Desa Eretan Kulon .....	16
B. Kondisi Desa Gebang Mekar .....	28
C. Kondisi Desa Kluwut .....	30
D. Kondisi Dusun Pulolampes Desa Pulogading .....	35
BAB III PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR .....	40
A. Konsep Pemberdayaan .....	40
1. Pengertian Pemberdayaan .....	40
2. Pemberdayaan Menurut Islam .....	42
3. Tujuan Pemberdayaan .....	46
4. Tahap Pemberdayaan .....	47
B. Keluarga Muslim Pesisir .....	51
1. Definisi Keluarga Muslim Pesisir .....	51
2. Karakteristik Keluarga Muslim Pesisir .....	53
3. Sistem Keluarga Muslim Pesisir .....	56
4. Kebudayaan Keluarga Muslim Pesisir .....	57
5. Kehidupan Keagamaan Keluarga Muslim Pesisir .....	59
C. Model Pemberdayaan Muslim Pesisir .....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	69
A. Tipologi Keluarga Muslim Masyarakat Pesisir di Eretan, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes- Pulogading .....	69
B. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Pesisir di Eretan, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes- Pulogading .....	83
BAB V PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Rekomendasi .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	107
LAMPIRAN .....	108

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia yaitu 17.504 pulau, serta memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Dengan kondisi geografi yang demikian, maka wajar apabila tiga perempat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wilayah perairan. Realitas tersebut menjadikan Indonesia memiliki laut dengan sumber daya dan pesisir serta keanekaragaman hayati yang amat besar. Indonesia mempunyai produksi perikanan tangkap tertinggi kedua di dunia pada perairan laut (FAO, 2016). Penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai luas sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Disamping potensi perikanan tangkap, wilayah pesisir Indonesia juga memiliki potensi perikanan budidaya laut seluas 12.123.383 hektar.<sup>1</sup>

Dengan sumber daya laut yang melimpah tersebut, membuat sebagian masyarakat yang berada di wilayah pesisir memiliki sumber penghasil utama pada subsektor perikanan. Data Podes 2014, menyebutkan bahwa sekitar 21,16 persen desa/kelurahan yang berada pada wilayah pesisir sebagian besar penduduknya mempunyai sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan. Itupun lebih didominasi oleh perikanan tangkap (18,19 persen) daripada perikanan budidaya (2,97 persen).

Masyarakat pesisir ini pada umumnya dikenal sebagai masyarakat nelayan, yang mana masyarakat nelayan menggantungkan kehidupan ekonominya pada mata pencaharian dengan cara berlayar atau melaut untuk penghasilan pokoknya. Menurut Munir<sup>2</sup> biasanya dalam mencari penghasilan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2017*, dalam Ebook, v

<sup>2</sup> Wawancara dengan salah satu warga Pesisir yang bernama Syamsul Munir pada hari Senin, 15 Oktober 2018.

## **BAB II**

### **KONDISI MASYARAKAT PESISIR UTARA**

#### **A. Kondisi Desa Eretan Kulon**

##### **1. Profil Desa Eretan Kulon**

###### **a. Kondisi Pemerintahan**

Tata pemerintahan Desa Eretan Kulon terdiri dari pemerintah desa dan BPD. BPD sendiri berperan sebagai mitra pemerintah desa untuk menjalankan kegiatan pemerintahan desa. BPD yang terdiri dari seorang ketua dan beberapa anggota ini, salah satu fungsinya adalah untuk membuat rancangan peraturan desa dan melakukan pengawasan. Selain BPD, pemerintah desa juga memiliki mitra dalam menunjang kegiatan pembangunan dan perekonomian desa, mitra tersebut yaitu KUD dan Komite Pemberdayaan Masyarakat.

Koperasi Unit Desa Eretan Kulon yang bernama KUD Mina Bahari berada dalam ranah pemerintah desa dan dilindungi keberadaannya oleh pemerintah desa. Koperasi tersebut berfungsi untuk memberdayakan masyarakat terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan melalui simpanan nelayan yang nantinya digunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak nelayan dan sebagai tabungan paceklik. Selain itu, Koperasi Unit Desa juga memberikan sarana untuk kegiatan jual beli ikan yaitu Tempat Pelelangan Ikan yang letaknya persis disamping Koperasi Unit Desa.

Mitra pemerintah desa selanjutnya yaitu KPM (Komite Pemberdayaan Masyarakat) yang dibentuk oleh pihak Pertamina. Komite tersebut berfungsi untuk berpartisipasi dalam membangun desa Eretan Kulon, namun kepengurusan Komite Pemberdayaan Masyarakat sendiri diserahkan kepada masyarakat desa Eretan Kulon. Beberapa tugas dari KPM diantaranya yaitu mengurus bantuan-bantuan dari pihak diluar desa (terutama Pertamina) untuk kemudian dikelola sebaik mungkin

### BAB III

## PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR

### A. Konsep Pemberdayaan

#### 1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. *Daya* artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>29</sup>

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.<sup>30</sup>

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan)<sup>31</sup>. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c)

---

<sup>29</sup> Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), 1

<sup>30</sup> Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED

<sup>31</sup> Edi Sugiharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, .57



## BAB VI

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tipologi Keluarga Muslim Masyarakat Pesisir di Eretan, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes-Pulogading

Tipologi dapat diartikan sebagai pembagian keluarga ke dalam golongan-golongan menurut kriteria-kriteria tertentu. Sebagian besar keluarga pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, yang dihadapkan pada situasi ekologis yang sulit dikontrol. Perikanan tangkap bersifat *Open acces* sehingga nelayan juga harus berpindah-pindah dan terdapat elemen resiko yang harus dihadapi lebih besar.

Kondisi ini merupakan suatu realitas yang dihadapi mayoritas keluarga pesisir, baik di Eretan Kulon Indramayu, Gebang Mekar Cirebon, maupun Kluwut dan Pulolampes, yang kebanyakan kepala keluarganya bermata pencaharian sebagai nelayan. Tentunya dengan

Resiko yang dihadapi tersebut merupakan imbas dari dua faktor, yakni dari sisi kemampuan maupun keahlian yang bersifat turun temurun, dan juga dari sisi peralatan yang masih bersifat tradisional. Hal ini tentunya memberikan implikasi tidak hanya dari sisi keamanan yang cenderung diabaikan, namun juga dari sisi hasil tangkap yang diperoleh.

Realitas tersebut dalam pandangan Bagong Suyanto membentuk suatu kriteria dalam tipologi keluarga nelayan, yang menurutnya dapat dilihat berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap yang dimiliki nelayan

Dalam sudut pandang ini, nelayan bisa dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan nelayan yang mempunyai alat-alat produksi sendiri (pemilik

---

<sup>75</sup> Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), 53.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan dan uraian pada bab-bab tersebut di atas, maka dapat apa yang dmenjadi tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tipologi masyarakat keluarga muslim pesisir pantai utara (PANTURA) Jawa ada dua, yaitu; a. tipologi nelayan tangkap ikan dan pengolahannya, dan b) tipologi nelayan pedagang (bakul). Tipologi nelayan tangkap ikan terdiri dari dua karakteristik, yaitu 1) nelayan yang bertugas sebagai anak buah kapal (ABK) dan nelayan sebagai nahkoda (supir perahu), dan 2) nelayan sebagai pemilik kapal/perahu (juragan). Sedangkan tipologi nelayan sebagai pedagang terkadang, mereka sebagai pedangan atau bakul, dan penggarap tambak. Tipologi pertama dan kedua nampak pada keluarga muslim pesisir Eretan Kulon, Gebang Mekar, Kluwut dan Kluwut yang memang sejak dulu menjadi mata pencahariannya. Jadi, tipologi masyarakat nelayan pesisir Jawa seperti Indramayu, Cirebon, dan Brebes kecenderungan masyarakat tipe masyarakat nelayan sebagai pokok pencahariannya dan tipe masyarakat yang berpola pemukiman padat penduduk (berkerumun/kumpul) dan tradisional dari sisi gaya hidupnya.
2. Pemberdayaan keluarga muslim nelayan di Pesisir Pantari Utara (PANTURA) Jawa lebih terlihat pada model *top-down* dibanding dengan *botton-up*. Model pemberdayaan *top-down* berarti pemberdayaan yang inisiatip datang dari pemerintah daerah atau desa setempat atau lembaga lain yang peduli pada kehidupan masyarakat muslim pesisir. Sementara itu, model pendampingan *botton-up* lebih menekankan pada pemberdayaan yang muncul kreativitas dari masyarakat nelayan itu sendiri. Karakteristik keluarga nelayan yang keseharian melaut, tentu untuk memunculkan ide dan gagasan dalam rangka memberdayakan ligkungan sendiri tidak mungkin muncul bila tidak ada bantuan dari pihak lain. Karena itu, di Eretan Kulon

Kabupaten Indramayu, meskipun model pemberdayaan bersifat *botton-up*, tetapi ada hal yang menarik dimana peran Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari lebih aktif dalam peransertanya mendampingi masyarakat nelayan. Berbeda, dengan Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes justru peran KUD yang ada tidak efektif.

## **B. Rekomendasi**

1. Perlu adanya perhatian dan penyuluhan dari pihak pemerintah baik tingkat pusat, propinsi atau daerah agar para nelayan bisa trampil dan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tata cara penangkapan ikan dan pengolahannya. Hal ini agar hasil tangkapan ikan dapat bernilai ekspor.
2. Lembaga pendampingan baik berupa KUD atau pun lainnya bisa efektif dan memberikan dampingan baik secara finansial maupun lainnya agar dapat menyelesaikan kebutuhan keluarga baik yang ditinggalkan saat melaut sampai biaya operasionalnya.
3. Disaat para nelayan sedang tidak melaut, sebaiknya pihak-pihak terkait untuk memberikan pelatihan-pelatihan ataupun penyuluhan agar mereka mempunyai keterampilan yang memadai, serta para keluarganya pun ikut diberi pelatihan bagaimana cara pengolahan ikan dan seterusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badiri, Lili, et. al 2005. *Zakat & Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri.
- Badudu dan Zain, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasan, A. Rifa'i, dan Achmad, Amrullah (Peny.), 1987. *Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa*. PLP2M, Yogyakarta.
- Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumardi, 1984. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Berkah Pustaka.
- Siswijono, Suprih Bambang dan Wisadirana, Darsono, 2008. *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Agritek YPN, Malang.
- Sulistiyani, A.T., 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Suhendi, et.all., 2014. *Pemberdayaan Komunitas Pemulung Sampah Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama berbasis Eco-Preneurur di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Karangrejo Kota Meteor*. Laporan Penelitian, STAIN Metro.
- Sudjana, 2004. *Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Dharma Karsa Utama.
- Syatori, A. 2014. *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon*. Diterbitkan pada Jurnal Holistik Volume 15 Nomor 02, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Theresia, Aprillia, et.al., 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Taufik, 2013. *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Poleewali Mandar*. Diterbitkan pada Governmet: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 1, Januari.
- Widjajanti, Kesi, 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Diterbitkan dalam Jurnal Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011.
- Hasil Wawancara dengan Surip, Kepala Desa Gebang Mekar.
- Hasil Wawancara dengan Ansori, Kepala Desa Kluwut.
- Hasil Wawancara dengan Sugeng Supriyadi, Sekretaris Desa Pulogading-Pulolampes.
- Hasil Wawancara dengan Royani Sadra, Serktearis KUD Bahari Desa Eretan Kulon.

---

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

---

---

## **PHOTO-PHOTO KEGIATAN PENELITIAN**

Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Pesisir Pantai Utara Jawa  
(PANTURA)

---



**Kunjungan awal Penelitian ke Desa Eretan Kulon dalam rangka survei mencari data Keluarga Muslim Pesisir Utara Indramayu**



**Pak Royani, salah seorang informan kunci pemberdaya keluarga muslim nelayan pesisir Eretan Kulon. Ia sebagai motivator dan sekaligus sekretaris KUD Mina Bahari Eretan Kulon Indramayu**



Ibu Devi, salah seorang informan kunci keluarga muslim Eretan Kulon



Suasana keluarga muslim nelayan pesisir utara desa Eretan Kulon saat adzan berkumandang langsung ke Musholla shalat dhuhur berjama'ah dekat KUD Mina Bahari samping TPI (Tempat Pelelangan Ikan)



---

# **PANDUAN TEKNIK OBSERVASI**

## **Untuk Tim Peneliti & Pengumpul Data**

Judul Penelitian:

**MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR  
PANTAI UTARA JAWAN (PANTURA)**  
(Survey di Desa Eretan Kulon Indramayu, Desa Gebang Mekar Cirebon,  
Desa Kluwut dan Desa Pulolampes-Kabupaten Brebes)

---

Teknik 1:

### **DISKUSI KELOMPOK TERARAH FOCUS GROUP DISUSSION (FGD) GUIDE**

*Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terarah adalah media bagi sekelompok orang untuk mendiskusikan satu topik tertentu secara relatif mendalam. Diskusi kelompok terarah berbeda dengan diskusi kelompok informal setidaknya karena topik dan alur diskusinya.

Diskusi kelompok terarah difokuskan untuk membicarakan satu topik secara mendalam. Sedangkan alur proses pembicaraan dalam diskusi kelompok dipandu oleh fasilitator dan pernyataan serta pembicaraan yang berlangsung ditulis (direkam) secara cermat.

Di dalam penelitian ini, diskusi kelompok terarah ini dilakukan pada semua tahapan penelitian, baik awal penelitian, pelaksanaan, maupun saat monitoring dan evaluasi penelitian, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan proses penelitian.

Sebelum survey, FGD ini juga dilakukan untuk mendapatkan masukan lebih dalam lagi mengenai tujuan survei yang mencakup masalah dan kebutuhan yang akan disurvei. Masukan dalam diskusi ini kemudian menjadi bahan untuk menjabarkan tujuan dan menyusun instrumen survei yang telah disusun sebelumnya.

## Yang Perlu Diperhatikan dalam FGD:

### 1. Peserta Diskusi

Jumlah peserta diskusi sebaiknya sedikit saja untuk menciptakan suasana akrab dan memungkinkan setiap peserta berbicara bergiliran. Tetapi jumlah peserta juga harus cukup untuk menghasilkan diskusi yang dapat dianggap mewakili pandangan dari berbagai golongan.

Oleh karena itu, jumlah peserta antara 5 – 12 diperkirakan cukup untuk menghidupkan diskusi dan sekaligus cukup akrab untuk mendorong setiap peserta berbicara. FGD ini dilaksanakan bersama masyarakat dampingan, juga dalam kondisi tertentu secara kolaboratif dilakukan bersama stakeholder terkait.

### 2. Fasilitator –Juru catat (Notulen)

Peran fasilitator sebagai pemandu diskusi sangat menentukan lancarannya proses diskusi, sehingga keterampilan fasilitator untuk memandu kelompok menjadi hal yang penting. Salah satu syarat yang tidak dapat ditawar adalah: fasilitator harus orang yang senang bekerja dalam kelompok dan menikmati berbicara dengan kelompok. Kadang kala proses diskusi berjalan lancar atau sulit dikendalikan.

Agar proses FGD dapat berjalan dengan baik perlu adanya suatu pembagian tugas di antara dua orang fasilitator, yaitu seseorang bertindak dalam kapasitas rutin sebagai fasilitator, dan fasilitator kedua bertindak sebagai juru catat (perkam proses FGD).

Setiap diskusi sebaiknya didokumentasikan lengkap, baik tertulis maupun menggunakan alat rekaman. Notulen bertanggung jawab untuk menuliskan secara rinci diskusi dan suasana kelompok.

### 3. Menentukan tujuan dan topik FGD

Berbeda dengan survei atau interview yang mengajukan banyak pertanyaan untuk mendapatkan gambaran satu topik dengan luas, diskusi kelompok terarah sebaiknya hanya menentukan satu topik utama untuk didiskusikan dengan detail.

Oleh karena itu kiat harus dengan jelas menentukan terlebih dahulu aspek-aspek apa saja yang perlu diangkat dan dibahas rinci dalam diskusi. Untuk memperjelas semua itu, tuliskan terlebih dahulu 2-3 tujuan utama yang ingin dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Berdasarkan tujuan itulah, dalam FGD akan ditentukan topik-topik yang akan dibicarakan.

### 4. Pengaturan Tempat Duduk

Dalam FGD dimana para peserta harus saling berkomunikasi dan bekerjasama satu dengan yang lainnya, pengaturan tempat duduk dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat pada dinamika kelompok. Pengaturan tempat

duduk dapat mempengaruhi siapa berbicara kepada siapa dan siapa yang sepertinya mendominasi aktivitas-aktivitas diskusi.

### Langkah-langkah FGD:

1. Datanglah lebih awal dari jadwal yang telah disepakati. Hindarilah kebiasaan persiapan antara lain pengaturan ruangan, alat tulis menulis (metaplan, plano, lakban, dll), alat peraga, alat-alat untuk peserta dan lain sebagainya.
  2. Pastikan bahwa agenda pembahasan sangat jelas dalam benak kita. Hal ini untuk menghindari danya kebingungan ketiak FGD dimulai.
  3. Di awal proses fasilitator memberikan pengantar, dan menjelaskan tujuan dan fokus diskusi yang akan dilakukan.
  4. Pada awal diskusi fasilitator memulai dengan memberikan pertanyaan yang bersifat umum untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas dan membuat peserta merasa nyaman.  
Pertanyaan "terbuka" dapat digunakan untuk mendorong peserta untuk menjawab dan mengeluarkan pendapat dalam bahasanya masing-masing. Selanjutnya, setelah sasana "mencari", fasilitator dapat mulai melontarkan pertanyaan yang telbaih mendalam pada akhir diskusi.
  5. Eksplorasi pendapat dan masukan dari peserta diskusi, dapat digali secara lisan atau juga dapat dilakukan secara tertulis. Untuk eskplorasi pendapat secara tertulis fsilitator dapat melakukannya melalui cara:
    - 📖 Setiap diskusi didokumentasikan lengkap oleh juru catat atau notulen, baik tgetulis maupun menggunakan alat rekaman. Notulen bertanggungjawab untuk menuliskan secara rinci diskusi dan suasana kelompok. Biasanya notulen duduk di luar lingkaran peserta, sehingga tidak menggnanggu jalannya diskusi. Tetapi notulen harus dapat mengamati ekspresi tiap peserta.
    - 📖 Diakhir proses, fasilitator mengarahkan diskusi untuk mencari kesimpulan. Kesimpulan dikusi ditulis dikertas plano yang telah disediakan.
    - 📖 Diluar proses diskusi, untuk kepentingan penelitian team penelti melakukan proses terakhir yaitu analisis dan menulis laporan hasil diskusi. Analisis dapa dilakukan dengan cara:
      - ✍ Mengelompokan setiap jawaban berdasarkan pertanyaan fasilitator. Dengan menuliskan setiap jawaban di bawah pertanyaan, kita dapat mengetahui berbagai pendapat dan reaksi setiap peserta terhadap suatu topik atau pertanyaan yang dilontarkan.
      - ✍ Menandai hal yang penting dalam catatan atau transkrip.
- Berdasarkan data tersebut, kita dapat menuliskan semacam kesimpulan mengenai pendapat dan reaksi peserta terhadap topik yang didiskusikan. Sebaiknya dalam laporan diperhatikan beberap ahal seperti:
- ✍ Tulislah laporan secara singkat kira-kira 1 atau 5 halaman saja.
  - ✍ memnberik gambaran mengenai waktu, tempat, topik, dan peserat diskusi.

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/335569398>

# PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR JAWA

Book · September 2019

CITATIONS

0

READS

240

3 authors:



**Mohammad Rana**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

10 PUBLICATIONS 6 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



**Abdul Aziz**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

68 PUBLICATIONS 126 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



**Akhmad Shodikin**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

11 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Islamic economics and the strategic issues that exist within it relate to the problems of Islamic economics and its solutions [View project](#)



Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer [View project](#)

# **PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR JAWA**

**Model dan tipologi Masyarakat Eretan Kulon,  
Gebang Mekar, Kluwet dan Pulolampes**

**Dr. Abdul Aziz, M. Ag**

**Akhmad Shodikin, M. H. I**

**Mohammad Rana, M. H. I**

**PENERBIT:  
CV. ELSI PRO**

**PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR JAWA**  
**Model dan tipologi Masyarakat Eretan Kulon,**  
**Gebang Mekar, Kluwet dan Pulolampes**

**Dr. Abdul Aziz, M. Ag**

**Akhmad Shodikin, M. H. I**

**Mohammad Rana, M. H. I**

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO  
Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713  
Email : [chiplukan@yahoo.com](mailto:chiplukan@yahoo.com)

Desain cover & layout : Abu Hasan Mubarok, S.SI

Desain cover & layout : Caswito, M.HI

Percetakan : CV. ELSI PRO

Cetakan Pertama : Januari 2019

136 Halaman

ISBN 978-602-1091-81-4

Hak Cipta dilindungi Undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA SAMBUTAN REKTOR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, saya menyambut baik diterbitkannya buku berjudul “*Pemberdayaan Keluarga Muslim Pesisir Jawa: Model dan Tipologi Masyarakat Eretan Kulon, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes*”, dari hasil penelitian yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2018.

Pengembangan mutu akademik suatu perguruan tinggi harus berasal dari kiprah dan aktivitas dosen dalam mengejawantah ide-ide dan gagasannya yang dituangkan dalam bentuk penelitian dan mempublikasikannya. Ini adalah tugas yang paling pokok dan utama. Karena itu, kualitas dosen akan berdampak pada mutu akademik perguruan tinggi. Fungsi utama dosen adalah 1) melaksanakan pendidikan, 2) penelitian, dan 3) pengabdian kepada masyarakat.

**Pertama**, melaksanakan pendidikan berarti seorang dosen harus mengajar di kelas melayani mahasiswa dalam proses pembelajaran, untuk *transfer of knowledge* (transfer ilmu pengetahuan) atau menjadi fasilitator dalam kelas, agar kelak menjadi berguna bagi agama, bangsa dan negara. Jadi, dosen harus mampu mengembangkan kompetensi diri meningkatkan ilmu pengetahuan setiap saat.

**Kedua**, melaksanakan penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan seorang dosen agar dalam melaksanakan pengajaran di kelas selalu menginformasikan informasi-informasi yang *up date* atau yang terbaru. Penelitian menjadi penting bagi dosen dikarenakan dalam penelitian akan selalu menemukan jawaban atau *problem solving* dalam suatu permasalahan yang dihadapi. Inilah urgensi penelitian bagi dosen.

**Ketiga**, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen dalam bentuk; a) bimbingan kepada mahasiswa saat KKN, b) keterlibatan langsung dosen dalam bimbingan dan penyaluhan. Bentuk non-formal kegiatan dosen di masyarakat ini akan berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap dosen, sehingga berimbas pada almamaternya.

Ketiga fungsi di atas dapat dikembangkan secara optimal untuk kepentingan lembaga. Semoga upaya Sdr. Dr. Abdul Aziz, M.Ag., Akhmad Shodiqin, M.H.I., dan Muhammad Rana, M.H.I., menjadi inspirasi dan motivasi pada yang lain untuk bersama mengembangkan mutu akademik di kampus ini. Amin

Cirebon, Januari 2018  
Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ttd

Dr. H. Sumanta, M.Ag





## KATA SAMBUTAN KETUA LP2M

Kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen untuk selalu menjalankan tugas dan fungsi pokok sebagaimana tertuang dalam STATUTA dan atau ORTAKER lembaga. Keberadaan kami LP2M adalah tak terpisahkan dari fungsi suatu perguruan tinggi, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Implementasi dari aspek penelitian dan pengabdian keduanya berada pada lembaga ini. Aspek penelitian difokuskan pada penelitian kelompok dan berbasis pengabdian yang sarasannya adalah pada pengembangan keilmuan berbasis pengembangan lembaga, maupun interdisiplin ilmu. Sementara itu, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018 baru dilaksanakan, dan semuanya berbasis penelitian kompetitif.

Adapun aspek pengabdian pesertanya adalah mahasiswa dengan sasaran masyarakat, baik masyarakat di wilayah III Cirebon ditambah Brebes dan Tegal, plus Desa Binaan. Hal ini menjadi komitmen kami LP2M untuk selalu meningkatkan kualitas penelitian dan kualitas pengabdian. Karena itu, peningkatan mutu penelitian harus melewati beberapa tahapan dari mulai pengajuan proposal di LITAPDIMAS Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan uji kelayakan proposal oleh para *Reviewer* yang ditunjuk. Tentu agar hasil penelitian dapat dijamin kualitasnya.

Sementara itu, pengabdian kepada masyarakat yang sarasannya adalah para mahasiswa dengan selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi, LP2M melalui Unit Pengabdian Kepada Masyarakat selalu menekankan pada multimoetde, seperti pada tahun akademik 2018 kemarin menggunakan model KKN (Kuliah Kerja Nyata) *Partisipation Action Research* (PAR) diharapkan dapat dipublikasikan.

LP2M mempublikasikan hasil karya-karya ilmiah, laporan penelitian bagi civitas akademik maupun pengabdian dosen dan mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan mutu akademik di lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kita cintai ini. Dr. Abdul Aziz, M.Ag., beserta tim untuk menerbitkan hasil karya intelektual untuk kepentingan bangsa dan negara.

Cirebon, Januari 2018  
Ketua LP2M,

ttd

Dr. H. Bambang Yuniarto, M.Si



## KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT., Tuhan Pencipta dan Tuhan Pemelihara Alam, atas berkat nikmat karunia, taufik dan pertolongan-Nyalah hasil penelitian dengan judul; “*Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) Di Desa Eretan Kulon Indramayu, Desa Gebang Mekar Cirebon, Desa Kluwut Dan Desa Pulolampes-Pulogading Brebes*” ini dapat kami jadikan buku, dengan judul “***Pemberdayaan Keluarga Muslim Pesisir Jawa: Model dan Tipologi Masyarakat Eretan Kulon, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes***”, dan dapat diterbitkan meskipun tentu disana-sini masih belum sempurna sepenuhnya.

*Amma ba’du:* Publikasi ilmiah merupakan suatu keniscayaan bagi pengembangan akademik disuatu perguruan tinggi. Isi dari buku ini sepenuhnya dari hasil penelitian kompetitif yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami berkewajiban secara akademik untuk mempublikasikannya, baik lewat media cetak (buku), elektronik maupun lainnya. Hal ini agar dapat diketahui dan dishare guna perbaikan dan dikritisi secara akademik oleh semua pihak. Dan, terutama dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan pada umumnya dan khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

Didalam buku hasil penelitian ini mengangkat tema pemberdayaan keluarga muslim di kawasan pesisir pantai utara Jawa atau yang dikenal sebagai PANTURA (Pantai Utara Jawa). Kenapa difokuskan pada keluarga muslim pesisir adalah ingin mengetahui bagaimana tipologi masyarakatnya itu dan bagaimana pula model yang efektif guna memberdayakannya. Akan tetapi ada yang menarik dari hasil survei studi kasus bahwa Desa Kluwut yang berada di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes justru secara geografis tidak termasuk pada pinggir pantai/laut, melainkan hanya dibelah oleh sungai sepanjang  $\pm 4$  Km. Bahkan sudah memasuki desa tentanga sungai, yaitu Desa Grinting, akan tetapi justru kebanyakan dari masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, baik nelayan tangkap ikan maupun nelayan pedagang dan ini menjadi profesi utama mereka. Hal ini berbeda dengan Desa Eretan Kulon Indramayu, Desa Gebang Mekar Cirebon dan Dusun Pulolampes Desa Pulogading Brebes yang memang pemukiman warga berada di samping laut dan sungai.

Dengan kondisi demikian, kami bersyukur melalui survei dan studi kasus melalui proses dialog serta interaksi dengan mereka akhirnya persoalan terkait

tipologi dan model pemberdayaan yang efektif bagi masyarakat nelayan pesisir utara jawa (PANTURA) dapat terselesaikan dan dapat diketahui model pemberdayaannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa semua itu tidak mungkin berjalan tanpa bantuan dari pihak lain, tim peneliti, anggota keluarga muslim, informan kunci, dan lainnya, sehingga pantas jika kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka, ucapan yang sama tentu juga kami sampaikan kepada Dr. H. Sumanta, M.Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Dr. H. Bambang Yuniarto, M.Si., Kepala LP2M, Dr. (Cand.) Budi Manfaat, M.Si., Kepala Unit Penelitian, Para Kuwu/Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala/Sekretaris KUD, atas dukungan kesempatan dan kepercayaan yang diberikan selama berlangsungnya penelitian ini. Semoga atas semuanya diberikan imbalan dan merupakan bagian dari ibadah kepada-Nya. Amin

Cirebon, Desember 2018

Aziz, Shodikin, dan Rana

## DAFTAR ISI

Lembar Identitas Penelitian dan Pengesahan .....	ii
Kata Sambutan Rektor .....	iii
Kata Sambutan Ketua LP2M .....	v
Kata Pengantar .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
C. Kajian Teori dan Pustaka .....	4
D. Literatur Review .....	10
E. Metode Penelitian .....	13
BAB II KONDISI MASYARAKAT PESISIRI UTARA JAWA .....	15
A. Kondisi Desa Eretan Kulon .....	15
B. Kondisi Desa Gebang Mekar .....	27
C. Kondisi Desa Kluwut .....	29
D. Kondisi Dusun Pulolampes Desa Pulogading .....	33
BAB III PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR .....	37
A. Konsep Pemberdayaan .....	37
1. Pengertian Pemberdayaan .....	37
2. Pemberdayaan Menurut Islam .....	38
3. Tujuan Pembberdayaan .....	43
4. Tahap Pemberdayaan .....	43
B. Keluarga Muslim Pesisir .....	47
1. Definisi Keluarga Muslim Pesisir .....	47
2. Karakteristik Keluarga Muslim Pesisir .....	49
3. Sistem Keluarga Muslim Pesisir .....	51
4. Kebudayaan Keluarga Muslim Pesisir .....	52
5. Kehidupan Keagamaan Keluarga Muslim Pesisir ..	54
C. Model Pemberdayaan Muslim Pesisir .....	55
BAB IV TIPOLOGI DAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UTARA JAWA .....	63
A. Tipologi Keluarga Muslim Masyarakat Pesisir di Eretan, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes Pulogading .....	65

	B. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Pesisir di Eretan, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes-Pulogading .....	75
BAB V	EPILOG .....	97
	A. Simpulan .....	97
	B. Rekomendasi .....	98
	DAFTAR PUSTAKA .....	99
	LAMPIRAN .....	101
	Biodata Penulis .....	125

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia yaitu 17.504 pulau, serta memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Dengan kondisi geografi yang demikian, maka wajar apabila tiga perempat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wilayah perairan. Realitas tersebut menjadikan Indonesia memiliki laut dengan sumber daya dan pesisir serta keanekaragaman hayati yang amat besar. Indonesia mempunyai produksi perikanan tangkap tertinggi kedua di dunia pada perairan laut (FAO, 2016). Penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai luas sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Disamping potensi perikanan tangkap, wilayah pesisir Indonesia juga memiliki potensi perikanan budidaya laut seluas 12.123.383 hektar.<sup>1</sup>

Dengan sumber daya laut yang melimpah tersebut, membuat sebagian masyarakat yang berada di wilayah pesisir memiliki sumber penghasil utama pada subsektor perikanan. Data Podes 2014, menyebutkan bahwa sekitar 21,16 persen desa/kelurahan yang berada pada wilayah pesisir sebagian besar penduduknya mempunyai sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan. Itupun lebih didominasi oleh perikanan tangkap (18,19 persen) daripada perikanan budidaya (2,97 persen).

Masyarakat pesisir ini pada umumnya dikenal sebagai masyarakat nelayan, yang mana masyarakat nelayan menggantungkan kehidupan ekonominya pada mata pencaharian dengan cara berlayar atau melaut untuk penghasilan pokoknya. Menurut Munir<sup>2</sup> biasanya dalam mencari penghasilan di laut ada beberapa cara, yaitu: 1) membuat tambak atau pertambakan (petani tambak), dan 2) mencari dilaut lepas atau melaut/nelayan. Kedua cara mata pencaharian hasil laut itu sama-sama hasilnya sangat menguntungkan, dan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2017*, dalam Ebook, v

<sup>2</sup> Wawancara dengan salah satu warga Pesisir yang bernama Syamsul Munir pada hari Senin, 15 Oktober 2018.

sama-sama tidak mendapatkan hasil banyak karena faktor cuaca. Berbeda dengan nelayan yang metodenya itu langsung mencari kelaut, dalam proses pencariannya pun masih ada dua cara, yaitu: a) menggunakan garok, dan 2) tradisional atau manual (menggunakan alat seadanya). Jika menggunakan garok mungkin hasilnya akan lebih banyak, namun karena adanya larangan penggunaan sistem garok yang sudah di instruksikan langsung oleh Menteri Kelautan.

Banyaknya masyarakat pesisir yang menjadikan subsektor perikanan sebagai penghasilan utama, maka tidak aneh apabila konsepsi masyarakat pesisir sering disematkan dengan profesi nelayan. Walaupun harus diakui, tidak semua masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan. Hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh A. Syatori dalam *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon)*, karena secara geografis, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.<sup>3</sup>

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena ketidak sepehaman pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.<sup>4</sup>

Namun sayangnya dengan potensi yang besar tersebut, kondisi masyarakat pesisir bertolak belakang dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Masyarakat wilayah pesisir hidup dalam garis kemiskinan, hal ini berimbas pula kepada kondisi lingkungannya yang terkesan jauh dari

---

<sup>3</sup> A. Syatori dalam tulisan yang berjudul *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon)* yang dimuat dalam Jurnal Holistik Volume 15 Nomor 02, 2014 pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 241

<sup>4</sup> Taufik dalam tulisan yang berjudul *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar* yang dimuat dalam Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 1, Januari 2013, 61-7



kebersihan, dan juga secara kesadaran pendidikan masyarakatnya masih rendah.

Upaya mengatasi keterbelakangan yang menghiasi masyarakat pesisir baik secara ekonomi, lingkungan, maupun pendidikan merupakan pekerjaan rumah berbagai pihak, diantaranya adalah pemerintah. Hal ini sebagaimana yang tercantum Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya.

Berdasarkan amanat undang-undang di atas, bahwa pemerintah berkewajiban mengatasi persoalan yang membelit masyarakat pesisir salah satunya adalah terkait kesejahteraan. Upaya tersebut adalah dengan cara pemberdayaan. Pemberdayaan penting untuk dilakukan dengan menjadikan sumber daya manusia sebagai objeknya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sudjana dalam bukunya *Ekonomi Rakyat* menyatakan bahwa Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Manusia mempunyai peran sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan.

Pemberdayaan dan pembangunan memiliki hubungan yang erat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk kemandirian dalam mengatasi permasalahan mereka melalui kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Upaya peningkatan kualitas hidup diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Arah pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dan lebih cepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan sebagai pembangunan bangsa.<sup>5</sup>

Namun sayangnya, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak membawa perubahan yang berarti. Hal ini terjadi, karena upaya pemberdayaan yang dilakukan cenderung hanya sebatas sesaat dan tidak

---

<sup>5</sup> Sudjana, *Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2004, 264

berkelanjutan. Disamping itu pula tanpa melihat karakter sosiologis masyarakat pesisir disuatu daerah.

Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Desa Eretan Kulon di Indramayu, Gebang di Kabupaten Cirebon, dan Desa Kluwut serta Desa Pulolampes Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Profesi sebagai nelayan merupakan profesi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakatnya. Profesi nelayan sebagai profesi utama yang digeluti oleh kepala keluarga (baca: suami) tentu memiliki resiko, salah satunya adalah dalam segi penghasilan. Penghasilan nelayan yang cenderung tidak menyejahterakan berimbas kepada kehidupan keluarganya yang secara taraf hidup memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.

Realitas yang ada pada masyarakat empat desa tersebut sebagaimana halnya keluarga yang hidup di daerah pesisir pada umumnya cenderung berada pada garis kemiskinan. Terlebih lagi, keempat desa tersebut hidup pada wilayah yang berbeda-beda, dan secara karakter masyarakat maupun tipologinya juga memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan penting untuk dilakukan pada kedua desa tersebut dengan model yang sesuai. Sehingga upaya pemberdayaan dengan mempertimbangkan karakter maupun tipologi masyarakat dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan keluarga masyarakat pesisir. Karena itu, permasalahan mendasar yang perlu dilihat adalah 1) apa tipologi masyarakat pesisir utara Jawa yang tercermin pada kehidupan keluarga muslim di Desa Eretan Kulon, Gebang, Kluwut dan Pulolampes?, dan 2) bagaimana model pemberdayaan masyarakat pesisir utara Jawa yang difokuskan pada pemberdayaan keluarga muslim di keempat desa tersebut?

## **B. Kajian Teori dan Kajian Pustaka**

### **1. Kajian Teori**

#### **a) Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *empowerment*<sup>6</sup>. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya

---

<sup>6</sup> Menurut Sumodiningrat, sebagaimana yang dikutip oleh Ambar Teguh, bahwa penggunaan istilah *empowerment* sebagai terjemahan dari pemberdayaan adalah tidak tepat. Menurutnya, istilah memberdayakan adalah memberi “daya” bukan kekuasaan (*power*). Sehingga istilah yang tepat adalah “*energize*” atau dapat dikatakan memberi “energi”. Dengan demikian, pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara

mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri kearah yang lebih baik. Kata “berdaya” diartikan sebagai kontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatankegiatan yang memberikan seseorang kekuatan untuk melakukan sesuatu atau membuat seseorang layak.<sup>7</sup>

Konsep pemberdayaan pada awalnya muncul sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang menepatkan negara terlalu domino dalam melaksanakan pembangunan. Posisi sentral negara terlihat dari mulai perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Konsep pemberdayaan ini berasumsi bahwa pembangunan akan berjalan lancar apabila masyarakat di beri kesempatan atau berhak mengelolah sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Dengan demikian, Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.<sup>9</sup>

Terkait pemberdayaan masyarakat pesisir, dalam position paper pemberdayaan masyarakat pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang dikutip oleh Michel Sipahelut disebutkan, bahwa berdasarkan karakteristik masyarakat pesisir (nelayan) dan cakupan pemberdayaan, maka pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif. Pembangunan yang komprehensif, yakni pembangunan dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

---

mandiri. Lihat, Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004, 78-79

<sup>7</sup> Hasan Alwi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Gaya Media, 2001, 24.

<sup>8</sup> Manat Rahim, et.al, *Model Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara*, Journal The WINNERS, Vol. 15 No. 1, Maret 2014, 23-33

<sup>9</sup> Kusnadi, *Pemberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi*, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2005, 220.

- 1) berbasis lokal (melibatkan sumberdaya lokal sehingga return to *local resource* dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Sumberdaya lokal yang patut digunakan adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam,
- 2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (fokus atau menitik beratkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi),
- 3) berbasis kemitraan (kemitraan yang mutualistis antara orang lokal atau orang miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik atau profesional, serta pergaulan bisnis yang lebih luas,
- 4) secara holistik atau multi aspek (pembangunan mencapai semua aspek, karena setiap sumberdaya lokal patut diketahui dan didayagunakan), dan
- 5) berkelanjutan (keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri, mencakup aspek ekonomi dan sosial).<sup>10</sup>

#### b) Konsep Keluarga

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat yang diikat dalam sebuah perkawinan, yang didalamnya terdapat suami, istri, dan anak. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan utama yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan firman Allah, Swt., dalam al-Qur'an Surat al-Rūm ayat 21:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾ الروم: ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

<sup>10</sup> Michel Sipahelut, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat ...*, 24

Karena keluarga bukan hanya sebagai wadah hubungan suami-isteri, anak-anak dan orang tua, atau anggota keluarga yang lain, tetapi juga sebagai mediator hubungan dengan masyarakat serta mendidik, memberi nasihat keteladanan tentang kebaikan dan do'a.<sup>11</sup>

Menurut M. Quraish Shihab bahwa tujuan utama pernikahan tidak akan dapat diraih apabila fungsi-fungsi keluarga tidak dapat dilaksanakan oleh suami dan istri. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan peendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.<sup>12</sup>

## 2. Kajian Pustaka

Wilayah pesisir Indonesia adalah satu pusat keanekaragaman biologis laut tropis dunia, yaitu tempat bagi hutan bakau dan terumbu karang serta memiliki potensi sumberdaya lain yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir serta masyarakat di wilayah lainnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah masyarakat pesisir mengalami pertumbuhan yang pesat. Berbagai kegiatan dikembangkan di wilayah pesisir.<sup>13</sup>

Dengan realitas tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dalam berbagai sektor, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nendah Kurniasari dan Elly Reswati dalam penelitiannya yang berjudul "Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir" bahwa Indonesia memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi devisa 82 miliar dolar AS dari laut setiap tahunnya.

---

<sup>11</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempaun Kontemporer*, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001, 105.

<sup>12</sup> Lihat, M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2007, 124-134

<sup>13</sup> A. Rosyidie dalam penelitian yang berjudul "Dampak Bencana Terhadap Wilayah Pesisir: Belajar Dari Tsunami Aceh. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 3 Desember 2006

Sementara kemampuan sektor kelautan dalam menyumbang PDB nasional sekarang ini masih 92,22 triliun rupiah.<sup>14</sup> Ironisnya, kekayaan laut yang melimpah ruah tersebut berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir, yang masih berada dalam garis kemiskinan dan secara ekonomi masih menggantungkan sepenuhnya kepada hasil laut atau berprofesi sebagai nelayan. Menurut Kusnadi, sebagaimana yang dikutip oleh Michel Sipahelut bahwa secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut.<sup>15</sup>

Ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah:

- (1) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan,
- (2) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan,
- (3) Hubungan kerja (pemilik perahu nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh,
- (4) Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan,
- (5) Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan
- (6) Gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi
- (7) Ke masa depan.<sup>16</sup>

Sumodiningrat sendiri, sebagaimana yang dikutip oleh Mussadun dan Putri Nurpratiwi, membagi kemiskinan menjadi tiga berdasarkan bentuknya, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya pembangunan sehingga suatu kelompok masyarakat tidak dapat menyelenggarakan pembangunan. Kemiskinan struktural disebabkan oleh ketimpangan

---

<sup>14</sup> Nendah Kurniasari dan Elly Reswati dalam penelitian yang berjudul “Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir” pada Buletin Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No. 1, 2011.

<sup>15</sup> Michel Sipahelut, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat ...*, 24

<sup>16</sup> *Ibid.*

struktur masyarakat. Sedangkan kemiskinan kultural disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya suatu kelompok masyarakat.<sup>17</sup>

Apabila merujuk kepada pengklasifikasian kemiskinan yang dikemukakan oleh Sumodiningrat di atas, kemiskinan yang di alami oleh masyarakat nelayan adalah kemiskinan natural. Karena secara sumber daya laut yang melimpah ruah, namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia mumpuni, sehingga berdampak kepada tidak termanfaatkannya sumber daya laut tersebut secara maksimal.

Dengan demikian, salah satu upaya untuk menciptakan sumber daya manusia masyarakat pesisir adalah dengan mencari model pemberdayaan yang sesuai dengan karakter masyarakat pesisir itu sendiri. Karena, disadari atau tidak, masyarakat pesisir memiliki karakternya tersendiri yang pastinya berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:<sup>18</sup>

- a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
- c) Masyarakat nelayan buruh adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir.

---

<sup>17</sup> Mussadun dan Putri Nurpratiwi dalam penelitian yang berjudul “Kajian Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kampung Tambak Lorok” pada *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 27, no. 1, April 2016

<sup>18</sup> Efrizal Syarief, *Pembangunan Kelautan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. [https://www.bappenas.go.id/files/2113/.../efrizal\\_20091015122211\\_\\_2335\\_\\_0.doc](https://www.bappenas.go.id/files/2113/.../efrizal_20091015122211__2335__0.doc) . Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017

Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

- d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.<sup>19</sup>

Untuk itu, kiranya pemberdayaan masyarakat nelayan akan berbeda-beda dalam penanganannya. Paling tidak, antara masyarakat nelayan tangkap, bakul, buruh dan tani tambak harus diberdayakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun yang perlu diketahui adalah bagaimana mereka dapat diberdayakan supaya mereka dapat hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

### C. Literatur Review

Berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir telah banyak penelitian-penelitian yang dihasilkan sebagai suatu fenomena faktual. Hal ini karena masyarakat pesisir mempunyai sejarah panjang dalam mengisi historical bangsa. Masyarakat pesisir dapat pula disebut sebagai wilayah maritim, sehingga negara kita telah lama disebut sebagai negara maritim. Oleh karena itu wajar jika banyak peneliti yang konsen untuk dijadikan sebagai fokus kajian, misalnya hasil penelitian Siti Arieta tentang *Community Based Tourism Pada Masyarakat Pesisir Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*



*Pemberdayaan Ekonomi.* Hasil penelitiannya mengungkap bahwa pemberdayaan ekonomi pada masyarakat pesisir dapat difokuskan pada bagaimana mengelola sektor kepariwisataan di kawasan pesisir sangat memungkinkan dan dapat memajukan pembangunan di lingkungannya<sup>20</sup>.

Demikian pula Taufik dalam penelitian tentang *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar* menyimpulkan bahwa adanya hambatan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir disebabkan karena kurang antusiasme dalam mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan karena dianggap kurang penting dan sulit dipahami serta penyuluhan yang intens dalam rangka pendampingan pembuatan proposal untuk pendanaan merupakan solusi pendampingan yang perlu ditekankan.<sup>21</sup>

Nendah Kurniasari dan Elly Reswati Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan melihat bahwa pemberdaan ekonomi masyarakat pesisir sangatlah kompleks hal ini bukan saja pada aspek teknis di lapangan melainkan secara regulasi dan ini yang penting belum ada keperpihakan, terutama dalam perundang-undangan<sup>22</sup>.

Demikian pula hasil penelitian Eka Putri Arviyanthi, Margaretha Suryaningsih dan Tri Yuniningsih tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Di Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang menyatakan bahwa 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir diupayakan pengembangan kemampuan keterampilan nelayan, 2) Hambatan yang masih dihadapi hingga saat ini adalah masih ditemui sifat ragu dan kehilangan komitmen, 3) Faktor pendukung adanya komitmen, lingkungan politik yang stabil, perda yang tidak memberatkan, masyarakat yang ingin berubah, ada kelompok yang peduli lingkungan, keterpaduan dengan visi dan misi dinas, dan 4) Faktor kunci keberhasilan adanya koordinasi dan kerjasama<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Dikutip dari tulisan Siti Arieta dalam Jurnal Dinamika Maritim Vol. 2 No. 1 September 2010 pada Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 72

<sup>21</sup> Taufik dalam tulisan yang berjudul *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar* yang dimuat dalam Jurnal Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 1, Januari 2013, pada Universitas Hasanudin, 61-70

<sup>22</sup> Dinukil dari Nendah Kurniasari dan Elly Reswati dalam Buletin Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No.m 1, 2011

<sup>23</sup> Hasil penelitian kelompok yang berjudul *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Di Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang*, oleh Eka Putri Arviyanthi, Margaretha Suryaningsih dan Tri Yuniningsih pada Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>

Michel Sipahelut dalam “*Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*”, juga menggambarkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir perlu 1) strategi perbaikan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Halmahera adalah sebagai berikut: (1) pengembangan akses permodalan; (2) pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan; (3) pengembangan akses pemasaran; (4) penguatan kelembagaan masyarakat pesisir; (5) pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat; (6) pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan; dan (7) pengembangan diversifikasi pengolahan ikan<sup>24</sup>.

Ningsih dari Direktorat Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Republik Indonesia dalam penelitiannya tentang *Kajian Kebijakan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* juga menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan konsep pendekatan wilayah, yaitu dengan cara menentukan suatu wilayah di kawasan pesisir yang kondisi masyarakatnya miskin, telah terjadi degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, kelebihan tangkap (*over eksploitasi*), penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan pencemaran. Strategi pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh melalui pendekatan 4 (empat) bina: (1) bina manusia, (2) bina sumberdaya, (3) bina lingkungan, dan (4) bina usaha, yang dirangkaikan dengan metode partisipatoris (*participatory approach*). Berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat pesisir, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai dengan peringkatnya/ prioritasnya adalah sebagai berikut: (a) peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; (b) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan (3) konservasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP)<sup>25</sup>.

Demikian pula Rino Adibowo yang secara khusus meneliti tentang *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) Pesisir*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan

---

<sup>24</sup> Michel Sipahelut dalam tesis yang berjudul *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor tahun 2010

<sup>25</sup> Ningsih dalam penelitiannya tentang “*Kajian Kebijakan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*”, pada Direktorat Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Republik Indonesia.

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal, melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya.

Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pada umumnya adalah 1) komitmen dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, 2) tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan 3) orientasi masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga<sup>26</sup>.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei yang penekanannya pada bentuk eksploratori (*exploratory*, menjelajah/penjajakan)<sup>27</sup>. Obyek penelitian adalah keluarga muslim di wilayah pesisir utara Jawa, yaitu di Desa Eretan Kulon, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes-Pulogading Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer melalui teknik wawancara pada keluarga muslim sebagai responden pada masing-masing obyek, dan data sekunder melalui data-data statistik yang didapatkan pada masing-masing demografi daerah sebagai data penunjang. Sementara jenis data didapatkan dari jenis data kualitatif dan data kuantitatif sekaligus. Dengan demikian, maka teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga analisis kualitatif secara bersamaan, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Rino Adibowo dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir” pada Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IV No. 11/Desember 2014 Universitas Komputer Indonesia, Bandung

<sup>27</sup> Bentuk penelitian eksploratori ini berhubungan dengan pertanyaan “Apa”, karena untuk menjelajah atau menggambarkan apa yang terjadi termasuk siapa, kapan, di mana, atau berhubungan dengan karakteristik gejala sosial. Dalam Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 26.

<sup>28</sup> Miles dan Huberman (1992) dalam Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 339.



## **BAB II**

### **KONDISI MASYARAKAT PESISIR UTARA JAWA**

#### **A. Kondisi Desa Eretan Kulon**

##### **1. Profil Desa Eretan Kulon**

###### **a. Kondisi Pemerintahan**

Tata pemerintahan Desa Eretan Kulon terdiri dari pemerintah desa dan BPD. BPD sendiri berperan sebagai mitra pemerintah desa untuk menjalankan kegiatan pemerintahan desa. BPD yang terdiri dari seorang ketua dan beberapa anggota ini, salah satu fungsinya adalah untuk membuat rancangan peraturan desa dan melakukan pengawasan. Selain BPD, pemerintah desa juga memiliki mitra dalam menunjang kegiatan pembangunan dan perekonomian desa, mitra tersebut yaitu KUD dan Komite Pemberdayaan Masyarakat.

Koperasi Unit Desa Eretan Kulon yang bernama KUD Mina Bahari berada dalam ranah pemerintah desa dan dilindungi keberadaannya oleh pemerintah desa. Koperasi tersebut berfungsi untuk memberdayakan masyarakat terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan melalui simpanan nelayan yang nantinya digunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak nelayan dan sebagai tabungan pakeklik. Selain itu, Koperasi Unit Desa juga memberikan sarana untuk kegiatan jual beli ikan yaitu Tempat Pelelangan Ikan yang letaknya persis disamping Koperasi Unit Desa.

Mitra pemerintah desa selanjutnya yaitu KPM (Komite Pemberdayaan Masyarakat) yang dibentuk oleh pihak Pertamina. Komite tersebut berfungsi untuk berpartisipasi dalam membangun desa Eretan Kulon, namun kepengurusan Komite Pemberdayaan Masyarakat sendiri diserahkan kepada masyarakat desa Eretan Kulon. Beberapa tugas dari KPM diantaranya yaitu mengurus bantuan-bantuan dari pihak diluar desa (terutama Pertamina) untuk kemudian dikelola sebaik mungkin demi kepentingan warga desa Eretan Kulon. Hingga saat ini, bantuan yang telah diterima dan dikelola oleh KPM dari Pertamina Hulu Energi (PHE) yaitu berupa alat biogas untuk pengelolaan sampah menjadi

biogas, bantuan obat-obatan untuk posyandu, serta bantuan lainnya yang membantu kinerja desa Eretan Kulon dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Eretan Kulon, bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Eretan Kulon, yaitu pembangunan sarana infrastruktur seperti: pembangunan jembatan dan perbaikan jalan.



**Gambar 1:**

Suasana dan Kondisi Tempat Pelelang Ikan (TPI) Eretan Kulon yang Berfungsi sebagai tempat pelayanan jual beli ikan masyarakat

Selama periode pemerintahan kepala desa terakhir di tahun 2019, Desa Eretan Kulon telah berhasil membuat dua hingga tiga ribu jalan setapak di beberapa blok, membangun rumah komunitas nelayan serta membangun jembatan antar RT. Anggaran pembangunan sendiri berasal dari pusat melalui PNPM, Provinsi, serta Kabupaten yang kemudian dikelola oleh pemerintah desa.

#### b. Kondisi Ekonomi

Desa Eretan Kulon merupakan sebuah desa dengan potensi ekonomi utamanya berada di sektor perikanan dan kelautan dengan presentase 60 % dari keseluruhan sumber daya yang ada. Mayoritas penduduk Desa Eretan Kulon berprofesi sebagai nelayan dengan pendapatan yang bervariasi sesuai dengan strata sosial nelayan seperti yang terendah yaitu Anak Buah Kapal (ABK) hingga yang tertinggi yaitu juragan.

Pusat kegiatan perekonomian perikanan berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di samping Koperasi Unit Desa.

Tempat Pelelangan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan jual beli ikan yang baru ditangkap dari laut, TPI di desa Eretan Kulon di pegang oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari sebagai pemberi fasilitas. Kegiatan pelelangan sendiri biasanya berlangsung setiap hari dari pukul 11 pagi sampai selesai tergantung seberapa banyak tangkapan nelayan hari itu, namun biasanya acara lelang ikan selesai pada jam 13.00 WIB..

Berdasarkan hasil observasi Peneliti, terlihat bahwa KUD Mina Bahari memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian nelayan. Selain berperan sebagai penyedia dan pemelihara Tempat Pelelangan Ikan, KUD Mina Bahari juga berperan untuk meningkatkan perekonomian kaum nelayan. Salah satu upaya strategi yang dikembangkan oleh KUD Mina Bahari Desa Eretan Kulon adalah dengan diadakannya tabungan bagi para nelayan, dimana setiap keuntungan yang didapat dari hasil melaut disisihkan untuk ditabung di Koperasi Unit Desa.

Diantara tujuan diadakannya tabungan nelayan oleh KUD Mina Bahari adalah untuk digunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak nelayan. Selain untuk biaya pendidikan, tabungan ini bisa diambil saat musim paceklik dimana pada musim tersebut sulit untuk mendapatkan ikan. Jika para nelayan mengalami kecelakaan, disediakan dana asuransi kecelakaan yang di ambil dari tabungan nelayan. Semua hal tersebut di atur oleh *stakeholder* dari KUD Mina Bahari Desa Eretan Kulon dalam rangka meningkatkan perekonomian nelayan.

Berdasarkan data yang didapat dari Koperasi unit Desa pada bulan Mei 2013, di dalam data tersebut dikatakan bahwa produksi ikan oleh para nelayan Eretan Kulon per bulan rata-rata 700-800 ribu kg per bulan dimana angka tersebut adalah angka yang cukup tinggi bagi sebuah desa yang mayoritas penduduknya nelayan. Jenis ikan yang paling sering ditangkap nelayan Eretan Kulon adalah petek dan peperek yang merupakan ikan yang akan diolah menjadi ikan asin kemudian diikuti kuniran, tiga waja, raja gantang, cumi-cumi, dan jenis ikan lainnya. Selain perikanan, terdapat usaha tambak di Desa Eretan Kulon. Komoditi yang dibudidayakan dalam tambak adalah benur, osla, udang, dan ikan lele.

Kegiatan perekonomian warga Desa Eretan Kulon disamping ada yang berprofesi sebagai nelayan, juga ada yang berprofesi sebagai petani, hasil komoditi utama dari pertanian ini berupa padi dimana dalam

setahun petani dapat melakukan panen padi sebanyak tiga kali. Kegiatan perekonomian di bidang pertanian ini diatur oleh pemerintah desa yaitu bagian urusan Raksa Bumi. Selain itu, terdapat pula kegiatan peternakan yang termasuk dalam kegiatan perekonomian Desa Eretan Kulon. Meskipun sebagian besar penduduk Desa Eretan Kulon berprofesi sebagai nelayan, namun adapula profesi lain seperti pengusaha, guru sekolah dan pedagang di Desa Eretan Kulon.

c. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Kondisi keluarga muslim masyarakat Desa Eretan Kulon Indramayu, jika dilihat dari aspek pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1 Pendidikan Keluarga Muslim Eretan Kulon**

No	Tingkatan	Orang
1	Tidak Sekolah	620
2	Putus Sekolah	60533
3	SD/Sederajat	577
4	SMP/Sederajat	452
5	SMA/Sederajat	442
6	Akademi (D1 – D3)	16
7	Sarjana (S1)	25
8	Pascasarjana (S2)	2

Sumber: Profil Desa Eretan (2017)

Desa Eretan Kulon memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang cukup untuk kegiatan belajar mengajar. Mayoritas penduduk di desa Eretan Kulon kini telah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMK. Namun, masih banyak dari para orang tua yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan masih belum menyadari akan manfaat dan urgensi pendidikan.



Siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah tersebut (khususnya SMP dan SMK) tidak hanya berasal dari Desa Eretan Kulon, melainkan juga berasal dari beberapa desa

**Gambar 2:**  
Lembaga Pendidikan di Eretan Kulon guna menyediakan tempat anak-anak nelayan



sekitar yang masih berada dalam kecamatan yang sama, seperti dari Desa Eretan Wetan dan Desa Parean Girang. Sebagian penduduk usia pelajar juga banyak yang melanjutkan pendidikan di luar Desa Eretan Kulon.

#### d. Kondisi Budaya

Di Desa Eretan Kulon terdapat beberapa tradisi atau kebudayaan yang ada dalam masyarakatnya, diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Kesenian Dangdutan

Kesenian dangdutan sebagai suatu tradisi yang biasanya laksanakan atau diselenggarakan pada saat ketika para nelayan mendapatkan hasil melimpah. Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan untuk hiburan nelayan setelah lama pergi bekerja mencari ikan di laut.

##### 2) Kesenian Nadran

Kesenian ini dilakukan sebagai wujud dari rasa bersyukur atas hasil melimpah yang didapat dari hasil tangkapan para nelayan dilaut. Hal ini merupakan adat yang sudah ada di setiap daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Kesenian adran dilakukan dengan cara persembahan kepala kerbau yang nanti akan dibawa dengan perahu rakit yang telah dibuat oleh para nelayan. Mereka melumuri setiap kapal para nelayan dengan darah kerbau, mereka

percaya darah kerbau tersebut membawa keberuntungan untuk pekerjaan mereka sebagai nelayan. Biaya kesenian Nadran ini berasal dari iuran para nelayan yang dikumpulkan setiap hari oleh para nelayan.

3) Pawai obor

Kegiatan ini berupa iring-iringan sambil membawa obor sebagai bentuk rasa kebersyukuran penyambutan datangnya bulan suci ramadhan. Kegiatan pawai obor ini diikuti oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua. Perjalanan selama pawai obor dimulai dari masjid kemudian mengelilingi desa dan berakhir di masjid yang sama. Selama perjalanan mereka membaca tahlil dan mengumandangkan takbir serta menyerukan marhaban ya ramadhan.

4) Suku dan agama

Sebagian besar warga Desa Eretan Kulon berasal dari suku jawa, sedangkan sisanya merupakan suku pendatang dari suku sunda, Cina, dan Padang. Mayoritas warga desa Eretan Kulon beragama Islam.

5) Bahasa

Warga desa Eretan Kulon sehari-hari banyak menggunakan bahasa Jawa sedangkan untuk lingkungan sekolah maupun tempat formal lainnya mereka menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga tidak jarang yang menggunakan bahasa Jawa (Indramayuan).

e. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Eretan Kulon terdiri dari laki-laki sebanyak 5453 orang dan perempuan sebanyak 5418 orang. Berdasarkan data yang didapat dari monografi desa, diketahui bahwa seluruh penduduk Desa Eretan Kulon beragama Islam. Di Desa Eretan Kulon terdapat 5 buah masjid, yang mana masjid utamanya adalah Masjid Jamie Eretan Kulon, selain itu juga terdapat 22 buah mushola. Kelompok keagamaan di desa Eretan Kulon terdiri dari 1 kelompok Majelis Ta'lim dan 1 kelompok Remaja Masjid.



**Gambar 3:**  
Salah satu tempat  
sarana ibadah  
Desa Eretan  
Kulon, yaitu  
Masjid

Dari hasil observasi selama pemetaan sosial, Peneliti melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan di Desa Eretan Kulon sangat antusias tinggi. Masyarakat Desa Eretan Kulon selalu antusias dalam mengikuti kegiatan keagamaan, seperti; peringatan hari besar Islam (PHBI) berupa maulid nabi, hari besar Islam, isra mi'raj dan sebagainya. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak pernah sepi peserta.

f. Kondisi Geografis dan Geologi

Desa Eretan Kulon merupakan desa di kecamatan kandanghaur, Kabupaten Indramayu yang terletak di bagian utara pulau Jawa (jalur pantura) serta memiliki luas wilayah 498,713 Ha. Berdasarkan letak geografisnya, desa Eretan Kulon terletak pada posisi  $6^{\circ} 18'52.54''$  S dan  $108^{\circ} 02'46.86''$  dengan suhu berkisar  $28-31^{\circ}$  C. Desa ini memiliki batas wilayah yaitu:

**Tabel 2 Kondisi Batas Desa Eretan Kulon**

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Sebelah Utara   | : Laut Jawa          |
| 2. Sebelah Selatan | : Desa Kertawinangun |
| 3. Sebelah Barat   | : Desa Sukahaji      |
| 4. Sebelah Timur   | : Desa Eretan Wetan  |

**Gambar 4:**  
Kondisi batas  
Desa Eretan  
Kulon



Ketinggian Desa Eretan Kulon sekitar 0.2- 1m dpl. Sebelah utara Desa Eretan Kulon terdapat beberapa hutan mangrove, dengan luas sekitar 30 m2. Sedikitnya hutan mangrove dikarenakan pengalihan fungsi lahan dari hutan mangrove menjadi lahan tambak dan pemukiman, Melihat kondisi tersebut, kini lahan tambak yang tidak berfungsi mulai ditanami mangrove.

Desa Eretan Kulon merupakan salah satu kawasan pesisir yang terletak di wilayah pantai utara pulau Jawa. Daerah ini masih termasuk pada zona Jakarta yaitu daerah tepi laut Jawa yang terbentang mulai dari Serang ke Cirebon. Sebagian besar daerah ini terdiri dari endapan *alluvial* yang terbawa oleh sungai-sungai yang bermuara di laut Jawa.



**Gambar 5:**  
Muara Tepi Laut  
Eretan Kulon

Dari gambar 5 di atas, secara Geomorfologi daerah ini berupa pedataran, yang terdiri dari endapan *alluvial* merupakan hasil dari sedimentasi laut dan darat. Bentuk-bentuk lain dapat ditemukan pada daerah pesisir desa Eretan Kulon, seperti pesisir pantai dan rawa air asin (*salt marsh*) yaitu rawa yang terbentuk akibat genangan air laut di pinggir pantai. Sungai yang berperan dalam proses sedimentasi daerah ini terdapat pada bagian timur wilayah desa ini, dengan tipe sungai *meander* berarus laminar. Sungai dengan tipe ini tingkat pengendapannya lebih tinggi dibanding dengan tingkat erosinya.

*Litologi* penyusun wilayah Desa Eretan Kulon ini terdiri dari batupasir, batulempung, dan batulanau. Batuan tersebut masih berupa endapan yang belum terlitifikasikan akibat umur pengendapan yang masih relative muda (kuarter) dan juga struktur geologi yang kurang berkembang pada daerah ini.

Kebencanaan geologi yang sering melanda wilayah desa ini yaitu banjir akibat naiknya permukaan air laut menuju ke daratan (pasang). Untuk menanggulangi keadaan seperti ini masyarakat desa dibantu pemerintah desa membangun sebuah tanggul berupa tumpukan batu setinggi kurang lebih 1 meter yang terpasang di sepanjang garis pantai.

g. Kondisi Sumber Daya Alam

Desa Eretan Kulon memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam. Hal ini terlihat dari berbagai macam mata pencaharian yang dimiliki oleh warga masyarakatnya.

**Gambar 6:**

Sungai yang ada di Eretan Kulon sebagai tempat sandar Kapal/Perahu Masyarakat Nelayan. Perahu paling besar bervolume sampai  $\pm$  30 GT paling kecil 1 GT



Berdasarkan hasil interview yang dilakukan terhadap Bapak Arif Amin selaku Kepala Desa setempat, Peneliti mendapatkan data atau pemetaan mengenai potensi sumber daya apa saja yang terdapat di desa ini. Oleh karena desa ini terletak di pinggir Pantai Utara Jawa (pantura), maka sebagian besar mata pencaharian warganya adalah sebagai nelayan. Komoditi utama dari desa ini tentunya berasal dari perikanan yang menduduki sekitar 60% dari jumlah seluruh potensi sumber daya alam yang ada. Selain perikanan, ada juga usaha tambak. Komoditi yang dibudidayakan dalam tambak adalah benur, osla, udang, dan ikan lele.

Kemudian, potensi sumber daya alam yang menduduki peringkat kedua adalah hasil dari pertanian. Sekitar 20% dari warga setempat berprofesi sebagai petani. Hasil komoditi utama dari pertanian ini berupa padi dimana dalam setahun petani dapat melakukan panen padi sebanyak tiga kali. Menurut Kades, hasil pertanian di Desa Eretan Kulon tidak begitu maksimal dikarenakan adanya masalah pada irigasi sawah. Selain padi, komoditi lain yang tak kalah banyaknya adalah tanaman kedelai. Kebanyakan warga yang bermata pencaharian sebagai petani ini berdomisili di blok kebon 1. Selain menjadi petani tanaman, beberapa warga juga menjadi petani garam. Garam yang diperoleh dari air laut ini kemudian dijual kembali pada pemasok garam yang bertugas mengubah garam kasar menjadi garam halus untuk kemudian dipasarkan ke daerah Subang. Para petani garam kebanyakan berdomisili di blok kebon 2 Desa Eretan Kulon.

Lalu, sekitar 10% dari potensi sumber daya di desa ini ditempati oleh peternakan. Hewan yang ditenakkan antara lain domba, sapi, dan bebek. Semua peternak yang ada di desa ini kebanyakan berada di blok kebon 1. Kemudian, sisa 10% lagi dari potensi sumber daya yang ada ditempati oleh pengeboran minyak lepas pantai yang dilakukan oleh Pertamina.

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai potensi sumber daya alam apa saja yang terdapat di desa ini maka dapat dikatakan bahwa Desa Eretan Kulon memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam.

h. Aspek Permasalahan Sosial;

Lokasi Desa Eretan Kulon yang terletak di pesisir pantai menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa bermata pencaharian sebagai nelayan. Kehidupan nelayan yang sebagian besar dihabiskan di tengah laut, membuat mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk dapat hadir di tengah keluarga. Oleh karena itu, kaum perempuan terutama para ibu yang memegang peranan penting sebagai pengganti kepala keluarga di rumah. Kegiatan para ibu selain mengurus kebutuhan rumah tangga seperti memasak, beberapa dari mereka juga membuka usaha lain seperti membuka warung dan pembuatan ikan asin.

Salah satu permasalahan sosial di desa ini adalah mengenai usia pernikahan yang masih sangat muda, yaitu sekitar usia 14-17 tahun. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kurangnya pendidikan tentang pernikahan. Selain itu, terdapat faktor budaya yang menyebabkan kebanyakan masyarakat Desa Eretan Kulon lebih memilih untuk segera melangsungkan pernikahan di usia muda. Masyarakat Desa Eretan Kulon terutama kaum wanitanya berfikir bahwa dengan segera melangsungkan pernikahan maka mereka dapat mengurangi beban keluarga. Faktor pengaruh budaya pergaulan bebas juga membuat masyarakat memilih untuk menikah muda agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Eretan Kulon akan pentingnya pendidikan menjadi permasalahan sosial lain yang kini sedang dihadapi oleh pemerintah Desa Eretan Kulon. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang lebih memilih untuk memprioritaskan pekerjaan sehingga mereka berhenti sekolah lalu bekerja sebagai nelayan atau bagi wanita mereka menikah dan membuat usaha. Selain itu, para orang tua di Desa Eretan Kulon juga masih belum maksimal memotivasi anak-anaknya untuk terus sekolah.

Permasalahan sosial selanjutnya yang tidak luput dari observasi Peneliti adalah tentang kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga lingkungan Desa Eretan Kulon terlihat kurang indah karena banyaknya sampah yang bertebaran di jalanan maupun halaman rumah.

Di samping permasalahan-permasalahan sosial di atas terdapat satu permasalahan sosial yang cukup menarik, yaitu permasalahan tentang masih terdapat wanita penghibur yang dikenal dengan sebutan ‘dombret’. Meskipun Desa Eretan Kulon merupakan desa yang terbilang religius, tetapi wanita penghibur tersebut seringkali dengan mudah ditemui di acara-acara seperti orkes dangdut maupun acara di kafe.

## **B. Kondisi Desa Gebang**

### **1. Profil Desa Gebang**

Desa Gebang merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Gebang, yang terletak 10 m dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan luas wilayah seluas 224,930 Ha. Desa Gebang terdiri dari 6 Dusun dengan 6 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT). Desa Gebang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Gebanguik Kec. Gebang
- Sebelah Timur : Desa Silihasih Kec. Pabedilan
- Sebelah Selatan : Desa Karangwangun Kec. Babakan
- Sebelah Barat : Desa Gebangkulon Kec. Gebang.



**Gambar 7:**  
Peta Lokasi Desa Gebang Mekar  
Desa Pemekaran Gebang Kecamatan Gebang



Kondisi geografis Desa Gebang Mekar berada di Ketinggian tanah dari permukaan laut 2 mdpl, Banyaknya curah hujan 2600 mm/tahun, Tofografi (dataran rendah), Dataran rendah, Suhu udara rata-rata 28° - 32°C dan Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan) :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 35 Km
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten / Propinsi : 250 Km
3. Jarak dari Ibukota Negara : 350 Km

Desa Gebang Mekar merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah, dengan ketinggian antara  $\pm$  2 mdpl. Sebagian besar wilayah Desa Gebang adalah dataran rendah. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Silih Asih Kec. Pabedilan, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Wangun Kec. Babakan, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gebang Kulon Kec. Gebang, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Gebang Udik Kec. Gebang.

## **2. Kondisi Desa Gebang Mekar**

Dari segi jenis pekerjaan yang paling banyak dilakoni oleh kepala keluarga di Desa Gebang Mekar adalah nelayan, buruh nelayan, dan pedagang. Rinciannya, nelayan sebanyak 668 KK atau 39%, buruh (sebagian besar buruh nelayan dan tani) 504 KK atau 29%, dan 416 KK atau 24% bekerja sebagai pedagang/wiraswasta. Terkait daya beli, terdapat 17% (305 KK) dengan pendapatan di bawah Rp 1 juta, sebanyak 30% memiliki daya beli atau pengeluaran Rp 1,5 juta s/d kurang dari Rp 2 juta, 419 KK atau 24% keluarga dengan rentang pengeluaran Rp 1 juta s/d kurang dari Rp 1,5 juta, dan 297 KK atau 17% keluarga dengan rentang pengeluaran Rp 2 juta s/d kurang dari Rp 2,5 juta. Kondisi ini bisa dianggap bahwa tingkat kesejahteraan 71% warga masih belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum provinsi sebesar Rp 2.000.000,-/bulan.

Gebang Mekar ini merupakan pemekaran dari Desa Gebang Ilir, dimana posisi atau letak Desa Gebang Mekar kiri jalan raya kalau dari arah Cirebon. Dengan pembatasan sungai besar, Desa Gebang Mekar secara geografis potensial untuk nelayan mencari ikan di laut. Solidaritas masyarakat nelayan cukup solid dalam membantu sesama nelayan. Misalnya, ketika ada kecelakaan di lautan, mereka saling membantu.

### **3. Aspek Budaya Desa Gebang Mekar**

Pada aspek kebudayaan, masyarakat Desa Gebang Mekar memiliki kekayaan budaya yang bisa dimanfaatkan sebagai muatan pembelajaran. Beberapa sistem kebudayaan yang bisa dimanfaatkan, misalnya: pengetahuan tentang musim, angin, pengetahuan jenis ikan, cara menangkap ikan, alat tangkap dan cara memperbaikinya, perahu dan cara memperbaikinya, serta kuliner kelautan (seperti membuat ikan asin atau ikan asap).

Beberapa kesenian khas dan kegiatan budaya tahunan juga bisa dijadikan sebagai bahan ajar, seperti: kesenian burok, tarling, topeng, dan wayang. Pada bulan-bulan tertentu mereka mengadakan ritual sedekah laut (nadrans) dan barikan. Biasanya mereka mempersembahkan kepala kerbau untuk dilarung ke laut. Oleh karena itu, program pembelajaran keberaksaraan (KF) yang terkait langsung dengan budaya lokal bisa dikembangkan sebagai muatan pembelajaran.

## **C. Kondisi Desa Kluwut**

### **1. Profil Desa Kluwut**

Kluwut adalah desa di Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Terletak di jalan pantura yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Desa Kluwut, salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, merupakan salah satu desa yang dijadikan sebagai pusat aktivitas nelayan.

Desa Kluwut terletak di sebelah barat pusat kecamatan Bulakamba dan dilalui oleh jalur utama Pantai Utara (Pantura). Jika kita melewati jembatan di sebelah barat kantor kelurahan Desa Kluwut, suasana sebagai desa nelayan memang begitu nampak jelas dengan adanya pemandangan melabuhnya ratusan kapal nelayan di sepanjang Sungai Kluwut. Di desa Kluwut ini juga terdapat Pusat Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang cukup besar.

Di Kabupaten Brebes sendiri sebenarnya terdapat beberapa desa nelayan. Namun dari sekian banyak desa nelayan, Kluwut merupakan desa nelayan yang paling besar di wilayah Brebes. Terdapat sekitar 160 kelompok nelayan di Kluwut, dimana setiap kelompok nelayan terdiri dari 5 sampai 10 nelayan dan diketuai oleh seorang nakhoda kapal. Setiap kelompok memiliki satu kapal besar sebagai sarana operasional mencari

ikan. Berbeda dengan desa nelayan Pulogading atau Sawojajar yang hanya terdiri dari nelayan-nelayan kecil dengan perahu-perahu kecil. Umumnya nelayan-nelayan Kluwut merupakan penduduk local, namun ada beberapa nelayan yang berasal dari luar wilayah Brebes seperti Tegal dan Cirebon.

Setidaknya ada dua kelompok masyarakat nelayan di desa ini; yakni kelompok pencari ikan (nelayan) dan kelompok pengolah, penampung sekaligus pemasar (distributor). Dari sekitar 160 kelompok nelayan ada 3 orang yang bertugas untuk mengkordinir (ketua wilayah) beberapa kelompok nelayan. Parkir kapal paling selatan (yang paling dekat dengan jalan raya Pantura) dikordinir oleh Bapak Tasori, paling utara dikordinir oleh Bapak Sugeng dan di antara tempat parkir utara dan selatan (tengah) dikordinir oleh Bapak Warih. Ketiga pemimpin wilayah ini berada di bawah koordinasi seorang ketua nelayan keseluruhan, yakni Bapak Damir. Biasanya para ketua nelayan ini disebut sebagai *lurah* (lurahnya nelayan). Para nelayan yang tidak melaut biasanya berkumpul di Ranggon, yakni tempat berkumpulnya para nelayan.

Kelompok selanjutnya adalah kelompok pengolah, penampung sekaligus pemasar (distributor). Kelompok ini mempunyai tugas untuk mengolah, menampung dan memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan. Distribusi hasil laut dilakukan ke wilayah Brebes sendiri dan juga ke luar wilayah Brebes. Kelompok ini sangat mudah ditemui, karena biasanya mereka berkumpul di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada tidak jauh dari jalan raya Pantura (sekitar 100 meter utara jalan raya).

## **2. Kondisi Desa Kluwut**

Masih rendahnya perhatian pemerintah dan kesadaran warganya Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes berpotensi jadi desa terkumuh di Kabupaten Brebes. Desa dengan jumlah penduduk 18.600 jiwa terpadat di kecamatan bulakamba dan terpadat Nomor 3 di Kabupaten Brebes belum mempunyai TPA (tempat pembuangan sampah akhir).



**Gambar 8:**  
Kondisi lingkungan Desa Kluwut terkait sampah menjadi permasalahan tersendiri, hampir disudut gang ada sampah yang berserakan

Berdasarkan pantauan observasi, kian hari sampah menumpuk di beberapa TPA liar, yakni di dukuh KARPET (karang sari jepet), karang asem, kemuning, sapu laut, gudang balung dan lecot adalah dukuh paling parah tingkat kekumuhannya atau dengan kata lain sebanyak 13 RW dari 16 RW yang belum tertata baik soal penanganan sampah.

Kepala Desa Kluwut Isa Ansori (41 tahun) saat di hubungi di sela sela kesibukannya di balai Desa Kluwut menuturkan "Pemerintah desa mengalami kesulitan soal pengadaan TPA, karena tanah desa yang harusnya bisa menjadi salah satu solusi TPA jaraknya sangat jauh, lebih 3 km," katanya.

Pihak desa pernah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten agar mendapat fasilitas TPA, akan tetapi di tolak karena lokasinya di bantaran sungai, katanya menyalahi aturan. "inikan bisa jadi dilema". Dia juga mengakui bahwa kesadaran warganya masih rendah dan masih banyak yang hidup di garis kemiskinan. "Tahun kemarin tetcatat ada 570 rumah dan sudah di bantu Dinas Kesehatan berupa bantuan pengadaan 100 WC, namun hingga saat ini masih ada 400an rumah tangga yang belum punya WC." Kebanyakan mereka enggan membuat wc sendiri, karena masih ada sungai yang mereka manfaatkan sebagai jamban, kesadaran untuk hidup bersih rendah sekali,".

Bahkan fakta di lapangan tidak sedikit warga yang menutup saluran air,pemukiman semakin padat, banyak pekarangan yang tadinya berfungsi

sebagai satu rumah tempat tinggal sekarang di sulap jadi 1 sampai 3 rumah. pokoknya persoalan di desa Peneliti sangat kompleks.tapi Peneliti sedang mempersuapkan PERDES untuk mengatur semua ini mas.

**Gambar 9:**

Kondisi jalan/gang masih berserakan sampah dan belum di plur/beton/aspal sehingga ketika musim hujan becek.



Menurut Kades, Ansori, ada lebih 4000 rumah yang ada di desa Kluwut. tiap rumah banyak yang di huni lebih dari 2 KK. Kalau rata rata tiap rumah menghasilkan 5 ons sampah tiap harinya di kalikan 4000 rumah. berarti ada 2 ton tiap hari sampah yang menumpuk di desa, dan 60 ton tiap bulanya, belum lagi limbah pengolahan sampah, limbah bongkar muat kapal ikan, limbah usaha pemitingan ayam. Ini persoalan besar yang sedang terjadi di desa Penelitian.

Salah satu warga Dukuh Karangasem Ridwan (40 tahun) mengaku bahwa warga yang membangun rumah di desa Kluwut banyak yang tidak mempertimbangkan bangunanya terhadap lingkungan sekitarnya. *"gimana nggak kumuh mas,orang mbangun rumah bikin emper ko' di atas got (saluran air, Red.), bahkan gotnya di tutup, padahal dia seorang RT, bagaimana dengan warga biasa yang lain,"* tuturnya. Di tempat yang lain Warso (55 tahun) warga RW 5 juga ikut menyayangkan sebagian perilaku warga yang membuat WC tanpa penampungan (septitenk). *"itu tinja nanti mengalir langsung masuk got dan kali sapi. warga hampir semua membuang sampah di kali sapi (sungai kecil yang melintasi RW 5,6,7 dan 8), itu kondisi kali nya ampun ach,"* tandas warso dengan nada tinggi.

### 3. Dinamika Masyarakat Nelayan

Sudah menjadi ketentuan alam bahwa kehidupan masyarakat tidak akan pernah lepas dari masalah dan dinamika, begitu juga dengan kelompok masyarakat nelayan ini. Berikut adalah beberapa masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat nelayan desa Kluwut:

- a) Prosedur pembuatan surat kapal (semacam STNK bagi kapal) rumit  
Sebagaimana STNK pada kendaraan darat, kendaraan laut juga harus disertai dengan surat-surat identitas. Dan terdapat sekitar 12 surat untuk sebuah kapal yang memiliki masa berlaku yang berbeda-beda sehingga menyulitkan para nelayan untuk beroperasi. Para nelayan berharap, pembuatan dan keberlakuan keduabelas surat itu dapat dilakukan secara bersamaan, sebab keberlakuan yang berbeda membuat kesulitan prosedur dan tentu menghambat operasional kapal dalam mencari ikan.
- b) Pendangkalan sungai Kluwut  
Pendangkalan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan belum ada tindakan efektif dari pemerintah. Pendangkalan mengakibatkan sulitnya akses kapal dari sungai (TPI) ke muara (laut), dan mengakibatkan kapal membutuhkan waktu berhari-hari untuk menuju ke laut atau sebaliknya.
- c) Akses penjualan hasil laut ke Tegal yang susah  
Pemerintah Kota Tegal enggan menerima masuknya kapal-kapal dari Brebes disebabkan meningkatnya jumlah nelayan local (dari Tegal sendiri). Terkait dengan dinamika kedua, kesulitan akses ke Tegal dan kesulitan akses masuk ke Pusat Pendaratan Ikan di Kluwut karena pendangkalan menjadi masalah serius dan perlu menjadi perhatian.

Masalah alam (seperti cuaca dsb) tidak menjadi masalah berarti bagi para nelayan. Sebab para nelayan sudah sangat paham menghadapi kondisi-kondisi alam yang dapat menghambat proses mencari ikan dan mereka mempunyai trik-trik sendiri dalam menghadapi kondisi alam.

## D. Kondisi Desa Pulogading-Pulolampes

### 1. Kondisi Geografis

Desa Pulogading dusun Pulolampes merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bulakamba Brebes Provinsi Jawa Tengah, adapun kondisi geografis desa tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak Pusat Pemerintahan dengan Desa Pulogading,
  - 1) Jarak Desa Pulogading ke Kecamatan Bulakamba 5,5 Km, dengan lama jarak tempuh ke Kecamatan dengan Kendaraan bermotor 15 menit.
  - 2) Jarak Pulogading ke Kabupaten Brebes 23 Km, dengan lama jarak tempuh ke Kabupaten dengan Kendaraan bermotor 90 menit.
  - 3) Jarak Pulogading Dusun Pulogading ke Ibukota Provinsi yaitu Semarang 212 km, dengan lama jarak tempuh ke Ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor 4 jam 30 menit.
- b. Batas-batas Wilayah Desa Pulogading
  - 1) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
  - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulakamba Kecamatan Bulakamba yang berbatasan dengan Kecamatan Larangan.
  - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pakijangan Kecamatan Bulakamba berbatasan dengan Kecamatan Wanasari.
  - 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Grinting Kecamatan Bulakamba dengan Kecamatan Tanjung.

#### c. Data Kependudukan Desa Pulogading

Data Kependudukan Desa Pulogading berdasarkan Jenis Kelamin yaitu :

Uraian	Laki-Laki	Perempuan
Penduduk	4.317 orang	4.176 orang
Kepala Keluarga	2.763	

### 2. Pendataan dan Identifikasi Keadaan Masyarakat

#### a. Kependudukan

Desa Pulogading merupakan desa yang terdiri dari dua pedukuhan yaitu Pulolampes dan Pulogading. Desa Pulogading bisa dikatakan desa yang agamis karena disana masyarakatnya aktif dalam kegiatan

keagamaan dan memiliki tempat ibadah yang nyaman untuk digunakan, seperti kita ketahui jumlah masyarakat Desa pulogading sampai sekarang tercatat berjumlah 8.493 orang dan mayoritas memeluk Agama Islam. Masyarakat disana sangat ramah, kepala Desa dan perangkat desa menerima Peneliti dengan sangat baik, sehingga Peneliti bisa berbaur dengan mereka, dan selama Peneliti melakukan penelitian Peneliti dianggap sebagai bagaian dari masyarakat desa tersebut.

b. Kondisi Pendidikan

Kondisi Pendidikan di desa ini merupakan masalah utama yang Peneliti temui, karena mayoritas pendidikan masyarakat Desa Pulogading adalah lulusan SD. Kebanyakan Masyarakat menganggap bahwa hal yang paling utama adalah bekerja dan menghasilkan uang, serta di dukung oleh kondisi alamnya berupa lautan, jadi kebanyakan masyarakat disana berprofesi sebagai nelayan dan ABK di luar negeri.

Namun berdasarkan informasi terakhir yang Peneliti dapatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mulai mengarah ke arah yang positif sehingga anak-anak putus sekolah dasar hampir tidak ada. Untuk pendidikan agama sendiri masyarakat disana mulai sadar dan dapat dikatakan sudah bagus terbukti dengan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai dari TPQ, MD dan majlis taklim. Adapun lembaga pendidikan di desa Polugading yaitu terdapat 3 buah SD/ sederajat, 2 buah TK/PAUD dan 3 lembaga pendidikan berbasis Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI).

c. Kondisi Ekonomi

Hasil analisa penelitian Peneliti bahwa keadaan perekonomian masyarakat Pulogading tergolong sedang jika dilihat dari keadaan daya beli masyarakat dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun untuk kegiatan ekonomi sendiri mayoritas masyarakat disana lebih memilih untuk bekerja diluar daerah bahkan sampai luar negeri, sehingga tidak ada masalah finansial yang dirasakan masyarakat disana. Informasi yang diperoleh dari pihak desa bahwa kegiatan social atau bisa dikatakan zakat mal berjalan dengan lancar, masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi tertolong dengan adanya program tersebut.



#### d. Bidang Kemasyarakatan

Masyarakat Desa Pulogading dan khususnya dusun Pulolampes yang mayoritas beragama Islam, selain melaut memiliki banyak agenda kegiatan, seperti pengajian (jamiahan) untuk ibu-ibu, remaja-remaja disana juga memiliki organisasi seperti IRM (Ikatan remaja Masjid). Memang pengajian didominasi oleh jama'ah ibu-ibu.

Masyarakat Dusun Pulampes Desa Pulogading dalam menjalin persaudaraan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat misalnya, ketika ada kematian, mereka berbondong-bondong untuk takziah, dan tahlilan bersama. Hal ini hampir ditemui didesa tetangganya, yaitu Desa Grinting. Demikian pula dalam peringatan Hari Besar Islam (PHBI) serta sejenisnya. Tak ketinggalan pula secara sosial kemasyarakatan dalam hal tradisi merayakan sedekah bumi dan sedekah laut setiap tahun di selenggarakan, tepatnya untuk sedekah laut diadakan di bulan November.

### 3. Potensi Desa Pulogading-Pulolampes

Setiap desa memiliki potensi yang adapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat disana, selama peneletian Peneliti mengamati potensi-potensi yang dapat dikembangkan diantaranya :

- a. Kegiatan Usaha mandiri yaitu UKM dengan memanfaatkan hasil dari laut yang melimpah yaitu Ikan,
- b. Tingkat kreatifitas masyarakat didesa tersebut sangat bagus, hal tersebut dapat dilihat dari karya-karya mereka pada saat karnaval atau pesta laut, Peneliti melihat bahwa kreatifitas mereka sangat bagus, jika digali dan dikembangkan lagi bisa menjadi suatu pendapatanb masyarakat yang menjajikan.
- c. Masyarakat disana juga memiliki hewan peliharaan seperti kambing, ayam, angsa, bebek,dan kuda. Jika tata kelolanya maksimal maka hal tersebut bisa menjadi ladang pendapatan yang menjanjikan.
- d. Usaha tambak yang ada dipedukuhan Pulolampes, saat cuaca tidak menentu para nelayan dapat memanfaatkan tambak tersebut sebagai sumber penghasilan lain. Jika dikelola dengan baik penghasilan dari tambak dapat menjadi usaha yang menjanjikan.
- e. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga bisa menjadi potensi yang sangat bagus jika dikembangkan, dimana kegiatan transaksi pembayaran masyarakat seperti penjualan produk atau hasil tangkapan ikan bisa

dilakukan oleh Bumdes, yang keuntungannya akan kembali bagi masyarakat.

Disamping itu, terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) dekat sungai tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan. Kapal-kapal nelayan masyarakat pesisir keluarga Muslim mendominasi (100 %), serta pertambakan yang luas. Potensi yang dimiliki masyarakat nelayan keluarga Muslim di Desa Pulogading-Pulolampes disamping banyak yang menjadi nelayan, baik nelayan tangkap, juga nelayan buruh dan petambak. Tetapi juga yang bertani sawah pun tidak sedikit. Artinya, secara ekonomi potensi desa Pulogading-Pulolampes memadai untuk memenuhi kehidupan keluarga yang lebih baik.

## BAB III

### PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR

#### A. Konsep Pemberdayaan

##### 1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber - menjadi kata ”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. *Daya* artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* manjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>29</sup>

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.<sup>30</sup>

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan)<sup>31</sup>. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam keputusan proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka<sup>32</sup>.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara

---

<sup>29</sup> Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), 1

<sup>30</sup> Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED

<sup>31</sup> Edi Sugiharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), *Cet Ke-1*, .57

<sup>32</sup> Edi Sugiharto, *Membangun Masyarakat*, 58

pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*”, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung<sup>33</sup>. Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial<sup>34</sup>.

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya<sup>35</sup>.

Adapun cara yang di tempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di miliknya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

## **2. Pemberdayaan menurut Islam**

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis.

---

<sup>33</sup>Edi Sugiharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, 57

<sup>34</sup>Edi Sugiharto, *Membangun Masyarakat*, 57

<sup>35</sup>Edi Sugiharto, *Membangun Masyarakat*, 59

Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistic dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.<sup>36</sup>

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan<sup>37</sup>. Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan *dhu'afa*, "*community empowerment*" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya<sup>38</sup>.

Masih dalam pengalaman Al-Qur'an, Jim life mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik<sup>39</sup>. Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah "*upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum dhu'afa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya*"<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, 427

<sup>37</sup> Agus Ahmad Syafi'i, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), 70

<sup>38</sup> Asep Usman ismail, *Pengalaman Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Dhu'afa* ( Jakarta: Dakwah Press) Cet ke-1, 9

<sup>39</sup> Asep Usman ismail, *Pengalaman Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, 9

<sup>40</sup> Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*, (Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997), 165

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.<sup>41</sup>

*Kedua*, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual *an sich*.

*Ketiga*, pemberdayaan ekonomi. Kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur’an telah menjelaskan didalam surat Az-Zhukruf ayat: 32

---

<sup>41</sup> Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034, 19

﴿ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا وَيَرْحِمُهُ رَبُّكَ حَيْرٌ مِمَّا

يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ الزخرف: ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Peneliti telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Peneliti telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32).

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ الحشر:

“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah

*kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”*(Al-Hasyr: 7).

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai “Kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan tadi.

Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “Penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara.

Demikian pula, di dalam mengatasi *problematika* tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber- sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra’du/13: 11.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد: ١١)

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra’du/13: 11)*



### 3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)<sup>42</sup>. Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.<sup>43</sup>

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya<sup>44</sup>.

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya<sup>45</sup>.

### 4. Tahapan pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press, 1987), Cet. Ke 2.

<sup>43</sup> Edi Sugiharto, *Membangun Masyarakat*, .60

<sup>44</sup> Edi Sugiharto, *Membangun Masyarakat*, .60

<sup>45</sup> Agus Ahmad Syafi'i, *Menejemen Masyarakat Islam*, 39

- a. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap pemfomalisasi rencanaaksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
- f. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- g. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.<sup>46</sup>

Adapun bagan dari model tahapan pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:



*Sumber: Adi Isbandi Rukminto*

<sup>46</sup> Agus Ahmad Syafi'i, *Menejemen Masyarakat Islam*, . 39

<sup>47</sup> Adi Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013 cet.

Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat, upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- 3) Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi<sup>48</sup>.

Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Sebagai bentuk implementasi dari pemberian kekuatan (*power*) kepada masyarakat, maka pada umumnya pemberdayaan dilakukan kepada sekelompok orang yang dianggap belum memiliki kekuatan yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat pesisir-nelayan. Sebagai bentuk implementasi dari pemberian kekuatan (*power*) kepada masyarakat, maka pada umumnya pemberdayaan dilakukan kepada sekelompok orang yang dianggap belum memiliki kekuatan yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat pesisir-nelayan.

Dimensi pemberdayaan masyarakat pesisir-nelayan mestinya mengacu pada konsep keberlanjutan. *Pertama*, keberlanjutan ekologis terwujud dari praktek perikanan yang tidak merusak lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak melebihi daya dukung lingkungan. *Kedua*, keberlanjutan sosial ekonomi mengacu pada tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir. *Ketiga*, keberlanjutan komunitas mengacu pada stabilitas sistem sosial, terjaminnya peran masyarakat dalam pembangunan, dan akses masyarakat pada sumberdaya baik untuk kepentingan pemanfaatan maupun pengelolaan. *Empat*, keberlanjutan institusi merupakan prasyarat bagi tercapainya tiga dimensi sebelumnya, yaitu keberlanjutan yang mencakup institusi politik (kapabilitas birokrasi desa), institusi sosial-ekonomi (keuangan desa dan pasar), dan institusi sumberdaya (pengelolaan sumberdaya)<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama : 1999), hal 58

<sup>49</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta : yayasan Pustaka Obor : 2001), 28

Kerangka berpikir dalam proses pemberdayaan setidaknya mengandung tiga tujuan penting, yaitu: (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan melalui peningkatan taraf pendidikan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan, dan (3) upaya melindungi (*protect*) terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

## **B. Keluarga Muslim Pesisir**

### **1. Definisi Keluarga Muslim Pesisir**

Apabila dilihat dari susunan kata dari keluarga muslim pesisir, maka terdapat 3 (tiga) kata yang membentuk istilah tersebut, yakni “keluarga”, “muslim”, dan “pesisir”. Ketiga istilah tersebut masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Dalam hal ini, penulis terlebih dahulu akan membedah ketiga istilah tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat<sup>50</sup>. Berbeda halnya definisi yang ada dalam KBBI tersebut, Mufidah Ch memberikan definisi keluarga sebagai sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Juga bisa diartikan suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dilihat dari kedua definisi di atas, terdapat perbedaan terkait definisi keluarga. Definisi keluarga yang diberikan KBBI cenderung terpaku kepada anggota-anggota yang membentuk suatu institusi yang bernama keluarga. Sedangkan Mufidah Ch, cenderung memberikan definisi kepada tujuan dari terbentuknya suatu keluarga itu sendiri. Sehingga apabila penulis perhatikan, bahwa kedua definisi di atas sejatinya saling berkaitan satu sama lainnya, atau dapat dikatakan bahwa definisi yang diberikan

---

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 1336

Mufidah Ch tersebut merupakan bentuk pengembangan dari definisi yang diberikan dalam KBBI.

Sedangkan dalam kajian ilmu sosiologis sendiri, pemaknaan keluarga tidak hanya menyangkut ayah, ibu, dan anak, namun meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan.<sup>51</sup> Dengan demikian apabila disimpulkan dari definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang bernaung dalam satu rumah tangga, sebagai perwujudan fitrah manusia dalam menjalankan dan memaksimalkan fungsinya sebagai *khalifah fi al-ardl*.

Kata “muslim” sendiri merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata (*wazan*) *aslama-yuslimu-Islamān*. Jadi, secara etimologis kata “muslim” adalah bentuk *fa’il* (subyek atau pelaku) dari kata kerja *aslama*. Perkataan Islam (*islām*) adalah berbentuk *mashdar*, yaitu kata kerja berbentuk benda yang menunjukkan aktivitas; Islam berarti sikap pasrah kepada Allah. Seseorang menjadi Islam berarti dia menjadi pasrah kepada Allah—melakukan sesuatu yang bersifat pasrah kepada Allah.<sup>52</sup> Secara etimologi, muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah, Swt. Sedangkan secara terminologi, kata muslim merupakan suatu istilah yang merujuk kepada orang yang memeluk agama Islam.

Sedangkan istilah pesisir merujuk kepada suatu wilayah Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah–daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 20.

<sup>52</sup> Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid: Jilid 2 H-L*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), 1125

<sup>53</sup> Dietriech G. Bengen, *Ekosistem Sumberdaya Pesisir dan Laut Serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, (Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 29 Oktober - 3 November 2001. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB)

Dari penguraian definisi ketiga istilah di atas, dapat dikatakan bahwa penyematan kata “muslim” dan “pesisir” pada kata “keluarga” menunjukkan bahwa dalam penelitian ini membatasi objek yang diteliti hanya kepada keluarga yang menganut agama Islam dan hidup di wilayah pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya kepada sumber daya pesisir. Dengan demikian definisi keluarga muslim pesisir dalam konteks ini adalah keluarga muslim yang hidup dan tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir.

## **2. Karakteristik Keluarga Muslim Pesisir**

Sebagai suatu masyarakat yang hidup di bibir pantai, keluarga muslim pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan keluarga muslim lainnya yang hidup diluar wilayah pesisir. Hal ini terjadi, karena pengaruh kondisi geografis yang turut membentuk karakteristik suatu masyarakat. Senada dengan yang dikatakan oleh Usman<sup>54</sup> bahwa lingkungan alam sekitar akan membentuk sifat dan perilaku masyarakat. Lingkungan fisik dan biologi mempengaruhi interaksi sosial, distribusi peran sosial, karakteristik nilai, norma sosial, sikap serta persepsi yang melembaga dalam masyarakat. Dikatakannya pula perubahan lingkungan dapat merubah konsep keluarga. Nilai-nilai sosial yang berkembang dari hasil penafsiran atas manfaat dan fungsi lingkungan dapat memacu perubahan sosial.

Masyarakat kawasan pesisir cenderung agresif, karena kondisi lingkungan pesisir yang panas dan terbuka, keluarga nelayan mudah diprovokasi, dan salah satu kebiasaan yang jamak di kalangan nelayan (masyarakat pesisir) adalah karena kemudahan mendapatkan uang menjadikan hidup mereka lebih konsumtif.<sup>55</sup>

Dengan karakteristik yang ada pada masyarakat pesisir, tentunya hal tersebut secara tidak langsung turut mempengaruhi karakter yang terbentuk pada keluarga muslim pesisir. Oleh sebab itu, untuk memahami karakteristik keluarga muslim pesisir secara mendalam, penulis

---

<sup>54</sup> Usman, S, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 310

<sup>55</sup> Suharti, dalam “Potret Nelayan Kenjeran. [Socialforum.hyoermart.net/\\_cusudi/00000007.htm](http://Socialforum.hyoermart.net/_cusudi/00000007.htm). Diakses 10 November 2018

menggunakan paradigma perspektif antropologis, hal ini untuk memahami eksistensi keluarga muslim pesisir bertitik tolak dan berorientasi pada hasil hubungan dialektika antara manusia, lingkungan, dan kebudayaannya. Dalam beragam lingkungan yang melingkupi kehidupan manusia, satuan sosial yang terbentuk melalui proses demikian akan menampilkan karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini penulis paparkan karakteristik keluarga muslim pesisir:

a. Kehidupan Sosial Keluarga Nelayan

Di Indonesia masyarakat pesisir dikenal sebagai masyarakat terbelakang dalam segala hal, mereka juga digolongkan sebagai masyarakat yang kurang mampu berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan lingkungannya secara baik, hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Tingkat pendidikan dan keterampilan masih rendah, pola berfikir yang statis, tradisional.
- b. Tempat-tempat nelayan yang tersebar, terpencil dan jauh dari keramaian sehingga tersisih dari kehidupan dan lingkungan yang lebih maju untuk mengadakan kontak masih terbatas.
- c. Mempunyai keluarga besar, sehingga hasil tangkapannya jarang mencukupi keluarganya.

Kusnadi menyatakan bahwa tingkat sosial ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan. Tingkat kehidupan mereka sedikit di atas pekerja migran atau setaraf dengan petani kecil.<sup>56</sup> Bahkan Mubyarto dalam bukunya menguraikan bahwa nelayan khususnya nelayan kecil dan tradisional dapat Bahkan Mubyarto dalam bukunya menguraikan bahwa nelayan khususnya nelayan kecil dan tradisional dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin jika dibandingkan secara seksama dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Kusnadi, *Pusat Studi Komunitas Pantai*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1987), 65

<sup>57</sup> Mubyarto, *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 137



Sebagai suatu kesatuan sosial-budaya, keluarga muslim pesisir memiliki ciri-ciri perilaku sosial yang dipengaruhi oleh karakteristik kondisi geografis dan mata pencahariannya. Sebagian dari ciri-ciri perilaku sosial tersebut peneliti uraikan sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Etos kerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran.
- b. Kompetitif dan mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan.
- c. Apresiasi terhadap prestasi seseorang dan menghargai keahlian.
- d. Terbuka dan ekspresif, sehingga cenderung kasar.
- e. Solidaritas sosial yang kuat dalam menghadapi ancaman bersama atau membantu sesama ketika menghadapi musibah.
- f. Kemampuan adaptasi dan bertahan hidup yang tinggi.
- g. Bergaya hidup konsumtif.
- h. Demonstratif dalam harta-benda (emas, perabotan rumah, kendaraan, bangunan rumah, dan sebagainya) sebagai manifestasi keberhasilan hidup.
- i. Agamis dengan sentimen keagamaan yang tinggi.
- j. Temperamental khususnya jika terkait dengan harga diri.

Itulah secara garis besar etos kerja dan karakteristik masyarakat nelayan pesisir yang secara geografis dipengaruhi oleh lingkungan alamnya. Dan, perilaku sosial yang agamis serta solidaritas tinggi tidak bisa ditinggalkan.

## 2. Sistem Kekeluargaan Keluarga Muslim Pesisir

Keluarga muslim pesisir biasanya merupakan keluarga batih,<sup>59</sup> artinya dalam satu keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak. Dalam satu keluarga, tiap anggota memiliki peranan masing-masing terutama dalam menjalankan perekonomian keluarga. Bapak sebagai kepala rumah tangga berperan utama dalam pencarian nafkah keluarga, biasanya bekerja sebagai nelayan. Istri berperan sebagai ibu

---

<sup>58</sup> Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 96

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 15

rumah tangga yang membantu pekerjaan suami mempersiapkan alat-alat atau hal-hal yang diperlukan untuk melaut, sedangkan anak masih merupakan tanggungan orang tua.

Dalam keluarga muslim pesisir seorang laki-laki sebagai ayah maupun perempuan sebagai ibu memiliki kewajiban bersama untuk kepentingan seluruh keluarga. Kedudukan ayah ataupun ibu di dalam keluarga muslim pesisir memiliki hak yang sama juga demi keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Status suami istri dalam keluarga muslim pesisir adalah sama nilainya, maksudnya masing-masing dianggap baik dalam bertindak. Suatu keluarga akan kokoh dan berwibawa apabila dari masing-masing anggota keluarga yang ada di dalamnya selaras, serasi dan seimbang.

Perbedaan posisi antara ayah dan ibu dalam keluarga pada dasarnya disebabkan oleh faktor biologis. Secara badaniah, wanita berbeda dengan laki-laki. Alat kelamin wanita berbeda dengan alat kelamin laki-laki, wanita memiliki sepasang buah dada yang lebih besar, suara wanita lebih halus, wanita melahirkan anak dan sebagainya. Selain itu secara psikologis, laki-laki akan lebih rasional, lebih aktif, lebih agresif. Sedangkan secara psikologis wanita lebih emosional, lebih pasif.

Keberhasilan suatu keluarga nelayan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sejahtera tidak lepas dari peran seorang ibu/istri yang begitu besar. Baik dalam membimbing dan mendidik anak mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah disekitar pantai. Namun demikian kebanyakan dari masyarakat kita masih menempatkan seorang ayah sebagai subyek, sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sedangkan ibu lebih ditempatkan sebagai objek yang dinomor duakan dengan kewajiban mengurus anak di rumah.

### 3. Kebudayaan Keluarga Muslim Pesisir

Bagi masyarakat keluarga muslim pesisir, kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan, referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai

peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Setiap gagasan dan praktik kebudayaan harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat nelayan. Jika tidak, kebudayaan itu akan hilang dalam waktu yang tidak lama. Kebudayaan haruslah membantu kemampuan survival masyarakat atau penyesuaian diri individu terhadap lingkungan kehidupannya. Sebagai suatu pedoman untuk bertindak bagi warga masyarakat, isi kebudayaan adalah rumusan dari tujuan-tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, yang disepakati secara sosial.<sup>60</sup>

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah atau dataran rendah, dan perkotaan. Kebudayaan ini terbentuk melalui proses sosio-historis yang panjang dan kristalisasi dari interaksi yang intensif antara masyarakat dan lingkungannya. Kondisi-kondisi lingkungan atau sumberdaya alam, mata pencarian, dan sejarah sosial-etnisitas akan mempengaruhi karakteristik kebudayaan masyarakat nelayan. Dalam prespektif antropologis, eksistensi kebudayaan nelayan tersebut adalah sempurna dan fungsional bagi kehidupan masyarakatnya.<sup>61</sup>

Karena nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, maka kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan atau perilaku sosial budaya

---

<sup>60</sup> Clyde Kluckhohn, "*Cermin bagi Manusia*", dalam Parsudi Suparlan (Ed.). *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 85.

<sup>61</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 38

masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki struktur patron-klien sangat kuat,
- b. Etos kerja tinggi,
- c. Memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal,
- d. Kompetitif dan berorientasi prestasi,
- e. Apresiatif terhadap keahlian, kekayaan, dan kesuksesan hidup,
- f. Terbuka dan ekspresif,
- g. Solidaritas sosial tinggi,
- h. Sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan
- i. Perilaku konsumtif.

Struktur budaya keluarga muslim pesisir cenderung melonggar dan terbuka. Kelonggaran dan keterbukaan itu di sebabkan oleh karena dalam tradisi masyarakat pesisir menerima siapa saja yang mau berusaha tanpa memandang asal usulnya. Begitu juga keluarga muslim pesisir sepanjang hal kelonggaran dan keterbukaan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, adat istiadat daerah setempat. Kondisi budaya keluarga muslim pesisir yang cukup menonjol adalah budaya gotong royong yang sangat kental. Selama ada yang menggerakkan usaha bersama yang telah mereka sepakati bersama akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan bersama selalu mendapat dukungan yang positif dari keluarga muslim pesisir lainnya.

Budaya keluarga muslim pesisir yang unik atau campur dari berbagai jenis budaya lokal dan asing yang memberi watak/karakter sehingga dapat dikembangkan sebagai potensi pantai. Dalam penataan ruang pesisir harus memperhatikan budaya masyarakat setempat serta dapat meningkatkan kondisi masyarakat berdasarkan aspirasi yang ada, sehingga dapat sejahtera, adil dan berkelanjutan.

#### **4. Kehidupan Keagamaan keluarga muslim pesisir**

penelitian Nursyam pada masyarakat nelayan di Palang, Tuban disebutkan bahwa walaupun memiliki nilai keIslaman yang kuat, masyarakat nelayan setempat tetap melakukan berbagai upacara

tradisional, seperti upacara lingkaran hidup, kalenderikal, upacara tolak balak, dan upacara hari-hari baik.<sup>41</sup> Berbagai upacara tersebut berpusat pada medan budaya makam, sumur, dan masjid.

Dalam pandangan penulis kondisi pemahaman dan pengaktualisasian keagamaan dan kepercayaan lokal bisa tumbuh seperti ini karena medan kerja yang dihadapi oleh keluarga muslim pesisir sangat berat dan berbahaya, sehingga memerlukan berbagai dukungan kekuatan gaib untuk memperlancar kegiatan penangkapan ikan. Kemampuan diri dan kekuatan akal pikiran dianggap belum mencukupi untuk menjamin keamanan melaut dan memperoleh hasil tangkapan. Walaupun demikian tidak semua keluarga muslim pesisir dan khususnya keluarga muslim pesisir melakukan hal semacam itu, kepercayaan terhadap makhluk-mahluk halus di laut mulai menurun. Makhluk-mahluk halus ini tidak dianggap lagi sebagai ancaman serius dalam melaut. Ancaman paling menakutkan yang harus dihadapi adalah gelombang laut yang besar disertai angin kencang dan hujan deras. Nampak juga kentara dalam pengamalan ajaran-ajaran agama, keluarga muslim pesisir ada yang masih tetap mengamalkan walaupun dilingkupi kesibukan dan tuntutan kehidupan dan ada juga yang sebaliknya.

### **C. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Pesisir**

Sebagaimana diketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritas dihuni oleh keluarga muslim<sup>62</sup> yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Penyebaran keluarga muslim ini tentu tidak lepas dari sejarah panjang masuknya Islam di bumi nusantara ini. Dan, yang paling pertama dan utama adalah penduduk muslim di kawasan Pesisir pantai utara terutama Jawa.

Pada kehidupan keluarga muslim pesisir pada umumnya, terutama di Pesisir pantai utara (PANTURA) adalah berpencaharian mayoritas nelayan. Seperti halnya kehidupan keluarga muslim di Eretan Kulon Indramayu, Gebang Mekar Cirebon, Kluwut dan Pulolampes-Pulogading Brebes yang

---

<sup>62</sup> Dari sejak tahun 1987 silam, keluarga muslim di Indonesia berjumlah sekitar 88,16 % dari penduduk yang ada, sebagaimana dicatat oleh Muhammad Fakri Gaffar dalam tulisannya, "Membangun Keluarga Muslim: Profil, Permasalahan dan Konsep Dasar" dalam Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa diterbitkan oleh PLP2M, Yaogyakarta, 1987, 261.. Meskipun kini berubah jumlah keluarga yang ada di Indonesia.

semuanya berada di kawasan pedesaan. Secara teori, aktivitas dan kehidupan masyarakat pedesaan memiliki 3 (tiga) tipologi<sup>63</sup>, yaitu:

1. Tipologi masyarakat desa berdasarkan aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidup

Tipologi masyarakat desa berdasarkan pemenuhan kebutuhan pokok ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu: a. tipe masyarakat yang mayoritas sebagai petani, b. tipe masyarakat yang berprofesi sebagian besar nelayan, dan c. tipe masyarakat pedesaan yang sebagian besar berpenghasilan dari industri kecil (*home industri*), maupun besar (*corporate*, seperti; pabrik rokok, garmen, tekstil, makanan ternak dan lain sebagainya).

2. Tipologi masyarakat berdasarkan pada pola pemukiman

Tipologi masyarakat berdasarkan pola pemukiman ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: a) tipe masyarakat yang pola pemukinannya tersebar (antara rumah satu dengan lainnya saling berjauhan), b) tipe masyarakat yang pola pemukimannya terkumpul atau berjejer antara satu rumah dengan rumah lainnya, dan c) tipe masyarakat yang pemukiman/ rumah melingkar, sehingga terlihat seperti lingkaran pemukiman.

3. Tipologi desa menurut perkembangan masyarakat

Tipologi desa menurut perkembangan masyarakat sebagaimana telah dirinci oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri, 1972) dibedakan menjadi 5 (lima) tipe, yaitu: a) tipe masyarakat desa tradisional (Pra Desa) dengan ciri khas penduduknya mayoritas berprofesi sebagai pengasuh anak, memasak, menyeterika, memelihara orang yang sudah tua, dan sejenisnya, b) tipe masyarakat desa Swadaya yang bercirikan masyarakat statis dan tradisional, c) tipe masyarakat desa Swakarya (Desa Peralihan), dimana pemenuhan masyarakat ini tidak lagi bergantung pada sumber daya alam melainkan telah menggali sumber lain, seperti berdagang, memanfaatkan keterampilan, dan membuka industri kecil, d) tipe masyarakat desa Swasembada. Kemandirian dan dinamisasi pola hidup, seperti penggunaan teknologi dalam pemanfaatan lahan pertanian, pabrikisasi dan seterusnya,

---

<sup>63</sup> Siswijono dan Wisadirana, *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*, (Malang: Agritek YPN, 2008), 49-53

dan e) tipe masyarakat desa Pancasila. dimana tipe masyarakat desa seperti ini tipe yang paling ideal, dimana masyarakat adil dan makmur menjadi penciriannya.

Berdasarkan tiga tipologi masyarakat pedesaan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hampir di Pesisir Pulau Jawa seperti Indramayu, Cirebon, dan Brebes kecenderungan masyarakat tipe masyarakat nelayan sebagai pokok pencahariannya dan tipe masyarakat yang berpola pemukiman padat penduduk (berkerumun/kumpul) dan tradisional dari sisi gaya hidupnya. Menurut Redfield (1982 dalam Siswijono dan Wisadirana) karakteristik masyarakat tersebut biasanya bercirikan:

- a. Jumlahnya kecil dengan suatu tempat tinggal yang terpencil dari tempat tinggal masyarakat lain dan jauh dari keramaian kota,
- b. Relatif bersifat homogen dengan rasa persamaan dan kesatuan yang kuat.
- c. Memiliki sistem sosial yang teratur dengan perilaku tradisionalnya.
- d. Rasa persaudaraan yang sangat kuat. dan
- e. Taat pada ajaran-ajaran agama dan menurut kepada pemuka masyarakat (tokoh masyarakat)<sup>64</sup>.

Dari karakteristik tersebut di atas, tentu dewasa ini untuk menggambarkan karakteristik masyarakat di Pesisir Pantai Utara (Pesisir) Jawa tidaklah semuanya benar. Akan tetapi yang paling dominan adalah 1) memiliki rasa persaudaraan yang sangat kuat, dan 2) taat pada ajaran-ajaran agamanya, serta pada tokoh masyarakat. Karakteristik yang demikian menjadikan keluarga muslim masyarakat nelayan pesisir memiliki kemandirian yang kuat, meskipun dalam kehidupan di bidang ekonomi secara potensial masih perlu diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat keluarga muslim pesisir tentu berbeda dengan masyarakat pada umumnya, yang bukan dari pesisir. Hal ini karena keluarga muslim masyarakat pesisir dengan sendirinya banyak menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, terutama terkait dengan persoalan ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Kusnadi<sup>65</sup> bahwa pemberdayaan masyarakat pada umumnya, dan keluarga muslim (nelayan) pesisir bertujuan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, 53

<sup>65</sup> Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta: LkiS 2007), 39

hanya untuk mencapai kesejahteraan sosial-budaya dan hal ini menjadi basis membangun fondasi *civil society*. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan kualitas sumber daya manusia, kapasitas, dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga, serta tingkat partisipasi politik warga yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat lokal.

Matthoriq, Suryadi, dan Mochamad Rozikin dalam penelitiannya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan keluarga muslim masyarakat pesisir merupakan suatu upaya secara serius dalam mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan<sup>66</sup>. Dan ini menjadikan pemberdayaan pada masyarakat pesisir diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan otonomi mereka dalam mengelola potensi sumber daya pesisir laut, laut, dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan sebagai jalan untuk menjamin kelangsungan hidup saat ini dan masa generasi selanjutnya<sup>67</sup>.

Dengan demikian, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pesisir dapat dicapai, dinamika sosial ekonomi lokal berkembang, dan potensi sumber daya alam terjamin kelestariannya. Dan, tentu dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat tersebut tidak mungkin terlaksana jika tidak adanya saling sinergitas antara peran pemerintah baik aparat kelurahan dan instansi terkait lainnya, LSM yang peduli atau pun perusahaan, kampus maupun masyarakat nelayan itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini pemerintah desa selama ini sudah mewadahi aspirasi masyarakat namun masih banyak kendala dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Pemerintah seharusnya lebih melindungi lagi, dan masyarakat terus berpartisipasi meningkatkan kemampuan/kompetensi diri agar mampu bertahan hidup dan sukses sebagai nelayan.

---

<sup>66</sup> Matthoriq, et. all., *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Studi pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3), 426

<sup>67</sup> Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996), 97



Namun meskipun demikian, pada zaman sekarang ini untuk mencari pencaharian di laut lebih mudah karena adanya modernisasi. Misalnya, dulu masyarakat menangkap hasil laut dengan menggunakan alat seadanya atau tradisional, kini perkembangan merubah tradisi tersebut yang darinya pakai sistem manual, sekarang sudah terbantu oleh alat alat yang canggih, serta pendapatan dari laut pun semakin meningkat tajam, yang tadinya hanya 10 kini bisa dapat 100 bahkan lebih dari itu dari hasil melaut karena efek modernisasi. Apalagi jika ada pendampingan dari pihak pemerintah dan instansi lainnya.

Menurut Rahmanto dan Purwaningsih<sup>68</sup> dalam penelitiannya di Masyarakat Pesisir Pulau Untungjawa menjelaskan terkait dengan pemodelan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



**Bagan 2:**  
**Model Pemberdayaan Masyarakat**

<sup>68</sup> Rahmanto dan Purwaningsih dalam penelitian berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untungjawa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kemandirian Nelayan”, (Jurnal ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7 Nomor 1), 121.

Berdasarkan gambar 10 di atas, maka model pemberdayaan keluarga muslim masyarakat pesisir harus terintegrasi dengan empat faktor, yaitu; 1) faktor perguruan tinggi, 2) faktor pemerintah, 3) faktor swasta, dan 4) masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah, baik pemerintah setempat sampai pada dinas terkait – sangat penting dalam mengambil bagian pemberdayaan masyarakat pesisir. Disamping itu pula keberadaan perguruan tinggi perlu pula berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Dan, tak ketinggalan pula instansi swasta keberadaannya dapat menjadi urgen dalam keikutsertaannya dalam pemberdayaan masyarakat muslim pesisir.

Namun demikian, secara fungsional pemberdayaan yang dilakukan di lapangan dalam pengentasan kemiskinan pada dasarnya mempunyai model-model yang berlainan. Adakalanya model pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak didasarkan pada konsep yang telah ada. Dengan demikian diperlukan adanya kajian dari berbagai model pengembangan masyarakat yang dilakukan baik itu oleh BUMN melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*), maupun organisasi kemasyarakatan baik itu organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada kesenian<sup>69</sup>.

Suhendi<sup>70</sup>, memandang bahwa dalam melakukan model pemberdayaan perlu diperhatikan pada tiga pilihan, yaitu; a) mengintroduksi regulasi pro rakyat, 2) peningkatan kapasitas swaorganisasi, dan 3) pengembangan sistem produksi-konsumsi. Menurutnya, dari ketiga pilihan model pemberdayaan pada masyarakat pada umumnya peningkatan kapasitas swaorganisasi lebih sesuai dengan makna filosofi pemberdayaan itu sendiri, dimana proses tersebut lebih menekankan pada peningkatan kemampuan kelompok dalam mengorganisir sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi.

Dalam buku *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan*

---

<sup>69</sup> Mulyana dan Zaenudin, *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility* (Kasus Pelaksanaan CSR Oleh PT Pertamina UP-IV Balongan) yang dimuat dalam PROSIDING KS: Riset & PKM, Vol. 4, Nomor 1, 82

<sup>70</sup> Suhendi, et. all., 2014. *Pemberdayaan Komunitas Pemulung Sampah Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Berbasis ECO – Preneur di TPAS Karangrejo Kota Metro*. Laporan Penelitian STAIN Jurai Siwo Metro, 12

Rokan Hilir, Andeas dan Savitri<sup>71</sup> menuliskan bahwa model pendekatan yang efektif ada dua, yaitu: 1) model pemberdayaan secara Top-Down (level makro), dan 2) model pemberdayaan secara Botton-Up (level mikro). Hal senada di atas, Mikkelsen<sup>72</sup> menggambarkan bahwa model micro level dan macro level yang dimaksud disamping sebagai bagian dari pendekatan kerja lapangan yang dapat memberikan masukan dalam konteks kebijakan, sedangkan level makro lebih cenderung pada dimensi historis sebagai bagian dalam konteks pemberdayaan.

Sedangkan Andeas<sup>73</sup>, menyatakan level mikro merupakan suatu perencanaan pembangunan dengan sistem “*top-down*”, artinya perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Kelebihan dari model “*top-down*” adalah: (1) Masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan program tersebut sudah dapat berjalan sendiri karena adanya peran pemerintah yang optimal, (2) Hasil yang dikeluarkan bisa optimal dikarenakan biaya yang/dikeluarkan ditanggung oleh Pemerintah, (3) Mengoptimalkan kinerja para pekerja di pemerintahan dalam menyelenggarakan suatu program.

Sementara itu, menurut Savitri<sup>74</sup>, bahwa perencanaan dan implemmentasi pembangunan dengan sistem “*bottom-up*” artinya adalah perencanaan yang dilakukan dimana masyarakat lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sedangkan pemerintah-pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu jaiannya program. Pendekatan bottom-up yaitu pendekatan pembangunan berbasis komunitas merupakan strategi yang dipercaya dalam mempromosikan model yang lebih partisipatif dalam pembangunan integritas dan sinergi yang tinggi menghasilkan kesempatan-kesempatan sosial (*social opportunity*) yang menunjukkan kepercayaan tinggi keluarga maupun umum, dengan kepentingan umum lebih diutamakan dalam semua kegiatan sosial dan ekonomi.

---

<sup>71</sup> Andeas dan Savitri, 2006. *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir*. Pekanbaru, 29

<sup>72</sup> Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, (Jakarta: YOI, 2003), 8

<sup>73</sup> Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris*, 30

<sup>74</sup> Andeas dan Savitri, *Ibid.*, 30

Dari beberapa model tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa model pemberdayaan pada keluarga muslim masyarakat pesisir baiknya menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu top-down, dan *botton-up*. Hal ini penting karena peran-peran pemerintah, masyarakat, lembaga lain, baik perguruan tinggi, swasta dan LSM secara terintegrasi dapat bersinergi. Model level mikro (*botton up*) untuk pemberdayaan masyarakat pesisir yang difokuskan pada keluarga muslim akan lebih mengena karena disamping berdimensi pada kebijakan-kebijakan yang menyangkut penanganan permasalahan yang rentan terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi dengan segera akan ditangani, sementara model makro akan melihat secara komprehensif latar belakang sejarah sosial masyarakat sehingga persoalan yang ada dapat diminimalisir.

## BAB VI

### TIPOLOGI DAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UTARA JAWA

#### A. **Tipologi Keluarga Muslim Masyarakat Pesisir di Eretan, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes-Pulogading**

Tipologi dapat diartikan sebagai pembagian keluarga ke dalam golongan-golongan menurut kriteria-kriteria tertentu. Sebagian besar keluarga pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, yang dihadapkan pada situasi ekologis yang sulit dikontrol. Perikanan tangkap bersifat *Open acces* sehingga nelayan juga harus berpindah-pindah dan terdapat elemen resiko yang harus dihadapi lebih besar.

Kondisi ini merupakan suatu realitas yang dihadapi mayoritas keluarga pesisir, baik di Eretan Kulon Indramayu, Gebang Mekar Cirebon, maupun Kluwut dan Pulolampes, yang kebanyakan kepala keluarganya bermata pencaharian sebagai nelayan. Tentunya dengan

Resiko yang dihadapi tersebut merupakan imbas dari dua faktor, yakni dari sisi kemampuan maupun keahlian yang bersifat turun temurun, dan juga dari sisi peralatan yang masih bersifat tradisional. Hal ini tentunya memberikan implikasi tidak hanya dari sisi keamanan yang cenderung diabaikan, namun juga dari sisi hasil tangkap yang diperoleh.

Realitas tersebut dalam pandangan Bagong Suyanto membentuk suatu kriteria dalam tipologi keluarga nelayan, yang menurutnya dapat dilihat berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap yang dimiliki nelayan

Dalam sudut pandang ini, nelayan bisa dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan nelayan yang mempunyai alat-alat produksi sendiri (pemilik alat produksi) dan golongan nelayan yang tidak mempunyai alat-alat produksi sendiri (nelayan buruh), dalam hal ini nelayan buruh hanya dapat menyumbang jasa tenaganya dalam kegiatan menangkap ikan serta

---

<sup>75</sup> Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), 53.

mendapatkan upah yang lebih kecil dari pada nelayan pemilik alat produksi.

b. Dari segi skala investasi modal usahanya

Nelayan yang di pandang dari sudut pandang ini dapat di golongkan menjadi dua tipe, yaitu nelayan besar yang memberikan modal investasi dengan jumlah yang banyak untuk kegiatan menangkap ikan dan nelayan kecil yang hanya bisa memberikan modal investasinya dengan jumlah yang sedikit.

c. Berdasarkan tingkat teknologi peralatan tangkap ikan

Berdasarkan teknologi peralatan tangkap ikan, nelayan dapat dibedakan menjadi nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern cenderung lebih menggunakan teknologi canggih dan berpendapatan lebih besar dibandingkan dengan nelayan tradisional, ini dikarenakan nelayan modern wilayah produksinya dapat menjangkau perairan yang lebih jauh.

Dalam kapasitas teknologi, orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi, Arif Satria menggolongkan nelayan menjadi 4 (empat) tingkatan. Keempat tingkatan nelayan tersebut adalah:

- 1) *Peasant-fisher* atau nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsisten*). Nelayan ini masih menggunakan alat tangkap yang tradisional, seperti dayung atau sampan tidak bermotor dan masih melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.
- 2) *Post-peasant fisher*, dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih jauh dan memperoleh surplus dari hasil tangkapannya karena mempunyai daya tangkap lebih besar. Umumnya, nelayan jenis ini masih beroperasi di wilayah pesisir. Pada jenis ini, nelayan sudah berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja yang digunakan sudah meluas dan tidak bergantung pada anggota keluarga saja.
- 3) *Commercial fisher*, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah besar yang dicirikan dengan

banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang digunakan pun lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya.

- 4) *Industrial fisher*, ciri nelayan jenis ini adalah diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri dinegara-negara maju, secara relatif lebih padat modal, memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu, dan menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.<sup>76</sup>

Menurut Mubyarto, berdasarkan stratifikasi yang ada pada keluarga nelayan, dapat diketahui berbagai tipologi nelayan, yaitu:<sup>77</sup>

- 1) Nelayan kaya A, yaitu nelayan yang mempunyai kapal sehingga mempekerjakan nelayan lain tanpa ia sendiri harus ikut bekerja.
- 2) Nelayan kaya B, yaitu nelayan yang memiliki kapal tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal.
- 3) Nelayan sedang, yaitu nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa mempekarjakan tenaga dari luar keluarga.
- 4) Nelayan miskin, yaitu nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan bekerja lain baik untuk ia sendiri atau untuk isteri dan anak-anaknya.
- 5) Nelayan pandega atau tukang kiteng.

Berdasarkan uraian dan penjelasan Arif Satria dan Mubyarto mengenai pengelompokkan dan tipologi masyarakat pesisir tersebut, maka dapat peneliti kelompokkan tipologi masyarakat pesisir pantai utara pada keluarga muslim nelayan sebagai berikut:

### **1. Tipologi Keluarga Muslim Pesisir Eretan Kulon**

Desa Eretan Kulon merupakan salah satu contoh nelayan Indonesia yang orientasi ekonomi utamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

---

<sup>76</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2002), 28-29

<sup>77</sup> Mubyarto, *Nelayan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 51.

dan masih terbatas dalam memanfaatkan modal yang dimiliki. Kehidupan nelayan dicirikan dengan kemiskinan yang mengharuskan nelayan bekerja lebih lama di laut dan membuat tidak memiliki waktu yang banyak bersama keluarga. Menurut Warsito, salah satu tokoh keluarga nelayan Eretan Kulon, keluarga nelayan sangat bergantung pada musim, pada akhirnya permasalahan yang timbul yakni ketika sedang musim paceklik menyebabkan menurunnya hasil tangkapan, dan akan berpengaruh pada pendapatan nelayan. Modal melaut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan ketika paceklik karena modal yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan.

Keluarga nelayan di Desa Eretan Kulon pada umumnya sama dengan nelayan-nelayan yang terdapat pada daerah lain, namun keluarga Eretan Kulon, dalam pengamatan penulis secara tipologi dari segi skala investasi modal usaha, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok. *Pertama*, golongan keluarga nelayan yang memiliki kapal besar dan keluarga nelayan yang memiliki kapal kecil.

Keluarga nelayan yang memiliki modal besar, biasanya mereka yang memiliki kapal besar. Dengan kapasitas kapal yang besar, maka mereka dapat menampung anak buah kapal dan hasil tangkapan dalam jumlah yang banyak. Disamping itu, masa berlayarnya pun jauh lebih lama. Hal itu berbanding terbalik dengan nelayan yang hanya memiliki kapal dengan kapasitas yang kecil. Dimana dalam hal permodalan mereka tidak besar, begitu pun anak buah kapal maupun hasil tangkapan yang diperoleh, cenderung sedikit.

Kegiatan menangkap ikan ke laut pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki, baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih bujangan. Kegiatan tersebut tidak memandang usia, melainkan kondisi fisikal yang menentukan. Biasanya penduduk laki-laki yang sudah berusia 15 tahun boleh ikut menangkap ikan ke laut.<sup>78</sup>

Mereka lebih memilih berangkat untuk menangkap ikan pada sore hari, karena pada waktu ini dianggap sebagai waktu yang efektif dan strategis. Dari kedua anggota kelompok nelayan tersebut, mereka memiliki waktu lama yang berbeda dalam proses penangkapan ikan. Pada umumnya

---

<sup>78</sup> Budhisantoso, dkk., *Kehidupan Masyarakat Nelayan, Kabupaten Banyuwangi: Propinsi Jawa Timur*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. 38



kelompok yang memiliki kapal kecil hanya mencari ikan paling lamannya 2-6 hari dan yang besar bisa mencapai 10 hari sampai berbulan-bulan. Dan untuk menangkap cumi dan sontong biasanya dilakukan oleh kelompok yang memiliki kapal besar, karena dalam pencariannya mereka bisa menghabiskan waktu sekitar satu bulan lamannya.

Menurut Bapak Royani (Sekretaris KUD Mina Bahari)<sup>79</sup> mengatakan bahwa kondisi keluarga nelayan saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan keluarga nelayan terdahulu dikarenakan banyaknya faktor-faktor pendorong. Beberapa faktor pendorongnya adalah seperti biaya sekolah yang sekarang lebih terjangkau sehingga anak-anak nelayan bisa mengenyam pendidikan jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu, kemudian pemikiran atau wawasan para nelayan sekarang ini jauh lebih baik dan adanya tokoh-tokoh agama yang akhirnya banyak membawa pengaruh besar seperti diantaranya mendirikan organisasi-organisasi keagamaan. Peningkatan-peningkatan keluarga nelayan saat ini dapat dilihat dari segi ekonomi maupun dari segi agama.

Dari segi ekonomi dapat dilihat dari banyaknya jumlah anak-anak nelayan yang mengenyam pendidikan dari mulai sekolah dasar bahkan ada yang sampai jenjang perguruan tinggi, selain itu dari kondisi rumah yang jauh lebih baik di bandingkan dengan rumah keluarga nelayan yang dulu, jika sebagian besar keluarga nelayan yang dulu tinggal di rumah gubuk yang beralaskan tanah, sekarang keluarga nelayan saat ini banyak yang memiliki rumah dengan bangunan yang terbuat dari batu bata dan beralaskan keramik.

Selain itu, dari segi agama berkaitan dengan pengaruh agama terhadap golongan keluarga yang telah dijabarkan pada bab dua, bahwasanya keagamaan keluarga nelayan menurut Nottingham termasuk tipe keluarga terbelakang dan keagamaan mereka lebih besar karena kedekatannya dengan alam. Menurut para informan, keluarga nelayan Eretan memang melaksanakan ritual-ritual atau upacara-upacara yang diyakini dapat menolak bala atau menghormati penguasa laut yang biasa dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Upacara-upacara semacam ini di Eretan biasa dikenal dengan sebutan nadranan.

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Royani

Nandranan ini dilakukan karena kehidupan keluarga nelayan berada dalam ketidakpastian, pendapat mereka bergantung pada keramahan alam. Namun dengan seiringnya waktu, keluarga nelayan saat ini jauh lebih mengenal agama dibandingkan keluarga nelayan terdahulu, hal ini bisa dilihat dari anak-anak mereka yang sekarang ini lebih rajin mengaji di mushola setiap ba'da magrib sampai isya, serta pengungkapan keluarga nelayan yang sekaligus menjadi informan dalam penelitian ini mereka mengungkapkan bahwa budaya pesta laut atau biasa disebut sebagai nadranan yang biasanya dilakukan setiap dua tahun sekali dengan memberikan suguhan berupa kepala kerbau yang dihanyutkan ke laut dengan menggunakan kapal-kapalan yang dibuat oleh para nelayan sekarang-sekarang ini mulai malas dilakukan walaupun memang pada kenyataannya entah sekarang ini masih akan dilakukan atau dihapuskan.

Dikarenakan peran dari tokoh agama dalam upaya medakwahkan ajaran agama yang mulai direspon oleh keluarga nelayan sehingga para informan nelayan penelitian ini mengungkapkan bahwa nadranan memang tidak seharusnya diadakan karena sekarang ini mereka lebih memahami agama dibandingkan sebelumnya, sehingga mereka berpendapat bahwa acara ini sebenarnya *tahayul* (musyrik) menurut ajaran Islam, selain itu juga mereka berpendapat bahwa acara nadranan cenderung lebih bersifat hedonisme atau duniawi dan mengambur hamburkan uang saja.

## **2. Tipologi Keluarga Muslim Keluarga Pesisir Gebang Mekar**

Berbeda halnya dengan tipologi keluarga pesisir Eretan Indramayu, keluarga nelayan pesisir Gebang Cirebon berdasarkan hasil penelitian penulis terbagi menjadi beberapa golongan nelayan yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik biasanya memiliki alat-alat produksi seperti perahu, jaring dan perlengkapan lainnya. Dan golongan nelayan yang tidak mempunyai alat-alat produksi sendiri (nelayan buruh), dalam hal ini nelayan buruh hanya dapat menyumbang jasa tenaganya dalam kegiatan menangkap ikan serta mendapatkan upah yang lebih kecil dari pada nelayan pemilik alat produksi.

Sedangkan nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi melainkan hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas dalam keluarga pertanian nelayan buruh

identik dengan buruh tani. *Kedua*, dapat dilihat dari modal usahanya struktur keluarga nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan yang di pandang dari sudut pandang ini dapat di golongkan menjadi dua tipe, yaitu nelayan besar yang memberikan modal investasi dengan jumlah yang banyak untuk kegiatan menangkap ikan dan nelayan kecil yang hanya bisa memberikan modal investasinya dengan jumlah yang sedikit.

Modal dalam nelayan ini seperti kapal, alat tangkap dan bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi untuk mencari ikan. Sebagian modal nelayan yang dimiliki digunakan sebagai biaya produksi atau biaya operasi, penyediaan input produksi (sarana produksi), seperti untuk memiliki perahu/kapal, alat tangkap yang digunakan, serta bahan bakar untuk perahu. Sedangkan dalam prasarana pendukung nelayan dipakai untuk modal membeli es, keranjang ikan, serta perbekalan makan yang dibawa.

Banyak masalah yang dihadapi oleh para nelayan seperti masalah struktural dan kultural. Beberapa faktor yang menjadi permasalahan struktural bagi keluarga nelayan Gebang diantaranya, keterbatasan modal usaha dan teknologi penangkapan. Misalnya, upaya untuk memperoleh hasil tangkapan yang memadai sering terhambat oleh teknologi peralatan tangkap.

Sedangkan yang menjadi masalah kultural seperti, metode penangkapan yang masih bersifat tradisional. Sekalipun alat tangkap yang digunakan tergolong canggih akan tetapi metode pendeteksian pergerakan ikan di dalam laut masih tetap menggunakan cara yang didasari dari pengalaman dan pengetahuan kelautan tradisional. Oleh sebab itu nelayan Gebang masih belum bisa memanfaatkan alat tangkap ikan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal karena metode yang digunakan masih bersifat tradisional.

Disamping itu, penegakan hukum oleh pemerintah terhadap perusakan lingkungan seperti perusakan terumbu karang dan pencemaran laut masih dirasa lemah. Sedangkan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi permasalahan bagi nelayan karena perusakan lingkungan dapat berakibat pada rusaknya ekosistem laut dan berkurangnya jumlah populasi ikan di laut. Faktor lain yang menjadi permasalahan bagi nelayan adalah hubungan kerja dalam kerja dalam organisasi

penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan nelayan dan sistem bagi hasil pemasaran perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara (bakul).

Kemunculan bakul pada awal 1990-an mulanya dipandang sebagai penyelamat ditengah kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga nelayan Gebang akan tetapi kenyataannya berbeda karena terjadinya kesenjangan yang sangat besar antara bakul dan nelayan. Ketidakpuasan nelayan terhadap sistem bagi hasil yang demikian akan bertambah karena jika operasi perahu tidak memperoleh penghasilan, nelayan tidak mendapatkan suatu kompensasi dalam bentuk apapun dari bakul. Jaminan sosial tenaga kerja nelayan juga tidak ada sehingga jika ia sakit harus ditanggung sendiri biaya pengobatannya. Dalam menghadapi ketimpangan tersebut, nelayan tidak dapat berbuat banyak karena tingkat ketergantungan terhadap bakul cukup tinggi. Nelayan menerima kenyataan-kenyataan seperti ini karena dipaksa oleh keadaan dan biasanya terikat pinjaman kontrak kerja dengan bakul.

Kalaupun keluarga nelayan Gebang dapat memperoleh hasil tangkapan yang relatif banyak, seperti pada saat musim ikan, keadaan demikian belum tentu menjamin bahwa nelayan akan memperoleh nilai tukar (uang) yang memadai. Jaringan pemasaran ikan dikuasai sepenuhnya oleh para bakul. Hubungan antara nelayan dan bakul sangat kuat dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Nelayan menjalin hubungan kerja sama dengan bakul untuk mengatasi kesulitan modal usaha dan memasarkan hasil tangkapan yang mudah menurun kualitasnya. Akan tetapi, dalam hubungan kerja sama tersebut nelayan selalu kurang diuntungkan.

Selain menyediakan pinjaman modal usaha kepada para nelayan, tugas utama bakul adalah menyelenggarakan kegiatan pasar secara terus-menerus agar ikan tetap tersedia untuk konsumen dan menyelamatkan harga ikan ketika hasil tangkapan nelayan sedikit atau berlimpah. Keterlibatan bakul dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan nelayan telah menggantikan kedudukan dan peranan organisasi formal, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) Mina. Sebelum koperasi-koperasi tersebut berdiri atau didirikan, bakul telah memainkan peranan ekonomi yang strategis. Oleh karena itu, berdirinya sebuah koperasi formal tidak banyak berpengaruh terhadap pengurangan peranan strategis bakul.

Akibatnya, banyak koperasi nelayan yang ada di Gebang harus gulung tikar karena kalah bersaing dengan bakul.

Di Desa Gebang Mekar kehadiran KUD Mina justru dianggap oleh nelayan sebagai ancaman terhadap dasar-dasar kerja sama nelayan dengan bakul. Karena berbagai kelemahan manajemen, KUD setempat tersingkir dengan sendirinya dan akhirnya tidak berfungsi sama sekali dalam kehidupan sosial-ekonomi keluarga nelayan Desa Gebang Kabupaten Cirebon.

### **3. Tipologi Keluarga Muslim Pesisir Kluwut**

Kluwut salah satu desa Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Secara mata pencaharian, mayoritas keluarganya bekerja sebagai nelayan. Kabupaten Brebes sendiri sebenarnya memiliki beberapa desa nelayan. Namun, dari sekian banyak desa nelayan, Kluwut merupakan desa nelayan terbesar yang ada pada Kabupaten Brebes.

Tipologi keluarga nelayan Kluwut apabila dilihat dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap, maka keluarga nelayan Kluwut dapat dikategorikan kedalam dua kelompok, yaitu kelompok yang memiliki alat-alat produksi sendiri dan kelompok nelayan yang tidak memiliki alat tangkap atau buruh.

Secara umum dalam kehidupan keluarga nelayan Kluwut terdapat corak lapisan sosial ekonomi, mereka yang menempati lapisan sosial atas adalah para pemilik perahu dan pedagang ikan yang sukses, lapisan tengah ditempati oleh juragan laut atau pemimpin awak perahu, lapisan terbawah ditempati oleh nelayan buruh. Mereka yang menempati lapisan bagian atas hanya sebagian kecil dari keluarga nelayan, sedangkan bagian besar warga keluarga nelayan berada pada lapisan bawah.

Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki alat tangkap (perahu atau jaring), sedangkan nelayan buruh adalah mereka yang bekerjanya mengoprasikan alat tangkap bukan miliknya sendiri (menjadi tenaga pada pemilik alat tangkap).<sup>80</sup>

Nelayan buruh yang tinggal di Kluwut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka mengandalkan sumber daya laut yang memiliki berbagai kekayaan laut, mulai dari ikan, kerang-kerangan

---

<sup>80</sup> Wahyono, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta:Mediapressindo, 2001, 57.

(*molusca*), udang kepiting, dan berbagai sumber daya laut lain yang siap untuk dieksploitasi oleh para nelayan.

Tetapi nyatanya masih banyak nelayan buruh yang memanfaatkan sumber daya laut yang berlimpah ini terjatuh dalam lingkaran kemiskinan, tingkat kesejahteraan yang masih rendah, rumah pemukiman nelayan yang kumuh dan non permanen terletak sepanjang garis pantai serta tingkat pendapatan yang rendah. Menurut Kusnadi<sup>81</sup>, kemiskinan dan rendahnya derajat kesejahteraan sosial menimpa sebagian besar nelayan tradisional dan nelayan buruh yang merupakan kelompok sosial terbesar dalam populasi keluarga nelayan, tidak terkecuali nelayan di pesisir Kluwut.

Ada beberapa karakteristik nelayan buruh yang ada di Kluwut, hal ini sebagaimana yang dikatakan Suhana<sup>82</sup>:

- a) Tidak memiliki faktor produksi (kapal dan alat tangkap) dan mengoperasikan alat tangkap yang bukan miliknya.
- b) Bermodal tenaga dalam proses penangkapan ikan.
- c) Bekerja pada pemilik faktor produksi (juragan/bos).
- d) Berpendidikan rendah.
- e) Minim dan tidak memiliki informasi akses pasar.
- f) Terjebak pada lingkaran kemiskinan dan bermukim di desa-desa miskin.
- g) Memiliki ketergantungan ekonomi secara permanen terhadap pemilik modal.

Penghasilan keluarga nelayan di Kluwut sangat bergantung dengan kondisi alam. Ada masa nelayan di Kluwut harus berhenti melaut, karena gelombang terlalu tinggi atau angin yang terlalu kencang. Dalam posisi seperti ini tidak ada pilihan lain bagi nelayan Kluwut kecuali menambatkan perahu mereka. Persoalan akan muncul apabila kondisi tersebut berlangsung terus menerus. Sementara itu dapur nelayan harus tetap dapat mengepulkan asap, untuk mempertahankan hidup keluarga mereka.

Menghadapi elemen resiko yang demikian itu, tidak sedikit nelayan yang merangkap sebagai petani. Di wilayah pesisir Kluwut, pekerjaan rangkap seperti itu dapat dilakukan karena ditunjang oleh kondisi

---

<sup>81</sup> Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LKiS, 2003, 17

<sup>82</sup> Suhana, *Ekonomi Politik Kebijakan Kelautan Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, 2011, 99

ekosistem yang memang memungkinkan, seperti tersedianya areal lahan persawahan di sekitar pantai. Aspek lainnya yang mendorong hal ini adalah karakteristik usaha nelayan yang tergantung kepada musim. Pada musim penangkapan, para nelayan sangat sibuk melaut, sebaliknya pada musim paceklik (ombak besar) kegiatan melaut menjadi berkurang, pada saat ini mereka memanfaatkan untuk bertani. Jadi ada musim tertentu bagi nelayan untuk turun ke sawah dan ada pula bagi mereka untuk kembali melaut.

Pekerjaan rangkap seperti itu merupakan bagian dari pola adaptasi keluarga pesisir Kluwut terhadap kondisi ekosistem yang mereka hadapi. Ketergantungan kepada musim ini semakin besar bagi nelayan kecil yang tidak mampu mengakses terhadap teknologi penangkapan.

Terjadinya pekerjaan rangkap ini, selain menandakan besarnya resiko yang dihadapi nelayan dalam menjamin keberlanjutan nafkah, juga mengindikasikan kecilnya pendapatan dari setiap sumber pendapatan yang dimiliki. Oleh karena itu, sangatlah rasional bagi rumah tangga miskin di perdesaan memiliki pekerjaan yang lebih variatif, sebagai sebuah strategi nafkah yang harus dijalankan.

Berlangsungnya pekerjaan rangkap ini, tidak terlepas dari peranan wanita. Aktivitas ekonomi wanita merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan keluarga strata bawah, tidak terkecuali wanita yang berstatus sebagai istri nelayan. Umumnya selain banyak bergelut dalam urusan domestik rumah tangga, istri nelayan tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi rumah tangga seperti bekerja di sawah, berkebun, beternak, melakukan penangkapan ikan di perairan dangkal, pengolahan ikan, maupun kegiatan jasa dan perdagangan.

Peran wanita ini merupakan faktor penting dalam menstabilkan ekonomi rumah tangga nelayan, karena pria mungkin hanya menangkap ikan pada musim tertentu saja, sementara wanita bekerja sepanjang tahun. Jadi dapat dikemukakan bahwa salah satu strategi adaptasi yang dapat ditempuh rumah tangga nelayan dalam mengatasi kesulitan ekonomi adalah dengan mendorong istri mereka mencari nafkah. Kiprah istri nelayan ternyata tidak hanya sebatas aspek domestik dan ekonomi semata, tetapi juga lebih aktif dari pria dalam menumbuhkan pranata sosial yang penting bagi stabilitas sosial komunitas nelayan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya peranan wanita pada acara pengajian, arisan, serta kegiatan

simpan pinjam yang berperan besar dalam membantu penghasilan nelayan yang tidak pasti.

Dengan demikian, peran sosial dan ekonomi istri nelayan tersebut tidak dapat dipandang kecil dan oleh karena itu, sudah sepatutnya senantiasa dijadikan bahan pertimbangan dalam setiap perencanaan program pembangunan yang ditujukan pada keluarga pesisir. Beragamnya aktivitas ekonomi keluarga pesisir di Kluwut tersebut dapat dilihat dalam jenis komoditi dominan yang telah diusahakan.

#### **4. Tipologi Keluarga Muslim Pesisir Pulolampes**

Secara tipologi, keluarga muslim di Dusun Pulolampes Desa Pulogading tidak berbeda jauh dengan Desa Kluwut, dimana secara mayoritas mata pencaharian keluarganya adalah sebagai nelayan. Begitupun dalam pengelompokan keluarganya nelayannya, terdapat nelayan yang merupakan pemilik kapal, dan kelompok nelayan buruh.

Persamaan tersebut, difaktori salah satunya adalah berada pada wilayah yang sama, yakni Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Namun, terdapat sisi perbedaan diantara keduanya, salah satunya adalah mata pencaharian keluarga muslim Dusun Pulolampes Desa Pulogading yang hanya mengandalkan hasil laut sebagian besar, sedang desa Kluwut disamping mengandalkan hasil laut, juga perdagangan. Sehingga apabila kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk melaut, ataupun cuaca yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan, maka berimbas terhadap penghasilan bagi keluarga nelayan itu sendiri. Hal ini tampak jelas pada desa Kluwut bagian utara.

Hal ini disebabkan karena ketiadaan mata pencaharian sampingan sebagaimana yang dimiliki pada keluarga muslim nelayan di Dusun Pulolampes Maka pada kondisi demikian, kebanyakan keluarga nelayan mengandalkan uang pinjaman dari pengepul ikan. Oleh sebab itu, segala hasil tangkapan yang diperoleh oleh keluarga nelayan disamping digunakan untuk membayar cicilan hutang kepada pengepul, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Imbasnya, secara ekonomi nelayan Dusun Pulolampes Desa Pulogading Bulakamba tidak mampu mensejahterakan keluarga mereka, baik untuk kehidupan sehari-hari mereka, maupun untuk kebutuhan yang lainnya jika hanya mengandalkan itu-itu saja. Karenanya, perlu ada



dampingan dari lembaga keuangan khususnya dan atau keterampilan lain, terutama pada keluarga yang ditinggalkan. Misalnya kemampuan olah ikan basah da kering atau lainnya, sebagai suatu keterampilan khusus.

## **B. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Pesisir di Eretan, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes-Pulogading**

Sebagaimana diketahui bahwa suatu pemberdayaan harus melalui suatu proses, baik proses melalui suatu pendampingan seperti halnya metode *participation action research* (PAR<sup>83</sup>) atau pun lainnya. Dalam penelitian ini, model pemberdayaan pada keluarga muslim masyarakat pesisir pantai utara atau biasa disebut pesisir menggunakan telaah atau analisis eksploratif dengan observasi langsung dan teknik wawancara pada sebagian anggota masyarakat pesisir dengan metode eksploratoris.

### **1. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Nelayan Eretan Kulon Indramayu**

Masyarakat pesisir Jawa, terutama yang ada di Desa Eretan Kuloan mayoritas adalah masyarakat nelayan yang 100 % adalah masyarakat muslim, sehingga dapat dikatakan adalah sebagai masyarakat muslim. Dalam melakukan aktivitas keseharian dalam mencari *ma'isyah* (penghidupan ekonomi) untu keluarga. Mereka adalah para nelayan tangkap, dan tentu ada nelayan buruh, serta nelayan bakul. Sebagaimana dikatakan H. Royani MS., SE., M.M. selaku sekretaris KUD Mina Bahari mengatakan bahwa, dengan peran koperasi Mina Bahari, masyarakat Desa Eretan Kulon yang sebagian besar kepala keluarganya berprofesi sebagai nelayan dapat membantu segala kebutuhan nelayan, bahkan berperan dalam penentuan harga yang ditetapkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sehingga dengan peran aktif KUD Mina Bahari, kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan dapat mengelola penghasilan mereka, tidak

---

<sup>83</sup> Metode untuk melihat pemberdayaan masyarakat desa telah banyak dilakukan dengan menggunakan metode PRA (penilaian pedesaan yang partisipatoris), penilaian pedesaan yang cepat (RRA), PAR (penelitian dilakukan dengan partisipasi langsung) atau belajar dan penilaian partisipatoris (PALM, *Participatory Appraisal Learning Methods*) dst. Lih. Mikkelsen, 2003. *metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 74.

hanya untuk kebutuhan sehari-hari, namun juga untuk masa depan keluarganya.

Masyarakat muslim nelayan di Desa Eretan Kulon yang laki-laki sebagian besar pergi melaut mencari ikan dengan menggunakan kapal besar maupun kapal kecil. Akan tetapi meskipun bapak-bapaknya atau para laki-lakinya melaut, keluarga yang ditinggal di rumah tetap beraktivitas seperti biasa, meskipun bisa ditinggal selama 2 bulan bagi nelayan yang kapalnya berukuran besar ( $\pm$  30 Gross Ton/GT) dan sehari semalam bila kapal hanya berukuran kecil ( $<$  1 GT). Kebanyakan di Desa Eretan Kulon ini kapal berukuran besar, sehingga sekali berlayar bisa sampai 2 bulan. Hal inilah yang oleh Royani dikatakan, *“Meskipun mereka meninggalkan keluarga saat pergi melaut, mereka tidak khawatir karena sebelum mereka pergi melaut/berlayar telah dibekali –melalui koperasi ini uang untuk persediaan belanja keluarga selama 2 bulan. Disamping itu, KUD ini dapat menghindari para tengkulak nakal. Artinya, para tengkulak tidak bisa masuk untuk menalangi para nelayan, baik untuk perbekalan untuk operasional selama  $\pm$  2 bulan di kapal, maupun untuk keluarga yang ditinggalkannya. Jadi, alhamdulillah keberadaan KUD ini dapat banyak membantu masyarakat keluarga muslim nelayan disini”*<sup>84</sup>.

**Gambar 10:**  
Kehadiran KUD dapat membantu keluarga muslim pesisir desa Eretan Kulon untuk bekal keluarga yang ditinggal saat melaut, tanpa Sekertaris KUD, H. Royani saat diwawancarai.



---

<sup>84</sup> Royani, Wawancara 8 Oktober 2018 pukul 11.00 di Kantor KUD Mina Bahari.

Bahkan koperasi KUD Mina Bahari bukan saja memberikan pembiayaan dengan akad bagi hasil, sebagaimana dalam pembiayaan syariah pada umumnya, melainkan para keluarga yang ditinggalkan – terutama par istri atau ibu-ibu, ketika waktu shalat tiba – saat waktu dhuhur berjama'ah di Mushala depan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan samping KUD. Di saat sedang wawancara dan shalat tiba shalat dhuhur, peneliti diminta untuk berhenti dan langsung ikut shalat berjama'ah. Hal ini sangat menarik bagi peneliti, karena saat waktu dhuhur tiba mereka dapat meninggalkan pekerjaannya. Salah satu keluarga yang ditinggalkan berkata, *“Kitae kang ditinggal suami mayang nang laut ya sambilan kerja apa bae (apa saja. pen.) asal halal. Alhamdulillah baka wis waktue adzan dhuhur ya bisa shalat berjama'ah, asale Mushalae parek bari kerjaane (TPI) nang kene”*<sup>85</sup>. Artinya, saya yang ditinggal suami melaut bisa sambil kerja apa saja. Akan tetapi alhamdulillah, shalat berjama'ah bisa ikut di Mushola karena dekat dengan TPI tempat saya kerja. Ini menandakan bahwa disamping mereka beraktivitas keseharian ditinggal para suami melaut, secara spiritualitas tidak terbebani. Bahkan ta'at menjalankan kewajiban agamanya, terutama shalat dhuhur berjama'ah.



---

<sup>85</sup> Sit Tarmah, Wawancara 8 Oktober 2018 pukul 12.30 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Eretan Kulon setelah shalat dhuhur berjama'ah.

### Gambar 11:

Suasana saat shalat dhuhur berjama'ah di Mushala dekat KUD Mina Bahari dan persis depan TPI Desa Eretan Kulon, ibu-ibu dari istri para nelayan keluarga Muslim menjalankan kewajiban agamanya, meskipun mereka juga melaksanakan rutinitas pekerjaan, membantu mencukupi kebutuhan keluarga

Dari pantauan dan penelusuran (observasi) peneliti mengenai kehidupan keluarga Muslim masyarakat nelayan di Pesisir Desa Eretan Kulon ini menemui suatu kehidupan yang religius, meskipun pelesetarian budaya lain pada umumnya di kawasan Pesisir bersifat singkritisme (pencampur adukan pemahaman agama dengan lainnya – budaya lokal). Akan tetapi dari sisi solidaritas dan kemauan untuk menjalankan shalat berjama'ah sangat kuat (antusias tinggi). Hal ini menurut peneliti sangat menarik dan unik, jika dibanding dengan kawasan pesisir lainnya, terutama objek penelitian yang menjadi perhatian peneliti.

Jadi, hemat peneliti ada dua hal penting yang dapat diperoleh pada model pemberdayaan pada keluarga muslim di Desa Eretan Kulon ini, yaitu: **Pertama**, adanya pendampingan pembiayaan yang dilakukan oleh KUD Mina Bahari dapat membantu perbelanjaan keluarga nelayan, baik untuk operasional melaut itu sendiri, maupun keluarga yang ditinggalkannya. **Kedua**, penanaman perilaku keagamaan yang sangat kental dengan 1) menghindari aktivitas *ribawi*, dimana dalam pembiayaan bagi para nelayan menggunakan akad bagi hasil yang itu merupakan inti dari fungsi simpan-pinjam (fungsi lembaga keuangan syariah, LKS) secara syariah, 2) menanamkan rasa kebersyukuran terhadap Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta dengan tingkat kedisiplinan di saat panggilan adzan berkumandang, mereka meninggalkan aktivitasnya dan langsung mengikuti shalat berjama'ah.



**Gambar 12:**

Masyarakat Nelayan Keluarga Muslim Eretan Kulon di Mushala TPI setelah jama'ah shalat dhuhur tampak antusias untuk memulai aktivitas lagi

Menurut salah satu anak keluarga dari keluarga muslim pesisir di Desa Eretan Kulon, Devi saat diwawancara menyatakan, *“Saya sebagai anak keluarga nelayan merasa bahwa pekerjaan orang tua sebagai nelayan tidak khawatir ditinggal, meskipun 2 sampai 3 bulan dan terkadang lebih. Hal ini karena sudah bisa saja sering ditinggalkan. Tetapi saya tidak tergantung hanya dari penghasilan orang tua saja, Saya coba-coba belajar untuk mandiri, yaitu mencoba untuk berdagang secara onlin. Awalnya saya tawarkan kepada teman-teman, teman-teman ibu saya, juga pada saudara. Dan, alhamdulillah sampai saat ini bisa untuk keperluan saya sendiri, dan terkadang bisa bantu orang tua juga”*<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Devi, Wawancara 8 Oktober 2018 Pukul 14.30 di tempat kediaman orang tuanya di Desa Eretan Kulon.



**Gambar 12:**  
Saat wawancara dengan salah satu keluarga anak nelayan Pesisir Utara di Desa Eretan Kulon Indramayu

Dari beberapa kegiatan yang telah dipaparkan di atas, dapat dijelaskan bahwa model pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya keluarga muslim di Desa Eretan Kulon sejatinya adalah taat beribadah, dengan menjalankan ibadah shalat secara berjam'ah dan antusias dalam menjalankan prinsip syariah melalui akad bagi hasil dalam pendampingan pembiayaan di Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari saat mau berlayar sebagai modal usaha (biaya operasional di laut) maupun untuk biaya keluarga yang ditinggalkannya dan tidak lagi mengambil jasa dari tengkulak apalagi rentenir yang biasa terjadi di tempat lain. Modal kepercayaan pada para pengurus koperasi tersebut tercipta dan berjalan sehingga transaksi dapat mencapai rata-rata perbulan 3,5 milyar.

Dengan demikian berdasarkan model pemberdayaan sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, kelihatannya lebih mengarah pada *top down* dan *botton up*. Model pemberdayaan keluarga muslim neyalan di Desa Eretan Kulon bisa langsung diinisiasi oleh pihak pemerintah atau pun swasta/pihak lain melalui berbagai program yang ada. Namun dengan adanya KUD Mina Bahari dapat memerankan lembaga keuangan yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sekaligus sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menyatukan kepentingan masyarakat tersebut.

## 2. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Gebang Mekar Cirebon

Masyarakat nelayan yang ada di Desa Gebang Mekar berdasarkan pengamatan peneliti dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Kelompok *pertama* adalah para nelayan penangkap ikan. *Kedua*, nelayan penggarap tambak, dan *ketiga* nelayan pedagan. Menurut Surip, hampir 90 % penduduk desa Gebang Mekar adalah nelayan penangkap ikan. Menurutnya, “*meraka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap di wilayah tersebut. Walaupun demikian, kondisi kesejahteraan mereka dapat dikatakan buruk karena diakibatkan dari proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif. Nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung ialah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara (bakul). Para bakul inilah yang sesungguhnya menjadi “penguasa ekonomi” di desa-desa nelayan, khususnya di Desa Gebang Mekar*”<sup>87</sup>



**Gambar 13:**  
Saat Wawancara dengan Kuwu Gebang Mekar

---

<sup>87</sup> Surip, Kuwu Desa Gebang Mekar Wawancara 15 Oktober 2018, pukul 14.00 di Balai Desa Gebang Mekar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Desa Gebang Mekar merupakan hasil pemekaran dari Gebang Ilir, sehingga Pak Surip sebagai Kuwu baru menjabat 9 bulan. Desa Gebang Mekar ini terletak di sebelah kiri jalan raya Pasar Gebang Cirebon – Brebes dan menuju utara laut sepanjang sungai luasnya  $\pm$  5 km. Karena itu, penduduknya disamping mayoritas nelayan tangkap ikan, juga ada para pedagang di Pasar Gebang. Sepanjang sungai Gebang Mekar ini dipenuhi dengan kapal dengan ukuran atau bobot 20 – 30 Gross Ton (GT). Bagi para nelayan yang menggunakan kapal besar ini penghasilan bisa mencapai 500 juta per 2 sampai 3 bulan kotor. Sedangkan yang perahu kecil dengan kapasitas kurang dari 1 GT. yang berlayar pagi berangkat sore pulang penghasilannya hanya bisa dapat mencukupi kebutuhan pokok saja.



**Gambar 14:**

Suasana pengambilan ikan langsung dari nelayan tangkap ikan dipinggir sungai, yang mana masing-masing kelompok punya lapak masing-masing, tanpa menggunakan TPI

Dari hasil observasi di lapangan terlihat suasana rame adalah di waktu pagi jam 05.30 sampai sore jam 16.00. Waktu pagi hari nelayan yang berangkat malam akan datang di waktu subuh, sehingga hasil tangkapan ikan dapat dijual secara langsung melalui tengkulak yang sudah siap menerima tangkapan ikan maupun dibawa ke Pasar Gebang. Sementara itu, tangkapan ikan besar dari kapal yang bermuatan lebih dari 20 GT jarang dibawa pulang dan dijual di tempat ini, melainkan berlabuh di Tegal.



Menurut Iprung<sup>88</sup>, bahwa masyarakat desa Gebang Mekar yang berprofesi sebagai pedagang secara umum didagangkan di tempat, meskipun ada juga yang langsung dikirim ke pasar-pasar di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Biasanya, hasil tangkapan ikan laut dari kapal yang bermuatan besar ( $\geq 20$  GT) dapat dikirim ke kota-kota besar dengan menggunakan kendaraan *colt* atau pun truk. Pengiriman ini karena di pasar Jakarta sudah ada penampungnya, dan biasanya memang sudah pesan terlebih dahulu. Adapun yang dijual di pasar lokal (Pasar Gebang) biasanya ikan yang berasal dari kapal kecil.



**Gamar 15:**

Suasana Pasar Gebang Desa Gebang Mekar Yang Menjual Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Masyarakat Muslim

Akan tetapi dari aktivitas kegiatan masyarakat pedagang di Pasar, sebetulnya ada aktivitas lain pada masyarakat nelayan keluarga muslim Gebang Mekar yang sejatinya ini sangat disayangkan oleh Pak Surip. Menurutnya, *“masyarakat nelayan di sini sayang tidak ada kebersamaan terutama dalam jual beli hasil tangkapan ikan. Mereka masing-masing mempunyai bakul, sehingga ketika mereka datang membawa hasil*

---

<sup>88</sup> Iprung, Pedagang ikan di pasar dan pengirim hasil ikan laut Wawancara 11 Oktober 2018 pukul 14.00 di Pasar Gebang

*tangkapan ikan langsung dibeli sama bakul. Padahal, kita punya tempat pelelangan ikan (TPI). Karena, masing-masing punya bakul dan tempat penjualannya sendiri, maka TPI yang telah dibuat oleh pihak desa tidak terpakai alias kosong, meskipun ada beberapa pedagang membuka lapak disitu namun sepi.*”<sup>89</sup>

**Gambar 16:**

Keadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gebang Mekar, kini menjadi Pasar Mina Bahari dan sepi dikarenakan tempat ini tidak lagi berfungsi sebagai TPI, melainkan pasar seperti halnya pasar di jalan raya



Jadi, para bakul atau biasa dikenal dengan sebutan “tengkulak” menjadi andalan dalam “penghidupan” para keluarga muslim nelayan. Karena, biasanya pada saat mau pemberangkatan kapal untuk melaut memutuhkan dana operasional bagi kapal besar bisa mencapai 100 s.d 300 juta sekali jalan selama 2/3 bulan, belum lagi biaya bagi keluarga yang ditinggalkannya. Sementara itu, bagi kapal bermuatan kecil mengalami hal yang sama, sehingga harga ikan tergantung pada kemauan para bakul tersebut. Hal ini disebabkan tidak beroperasinya KUD sebagaimana yang ada di Ereten Kulon.

Kalaupun nelayan Gebang Mekar dapat memperoleh hasil tangkapan yang relatif banyak, seperti pada saat musim ikan, keadaan demikian

---

<sup>89</sup> Surip, Kuwu Desa Gebang Mekar Wawancara 15 Oktober 2018, pukul 14.00 di Balai Desa Gebang Mekar.

belum tentu menjamin bahwa nelayan akan memperoleh nilai tukar (uang) yang memadai. Jaringan pemasaran ikan dikuasai sepenuhnya oleh para bakul. Hubungan antara nelayan dan bakul sangat kuat dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Nelayan menjalin hubungan kerja sama dengan bakul untuk mengatasi kesulitan modal usaha dan memasarkan hasil tangkapan yang mudah menurun kualitasnya. Akan tetapi, dalam hubungan kerja sama tersebut nelayan selalu kurang diuntungkan.

Fungsi bakul dalam hal ini, selain menyediakan pinjaman modal usaha kepada para nelayan, tugas utama bakul adalah menyelenggarakan kegiatan pasar secara terus-menerus agar ikan tetap tersedia untuk konsumen dan menyelamatkan harga ikan ketika hasil tangkapan nelayan sedikit atau berlimpah. Keterlibatan bakul dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan nelayan telah menggantikan kedudukan dan peranan organisasi formal, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) Mina. Sebelum koperasi-koperasi tersebut berdiri atau didirikan, bakul telah memainkan peranan ekonomi yang strategis. Oleh karena itu, berdirinya sebuah koperasi. Akan tetapi keberadaan koperasi ini pun tidak beroperasi secara maksimal ditambah dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak berfungsi menjadikan hasil tangkapan ikan tidak dijual secara bersama, melainkan hampir setiap tempat ada TPI-nya.

Demikian pula, peran pemerintah desa tidak memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Bahkan cenderung keberadaan para nelayan dengan pemerintah desa belum terjalin secara baik. Hal ini terlihat jika ada acara bakti sosial, masyarakat nelayan yang tidak berlayar acuh dan mengabaikan, sementara pihak desa dan lainnya belum secara intensif melakukan pemberdayaan. Karena itu, sebaiknya pemberdayaan keluarga muslim di Gebang Mekar ini perlu diupayakan melalui pendampingan ekonomi usaha Koperasi dan edukasi sosial keagamaan. Menurutnya<sup>90</sup>, keluarga muslim nelayan Gebang Mekar jika diajak untuk kerja bakti kurang antusias, hal ini mungkin dikarenakan kesibukan mereka melaut sedangkan yang ada hanya para ibu-ibu dan anak-anaknya saja. Desa

---

<sup>90</sup> Surip, Kuwu Desa Gebang Mekar Wawancara 15 Oktober 2018, pukul 14.00 di Balai Desa Gebang Mekar.

sering mengadakan kerja bakti, bersih-bersih selokan yang kotor tetapi yang datang sedikit.

Karena itu, model pemberdayaan keluarga muslim nelayan masyarakat Gebang Mekar perlu dorong lebih giat dan intensif baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun desa serta lembaga swasta lain yang peduli akan potensi yang besar tersebut. Bahkan terlihat ada destinasi wisata pantai dalam memanfaatkan tempat wisata meskipun sasarannya adalah wisatawan lokal, disamping menggali potensi pantai dengan menggarap hutan mangrufnya. Hal ini terlihat belum tergarap secara masif dan baik. Karena itu, ada baiknya potensi yang ada di Desa Gebang Mekar perlu disatukan atau integrasikan antara umara, ulama dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya.

### **3. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Nelayan Kluwut Brebes**

Hampir sama dengan Desa Gebang Mekar, Desa Kluwut yang terletak di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes merupakan desa yang masyarakatnya nelayan tangkap dan sebagiannya pedagang. Akan tetapi bedanya adalah bahwa masyarakat desa Kluwut dibagi menjadi dua bagian, yaitu kanan jalan dari arah Cirebon – Brebes mayoritas petani dan kiri jalan mayoritas nelayan tangkap ikan dan pedagang.

Meskipun desa Kluwut tidak dekat dengan bibir pantai seperti halnya Eretan Kulon dan Gebang Mekar, akan tetapi keluarga muslim diblok kiri jalan desa Kluwut ini justru memilih menjadi nelayan tangkap ikan. Namun demikian, sungai yang membentang dari Kluwut sampai Desa Grinting memang kurang lebih panjangnya adalah 10 km dimulai dari desa Kluwut, sehingga mereka karena dekat dengan sungai mata pencaharian melaut menjadi pilihan.

Berdasarkan wawancara dengan Ansori, Kepala Desa Kluwut berujar, *“berhubung desa kami unik dimana sebelah kanan jalan dari arah Cirebon mayoritas berpenghasilan petani dan jauh sampai rel kereta api, sedangkan sebelah kiri adalah nelayan, petani dan pedagang serta berpenduduk padat, terkadang permasalahan seringkali muncul. Misalnya:*

- a. Prosedur pembuatan surat kapal (semacam STNK bagi kapal) rumit Sebagaimana STNK pada kendaraan darat, kendaraan laut juga harus disertai dengan surat-surat identitas. Dan terdapat sekitar 12 surat*

*untuk sebuah kapal yang memiliki masa berlaku yang berbeda-beda sehingga menyulitkan para nelayan untuk beroperasi. Para nelayan berharap, pembuatan dan keberlakuan keduabelas surat itu dapat dilakukan secara bersamaan, sebab keberlakuan yang berbeda membuat kesulitan prosedur dan tentu menghambat operasional kapal dalam mencari ikan.*

- b. Pendangkalan sungai Kluwut Pendangkalan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan belum ada tindakan efektif dari pemerintah. Pendangkalan mengakibatkan sulitnya akses kapal dari sungai (TPI) ke muara (laut), dan mengakibatkan kapal membutuhkan waktu sehari-hari untuk menuju ke laut atau sebaliknya.*
- c. Akses penjualan hasil laut ke Tegal yang jauh Pemerintah Kota Tegal enggan menerima masuknya kapal-kapal dari Brebes disebabkan meningkatnya jumlah nelayan local (dari Tegal sendiri). Terkait dengan dinamika kedua, kesulitan akses ke Tegal dan kesulitan akses masuk ke Pusat Pendaratan Ikan di Kluwut karena pendangkalan menjadi masalah serius dan perlu menjadi perhatian”<sup>91</sup>.*



**Gambar 17:**  
Wawancara dengan Kepala Desa Kluwut di Kantornya

---

<sup>91</sup> Ansori, sebagai Kepala Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kab. Brebes Wawancara pada hari Senin, 5 November 2018 di kantor desa.

Desa Kluwut juga dikenal dengan para pedagangannya, dimana mereka bukan saja pedagang ikan melainkan pedagang apa saja. Akan tetapi dari penghasilan nelayan dapat mensejahterakan ekonomi keluarga. Menurut Zamroni, *“alhamdulillah mas penghasilane nyong sampai bisa 20 juta perkali datang, dadine bisa nggo bangun umah. Awale sih, ketika kanggo perahu cilik ya pas-pasan bae, tapi saiki dipercaya karo majikan gawa kapal gede (20 GT), kadie bisa sekali jalan 2 s.d 3 bulan. Memang perbekalan bisa larang, 400 jutaan luwih, tapi balik bisa sampai 1 milyar”*<sup>92</sup> (Alhamdulillah mas penghasilan saya bisa sampai 20/bln, sehingga bisa buat rumah yang bagus. Karena awalnya dipercaya sama bos untuk bawa kapal besar muatan sampai 20 GT, meskipun di laut bisa sampai 2 s.d 3 bulan. Penghasilan ini karena mahal biaya operasioanal sampai 400 juta-an, tetapi bisa pulang membawa hasil 1 milyar).

Berbeda dengan Zamburi, Kusnadi saudara tua dari Zamroni menjelaskan, *“awit cilik aku diajak karo bapane wayang (melaut), tapi peruhe cilik, kadang esuk mangkat balik sore ato mangkat bengi balik esuk. Nggal dina. Penghasilan pas-pas an sampe saiki, meskipun saiki wis akeh perahu gede. Mungkin nasibe aku karo adine aku beda. Ari penghasilane adine aku akeh, bisa nggo gawe umah sing apik, lamom kita cukupan bae. Tapi alhamdulillah sing awet cilik, mandiri sampai bapane sa iki wis bli mayang maning”*<sup>93</sup> (saat kecil saya selalu diajak oleh ayah untuk ikut melaut, meskipun menggunakan perahu kecil. Berangkat pagi, maka pulang sore dan sebaliknya berangkat malam, pulang pagi setiap hari. Penghasilan yang didapat cukup buat keluarga dan buat rumah, beda dengan adik saya yang menggunakan perahu besar jadi penghasilan besar. Tetapi alhamdulillah dari sejak kecil sampai dewasa bisa hidup mandiri, sampai ayah saya tidak menjadi nelayan lagi).

Selain Zamroni dan Kusandi yang sejak kecil sebagai nelayan tangkap ikan, tentu masih banyak lagi keluarga muslim lainnya yang satu profesi dengan mereka. Namun demikian, tipologi nelayan keluarga muslim desa Kluwut bisa berbaur dengan masyarakat lain yang berprofesi sebagai petani maupun pedagang. Mereka bersatu, guyub dan

---

<sup>92</sup> Zamroni, Kapten Kapal Besar Wawancara, 5 November 2018 di rumahnya.

<sup>93</sup> Kusnadi, nelayan tangkap ikan Wawancara 5 November 2018 pukul 10.00 Wib dirumahnya, saat tidak melaut.

solidaritasnya cukup tinggi, khususnya ketika ada acara sedekah laut dan sedekah bumi. Begitu pun, ketika ada hari-hari besar Islam utamanya karena kelompok organisasi NU, terutama muslimahnya aktif. Demikian pula pemuda Muhammadiyah dan PCM aktif mengadakan pengajian bulanan.

Menurut Bapak Nawir, *“saiki tah kepenak, gemiyen sih kangelan waktu zamane nyong esih sering mayang/miyang. Saiki nyong wis bli mangkat, soale anak-anake nyong wis ganteni. Nyong alhamdulillah saiki dipercaya karo desa dadi kunci kuburan, karo imam tahlilan ya itung-itung nggo kerjaane nyong, dadine ya setitik-setitik oleh nggo mangan”*<sup>94</sup>. (Sekarang lebih mudah dibanding zaman dulu saya ketika masih aktif melaut. Sekrang saya sudah tidak lagi menjadi nelayan karena anak-anak saya sudah menjadi pengganti. Sekarang alhamdulillah dipercaya oleh pihak desa untuk jadi kunci kuburan dan biasanya diminta untuk jadi imam tahlilan di masyarakat).

Berdasarkan wawancara di atas, hemat peneliti keadaan kapal kecil yang dulu mendominasi para nelayan di Kluwut yang sebagian besar adalah dari keluarga muslim. Kini, berubah menjadi kapal besar yang bertonase sampai 30 GT. Perubahan kapal kecil menjadi kapal besar tentu sangat berpengaruh pada penghasilan dan pendapatan para nelayan. Meskipun demikian, kendala yang dihadapi adalah penjualan ikan besar tidak bisa bersandar di desa sendiri, melainkan harus berlabuh di Tegal. Hal ini tentu secara tindak langsung merugikan pendapatan desa Kluwut itu sendiri. Hal ini dikarenakan sering terjadinya pendangkalan di sungai.

Demikian pula masalah sampah, seringkali menjadi problem bagi masyarakat nelayan karena pemukiman yang padat dan sampah-sampah yang disungai menjadikan lahan pembuangan sampah kurang memadai. Dari permasalahan tersebut di atas, model pemberdayaan masyarakat nelayan muslim di Desa Kluwut yang perlu dilakukan adalah; 1) perlu pendampingan dalam pembuatan surat kelayakan melaut agar cepat keluar dan akses mudah, 2) pengerukan kembali sungai Kluwut yang membentang sejauh  $\pm 10$  km hingga ke Desa Grinting sehingga kapal-kapal besar yang bertonase  $> 30$  GT bisa masuk dan menjual ikannya di

---

<sup>94</sup> Munawari, sebagai mantan nelayan penangkap ikan sekarang sebagai juru kunci kuburan dan imam tahlilan, Wawancara 5 November 2018 pukul 09.00 di rumahnya.

TPI sendiri, 3) pengaktifan kembali lembaga keuangan, seperti KUD untuk pendampingan pembiayaan operasional dan keluarga yang ditinggalkan.

#### 4. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Nelayan Pulolampes-Pulogading

Sama halnya dengan desa Gebang Mekar dan Eretan Kulon, Dusun Pulolampes yang berada di Desa Pulogading Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes adalah dusun yang terletak di utara Brebes. Dusun ini hampir mayoritas keluarga muslimnya berprofesi sebagai nelayan, baik nelayan tradisional maupun manual. Menurut Sugeng Riyadi, *“Pulolampes merupakan salah satu dusun yang ada di desa Pulogading. Pencapaian mereka kebanyakan nelayan, meskipun ada juga yang nelayan penggarap tambak. Kebanyakan malah tambak punya orang luar, terutama orang Grinting. Dan, alhamdulillah desa kami pernah dikunjungi oleh pemerintah daerah guna mensurvei lokasi untuk dijadikan pelabuhan. Akan tetapi karena sering pendangkalan sehingga belum dapat terlaksana sampai sekarang.”*<sup>95</sup>



**Gambar 18:** Kondisi tempat parkir kendaraan nelayan saat kapal bersandar, yang awalnya akan dibangun pelabuhan di sini, tetapi karena pendangkalan terlalu sering sehingga belum terlaksana sampai saat ini.

---

<sup>95</sup> Sugeng Riyadi, selaku Sekretaris Desa Pulogading Wawancara 12 November 2018 pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor Desa



Dusun Pulolampes Desa Pulogading merupakan masyarakat yang mayoritas muslim (100 %), penerangan jalan dan jalan desa serta gang-gangnya telah rapih dibangun. Karena pemda Kabupaten Brebes sering mengunjungi desa ini dikarenakan sangat potensial. Pembangunan masjid dan mushola serta pendidikan keagamaan (MI dan RA) ada, meskipun bukan terletak di Dusun Pulolampes. Akan tetapi akses jalan cukup baik, meskipun seperempat dari wilayah dusun Pulolampes ini adalah tambak, dan sungai hanya mempunyai luas 500 m. Akan tetapi cukup untuk menyandarkan kapal-kapal nelayan, baik yang bertonase 12 GT, sampai yang kecil.



**Gambar 19:**  
Kapal ber-Tonase 12 GT akan bersandar untuk menurunkan Ikan hasil tangkapan

Berbeda dengan nelayan Kluwut dan Gebang Mekar, yang hasil tangkapan ikan sebagian besarnya di jual di Tegal, Nelayan Dusun Pulolampes Deas Pulogading seluruh ikan yang dihasilkan dapat dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di sini, karena kapal hanya bertonase 12 GT, sampai dengan yang kecil, sehingga bisa ditampung tanpa harus ke Tegal. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi desa setempat. Hasil tangkapan ikan langsung dibawa ke tempat pelelangan ikan yang ada (TPI), dan tentu sudah menunggu para bakuk (tengkulak).

Untuk masalah tengkulan/bakul kelihatannya hampir sama dengan permasalahan yang ada di nelayan Gebang Mekar, dan nelayan desa Kluwut. Dimana, tengkulan/bakul akan membeli hasil tangkapan ikan nelayan secara langsung.



**Gambar 20:**

Bakul sedang transaksi dengan nelayan saat ikan baru datang

Menurut Sartono<sup>96</sup> bahwa ikan-ikan yang berasal dari nelayan akan langsung terbeli oleh bakul yang sudah siap di tempat (TPI). Biasanya kapal akan datang bersandar sekira jam 16.00 an. Para nelayan telah siap membawa keranjangnya untuk di bawa ke TPI dan langsung dibeli oleh bakul. Akan tetapi bisa saja selain bakul bisa beli langsung kepada nelayan, bisa milih ikan besar apa ikan kecil. Aktivitas ini berlangsung setiap hari.

Pada observasi peneliti di lapangan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dusun Pulolampes tidak seramai dan sesibuk apa yang ada di TPI Desa Ereten Kulon, Gebang Mekar dan Kluwut, karena kurangnya kapal-kapal nelayan, akan tetapi beberapa ibu-ibu baik sebagai bakul maupun lainnya telah lama menunggu kedatangan para nelayan tiba di lokasi. Hal ini

---

<sup>96</sup> Sartono, bakul ikan yang membeli hasil tangkapan dari nelayan langsung Wawancara 12 November 2018 Pukul 16.00 WIB di TPI

berlangsung setiap hari. Dalam hal pemasaran pun ternyata tidak hanya ditempat TPI saja, melainkan ada yang dimasukan ke dalam box besar untuk dikirim ke Jakarta.



**Gambar 21:**

Suasana tempat pelelangan ikan (TPI) nampak rame di Dusun Pulolampes Desa Pulogading

Dari kegiatan yang berlangsung di TPI Dusun Pulolampes Desa Pulogading ini kesejahteraan nelayan masyarakatnya terpenuhi. Keluarga muslim nelayan beranjak dari perekonomian prasejahtera menjadi sejahtera. Hal ini dilihat dari misalnya, kapal atau perahu yang digunakannya. Kebanyakan nelayan ini menggunakan perahu besar dengan tonase rata-rata 5 – 15 GT. Disamping itu, keseharian ibu-ibu yang ditinggal di rumah sering kali mengolah ikan basah menjadi ikan kering (ikan digesek). Menurut Tambah, *“Masyarakat nelayan Dusun Pulolampes Desa Pulogading disamping sebagai nelayan juga ada yang menjadi pengerajin ikan petek/gesek (ikan kecil yang dikeringkan) untuk*

*makanan sehari-hari. Terkadang ikan gresik ini bisa dijual pada bakul atau masyarakat sekitar. Akan tetapi lebih banyak dikonsumsi sendiri”<sup>97</sup>*

**Gambar 22:**

Saat  
meawancari  
salah satu  
pemilik  
kapal/perahu di  
TPI Dusun  
Pulolampes  
Desa  
Pulogading



Dari suasana dan kegiatan para nelayan tersebut di atas, permasalahan yang ditemui adalah adanya perhatian pemerintah desa kepada keluarga muslim yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Pulogading-Pulolampes masih sangat kurang menyentuh. Misalnya, penyuluhan dari dinas terkait (Dinas Peternakan dan Perikanan atau lembaga lainnya) kurang intensif. Demikian pula lembaga pendampingan pembiayaan dalam rangka untuk membantu kebutuhan biaya operasional dan biaya rumah tangga yang ditinggalkan. Ketidak berjalannya koperasi merupakan salah satu indikator dari permasalahan tersebut.

Hal ini sebagaimana hasil survey penulis ke lokasi penelitian, meskipun ada Koperasi Unit Desa (KUD) “Mina Saya Sari”, namun belum beroperasi secara maksimal sehingga belum mampu menjembatani antara nelayan dengan bakul. Apalagi di pihak nelayan terdapat dua kateogi, yaitu: 1) nelayan dengan kapal ukuran besar muatannya + 5 – 15 GT (Gross Ton), dan 2) nelayan dengan kapal kecil < 5 GT, sehingga bisa berimbang pada adanya penentuan harga yang dikuasai sepenuhnya oleh bakul 10. Tentunya hal tersebut merugikan pihak nelayan itu sendiri, terutama pada pihak nelayan yang ukuran kapalnya kecil.

---

<sup>97</sup> Tambah, selaku pemilik Kapal/Perahu Wawancara 12 November 2018 pukul 16.00 WIB di TPI



**Gambar 23:**  
Papan KUD ada dan tempat layak, akan tetapi tidak beroperasi secara kontinyu berakibat pada tidak efektifnya keberadaan KUD

Dengan tidak beroperasinya secara efektif dan kurang berjalan dengan baik, maka berakibat pada pembiayaan yang tidak ditangani dengan baik. Para bakul itulah yang menggantikan pendampingan pembiayaan. Meskipun nelayan yang kapal besar pun tidak dapat dilepas dari jeratan bakul juga. Oleh sebab itu, diperlukan peran pemerintah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan setempat melalui program-program pemberdayaan yang dapat menunjang dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, khususnya kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi. Matinya KUD “Mina Saya Sari” perlu dihidupkan lagi dan diupayakan ada pendampingan dan edukasi dari KUD yang sudah mapan. Karena itu, pemerintah desa dan daerah supaya memberikan perhatian pada daerah-daerah potensial, seperti PuloGading-Pulolampes ini, karena disamping mayoritas masyarakat muslim nelayan juga sebagai petani tambak dan pengolah ikan gresik (kering).



## **BAB V**

### **EPILOG**

#### **A. Simpulan**

Dari beberapa penjelasan dan uraian pada bab-bab tersebut di atas, maka dapat apa yang dmenjadi tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tipologi masyarakat keluarga muslim pesisir pantai utara (PANTURA) Jawa ada dua, yaitu; a. tipologi nelayan tangkap ikan dan pengolahanya, dan b) tipologi nelayan pedagang (bakul). Tipologi nelayan tangkap ikan terdiri dari dua karakteristik, yaitu 1) nelayan yang bertugas sebagai anak buah kapal (ABK) dan nelayan sebagai nahkoda (supir perahu), dan 2) nelayan sebagai pemilik kapal/perahu (juragan). Sedangkan tipologi nelayan sebagai pedagang terkadang, mereka sebagai pedangan atau bakul, dan penggarap tambak. Tipologi pertama dan kedua nampak pada keluarga muslim pesisir Eretan Kulon, Gebang Mekar, Kluwut dan Kluwut yang memang sejak dulu menjadi mata pencahariannya. Jadi, tipologi masyarakat nelayan pesisir Jawa seperti Indramayu, Cirebon, dan Brebes kecenderungan masyarakat tipe masyarakat nelayan sebagai pokok pencahariannya dan tipe masyarakat yang berpola pemukiman padat penduduk (berkerumun/kumpul) dan tradisional dari sisi gaya hidupnya.
2. Pemberdayaan keluarga muslim nelayan di Pesisir Pantari Utara (PANTURA) Jawa lebih terlihat pada model *top-down* dibanding dengan *botton-up*. Model pemberdayaan *top-down* berarti pemberdayaan yang inisiatip datang dari pemerintah daerah atau desa setempat atau lembaga lain yang peduli pada kehidupan masyarakat muslim pesisir. Sementara itu, model pendampingan *botton-up* lebih menekankan pada pemberdayaan yang muncul kreativitas dari masyarakat nelayan itu sendiri. Karakteristik keluarga nelayan yang keseharian melaut, tentu untuk memunculkan ide dan gagasan dalam rangka memberdayakan ligkungan sendiri tidak mungkin muncul bila tidak ada bantuan dari pihak lain. Karena itu, di Eretan Kulon Kabupaten Indramayu, meskipun model pemberdayaan bersifat *botton-up*, tetapi ada hal yang menarik dimana peran Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari lebih aktif dalam peransertanya mendampingi

masyarakat nelayan. Berbeda, dengan Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes justru peran KUD yang ada tidak efektif.

## **B. Rekomendasi**

1. Perlu adanya perhatian dan penyuluhan dari pihak pemerintah baik tingkat pusat, propinsi atau daerah agar para nelayan bisa trampil dan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tata cara penangkapan ikan dan pengolahannya. Hal ini agar hasil tangkapan ikan dapat bernilai ekspor.
2. Lembaga pendampingan baik berupa KUD atau pun lainnya bisa efektif dan memberikan dampingan baik secara finansial maupun lainnya agar dapat menyelesaikan kebutuhan keluarga baik yang ditinggalkan saat melaut sampai biaya operasionalnya.
3. Disaat para nelayan sedang tidak melaut, sebaiknya pihak-pihak terkait untuk memberikan pelatihan-pelatihan ataupun penyuluhan agar mereka mempunyai keterampilan yang memadai, serta para keluarganya pun ikut diberi pelatihan bagaimana cara pengolahan ikan dan seterusnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badiri, Lili, et. al 2005. *Zakat & Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri.
- Badudu dan Zain, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasan, A. Rifa'i, dan Achmad, Amrullah (Peny.), 1987. *Perspektif Islam dalam Pembanguna Bangsa*. PLP2M, Yogyakarta.
- Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives- vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumardi, 1984. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Berkah Pustaka.
- Siswijono, Suprih Bambang dan Wisadirana, Darsono, 2008. *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Agritek YPN, Malang.
- Sulistiyani, A.T., 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Suhendi, et.all., 2014. *Pemberdayaan Komunitas Pemulung Sampah Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama berbasis Eco-Preneur di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Karangrejo Kota Meteor*. Laporan Penelitian, STAIN Metro.
- Sudjana, 2004. *Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Dharma Karsa Utama.
- Syatori, A. 2014. *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon*. Diterbitkan pada Jurnal Holistik Volume 15 Nomor 02, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Theresia, Aprillia, et.al., 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Taufik, 2013. *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*.

Diterbitkan pada Governmet: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 1, Januari.

Widjajanti, Kesi, 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Diterbitkan dalam Jurnal Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011.

Hasil Wawancara dengan Surip, Kepala Desa Gebang Mekar.

Hasil Wawancara dengan Ansori, Kepala Desa Kluwut.

Hasil Wawancara dengan Sugeng Supriyadi, Sekretaris Desa Pulogading-Pulolampes.

Hasil Wawancara dengan Royani Sadra, Serktearis KUD Bahari Desa Eretan Kulon.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

---

Lampiran 1:

---

## **PHOTO-PHOTO KEGIATAN PENELITIAN**

Pemberdayaan Keluarga Muslim Pesisir Pantai Jawa:  
Model dan Tipologi Masyarakat Ereten Kulon,  
Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes

---



Kunjungan awal Penelitian ke Desa Eretan Kulon dalam rangka survei mencari data Keluarga Muslim Pesisir Utara Indramayu



Pak Royani, salah seorang informan kunci pemberdaya keluarga muslim nelayan pesisir Eretan Kulon. Ia sebagai motivator dan sekaligus sekretaris KUD Mina Bahari Eretan Kulon Indramayu



Ibu Devi, salah seorang informan kunci keluarga muslim Eretan Kulon



Suasana keluarga muslim nelayan pesisir utara desa Eretan Kulon saat adzan berkumandang langsung ke Musholla shalat dhuhur berjama'ah dekat KUD Mina Bahari samping TPI (Tempat Pelelangan Ikan)



Pak Alex, salah seorang informan key keluarga muslim pesisir



Pak Sodikin (Anggota Tim) sedang menyaksikan aktivitas keluarga muslim nelayan Eretan Kulon dsiang hari saat para nelayan sedang mempersiapkan jaring untuk berlayan menangkap ikan



Pak Rana (Anggota Tim), selesai shalat dhuhur berjamalah mewawancarai salah satu kepala keluarga muslim nelayan Eretan Kulon di Mushalat At-Taqwa samping KUD Mina Bahari



Salah satu kapal/perahu beraya tampung  $\geq 23$ -30 GT (Gross Tone) sedang bersandar di sungai Eretan Kulon persiapan untuk berlayar



Tim peneliti saat memasuki Desa Gebang Mekar untuk menuju ke Balai Desa memulai penelitian



Tim peneliti (Aziz, Sodikin, Rana) sampai di Balai Desa Gebang Mekar untuk mewawancarai Kuwu (informan key





Aziz dan Sodikin (Ketua Tim dan Anggota) sedang wawancara dengan Pak Surip Kuwu Gebang Mekar menggali informasi keluarga muslim pesisir



Abdul Aziz (Ketua Tim) sedang berdialog dalam *focus group discossuin (FGD)* bersama stakeholder dan keluarga muslim nelayan di Gebang Mekar untuk mendiskusikan topik-topik pemberdayaan masyarakat muslim nelayan pesisir, anggota tim aktif merekam jalannya diaolog



Salah satu ibu-ibu nelayan keluarga muslim Gebang Mekar sedang menjajakan dagangan ikan hasil tangkap dipinggir jalan samping sungai Gebang



Nampak perahu-perahu/kapal nelayan (milik keluarga muslim) Gebang Mekar bersandar setelah berlayar dan menunggu waktu untuk berlayar kembali



Nampak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gebang Mekar yang tidak berfungsi dengan baik, karena pelelangan ikan berada pada masing-masing kelompok dan disebabkan tidak berfungsinya KUD sebagai penyatu keluarga muslim nelayan Gebang Mekar



Tidak berfungsinya TPI Gebang Mekar, dialihfungsikan sebagai Pasar Mina Bahari tampak ibu-ibu rumah tangga muslim pesisir sedang jualan bahan pokok bukan jualan ikan, karena pedagang ikan sudah masing-masing kelompok dijalan



Pak Karyo, salah seorang nelayan keluarga muslim dan istrinya sedang menjajakan ikan dagangannya di jalan (saat Tim mensurvei) setelah pulang dari tangkap ikan



Disebelahnya tampak pedagang lain, milik keluarga muslim nelayan pesisir Gebang Mekar. Terlihat seadanya dengan menggunakan bahu jalan dan disampingnya sung



Aziz dan Sodikin (Ketua Tim dan Anggota) sedang wawancara dengan Pak Ansori Kepala Desa Kluwut untuk menggali informasi keluarga muslim pesisir



Aziz dan Sodikin (Ketua Tim dan Anggota) sedang wawancara dengan Pak Ansori Kepala Desa Kluwut untuk menggali informasi keluarga muslim pesisir



Aziz (Ketua Tim) sedang wawancara dengan Pak Munawir menggali informasi keluarga muslim pesisir di Desa Kluwut



Aziz (Ketua Tim) sedang wawancara dengan Pak Kusnadi menggali informasi keluarga muslim pesisir di Desa Kluwut



Aziz (Ketua Tim) sedang mengadakan Focuk Group Disuccion (FGD) dengan para keluarga muslim pesisir di Desa Kluwut tempat di Tambak Pesisir Desa Kluwut Grinting



Tampak pembuatan perahu/kapal besar dengan kapasistas  $\geq 18$  GT Di Desa Kluwut



Nampak KUD Mina Saya Sari di Dusun Pulolampes Desa Pulogading tidak efektif (tidak jalan), saat suvey Tim Peneliti hanya melihat papan nama saja tanpa ada aktivitas



Aktivitas masyarakat muslim nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI) Dusun Pulolampes Desa Pulogading tampak terjadi transaksi pasca tiba nelayan





Aziz (Ketua Tim) sedang wawancara sekaligus menyaksikan ibu keluarga dari nelayan dan bakul sedang transaksi Di TPI Dusun Pulolampes Pulogading



Aziz (Ketua Tim) sedang wawancara sekaligus menyaksikan Bapak-bapak dari nelayan dan pemilik kapal sedang transaksi Di TPI Dusun Pulolampes Pulogading



Saat kapal sudah siap untuk berlayar, para anak buah kapal (APK) siap untuk berlayar penangkapan ikan



Aziz (Ketua Tim) sedang wawancara pada salah satu anak buah kapal (ABK) saat sedang bongkar muatan kapal untuk dijual di TPI Ds Pulolampes Desa Pulogading

**Lampiran 2:**

---

**PANDUAN TEKNIK OBSERVASI**  
**Untuk Tim Peneliti & Pengumpul Data**

Judul Penelitian:

**PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR PANTAI JAWA**  
Model dan Tipologi Desa Eretan Kulon, Desa Gebang Mekar,  
Desa Kluwut dan Desa Pulolampes

---

## **Teknik 1:**

# **DISKUSI KELOMPOK TERARAH FOCUS GROUP DISUSSION (FGD) GUIDE**

*Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terarah adalah media bagi sekelompok orang untuk mendiskusikan satu topik tertentu secara relatif mendalam. Diskusi kelompok terarah berbeda dengan diskusi kelompok informal setidaknya karena topik dan alur diskusinya.

Diskusi kelompok terarah difokuskan untuk membicarakan satu topik secara mendalam. Sedangkan alur proses pembicaraan dalam diskusi kelompok dipandu oleh fasilitator dan pernyataan serta pembicaraan yang berlangsung ditulis (direkam) secara cermat.

Di dalam penelitian ini, diskusi kelompok terarah ini dilakukan pada semua tahapan penelitian, baik awal penelitian, pelaksanaan, maupun saat monitoring dan evaluasi penelitian, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan proses penelitian.

Sebelum surey, FGD ini juga dilakukan untuk mendapatkan masukan lebih dalam lagi mengenai tujuan survei yang mencakup masalah dan kebutuhan yang akan disurvei. Masukan dalam diskusi ini kemudian menjadi bahan untuk menjabarkan tujuan dan menyusun instrumen survei yang telah disusun sebelumnya.

## **Yang Perlu Diperhatikan dalam FGD:**

### **1. Peserta Diskusi**

Jumlah peserta diskusi sebaiknya sedikit saja untuk menciptakan suasana akrab dan memungkinkan setiap peserta berbicara bergiliran. Tetapi jumlah peserta juga harus cukup untuk menghasilkan diskusi yang dapat dianggap mewakili pandangan dari berbagai golongan.

Oleh karena itu, jumlah peserta antara 5 – 12 diperkirakan cukup untuk menghidupkan diskusi dan sekaligus cukup akrab untuk mendorong setiap

peserta berbicara. FGD ini dilaksanakan bersama masyarakat dampingan, juga dalam kondisi tertentu secara kolaboratif dilakukan bersama stakeholder terkait.

## 2. Fasilitator –Juru catat (Notulen)

Peran fasilitator sebagai pemandu diskusi sangat menentukan lancarannya proses diskusi, sehingga keterampilan fasilitator untuk memandu kelompok menjadi hal yang penting. Salah satu syarat yang tidak dapat ditawar adalah: fasilitator harus orang yang senang bekerja dalam kelompok dan menikmati berbicara dengan kelompok. Kadang kala proses diskusi berjalan lancara atau sulit dikendalikan.

Agar proses FGD dapat berlajan dengan baik perlu adanya suatu pembagian tugas di antara dua orang fasilitator, yaitu seseorang bertindak dalam kapasitas rutin sebagai fasilitator, dan fasilitator kedua bertindak sebagai juru catat (perekam proses FGD).

Setiap diskusi sebaiknya didokumentasikan lengkap, baik tertulis maupun menggunakan alat rekaman. Notulen bertanggung jawab untuk menuliskan secara rinci diskusi dan suasana sekelompok.

## 3. Menentukan tujuan dan topik FGD

Berbeda dengan survei atau interview yang mengajukan banyak pertanyaan untuk mendapatkan gambaran satu topik dengan luas, diskusi kelompok terarah sebaiknya hanya menentukan satu topik utama untuk didiskusikan dengan detail.


Oleh karena itu kiat harus dengan jelas menentukan terlebih dahulu aspek-aspek apa saja yang perlu diangkat dan dibahas rinci dalam diskusi. Untuk memperjelas semua itu, tuliskan terlebih dahulu 2-3 tujuan utama yang ingin kiai peroleh untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Berdasarkan tujuan itulah, dalam FGD akan ditentukan topik-topik yang akan dibicarakan.

#### 4. Pengaturan Tempat Duduk

Dalam FGD dimana para peserta harus saling berkomunikasi dan bekerjasama satu dengan yang lainnya, pengaturan tempat duduk dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat pada dinamika kelompok. Pengaturan tempat duduk dapat mempengaruhi siapa berbicara kepada siapa dan siapa yang seperti mendominasi aktivitas-aktivitas diskusi.

### **Langkah-langkah FGD:**

1. Datanglah lebih awal dari jadwal yang telah disepakati. Hindarilah kebiasaan untuk datang terlambat. Gunakan waktu yang ada untuk memeriksa berbagai persiapan antara lain pengaturan ruangan, alat tulis menulis (metaplan, plano, lakban, dll), alat peraga, alat-alat untuk peserta dan lain sebagainya.
2. Pastikan bahwa agenda pembahasan sangat jelas dalam benak kita. Hal ini untuk menghindari danya kebingungan ketiak FGD dimulai.
3. Di awal proses fasilitator memberikan pengantar, dan menjelaskan tujuan dan fokus diskusi yang akan dilakukan.
4. Pada awal diskusi fasilitator memulai dengan memberikan pertanyaan yang bersifat umum untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas dan membuat peserta merasa nyaman.  
Pertanyaan “terbuka” dapat digunakan untuk mendorong peserta untuk menjawab dan mengeluarkan pendapat dalam bahasanya masing-masing. Selanjutnya, setelah sasaran “mencari”, fasilitator dapat mulai melontarkan pertanyaan yang telbahi mendalam pada akhir diskusi.
5. Eksplorasi pendapat dan masukan dari peserta diskusi, dapat digali secara lisan atau juga dapat dilakukan secara tertulis. Untuk eskplorasi pendapat secara tertulis fsilitartor dapat melakukannya melalui cara:

 Setiap diskusi didokumentasikan lengkap oleh juru catat atau notulen, baik tgetulis maupun menggunakan alat rekaman. Notulen bertanggungjawab untuk menuliskan secara rinci diskusi dan suasana kelompok. Biasanya notulen duduk di luar lingkaran peserta, sehingga tidak menggnanggu jalannya diskusi. Tetapi notulen harus dapat mengamati ekspresi tiap peserta.

- 📖 Diakhir proses, fasilitator mengarahkan diskusi untuk mencari kesimpulan. Kesimpulan diskusi ditulis di kertas plano yang telah disediakan.
- 📖 Diluar proses diskusi, untuk kepentingan penelitian team peneliti melakukan proses terakhir yaitu analisis dan menulis laporan hasil diskusi. Analisis dapat dilakukan dengan cara:
  - ✍ Mengelompokkan setiap jawaban berdasarkan pertanyaan fasilitator. Dengan menuliskan setiap jawaban di bawah pertanyaan, kita dapat mengetahui berbagai pendapat dan reaksi setiap peserta terhadap suatu topik atau pertanyaan yang dilontarkan.
  - ✍ Menandai hal yang penting dalam catatan atau transkrip.

Berdasarkan data tersebut, kita dapat menuliskan semacam kesimpulan mengenai pendapat dan reaksi peserta terhadap topik yang didiskusikan. Sebaiknya dalam laporan diperhatikan beberapa hal seperti:

- ✍ Tulislah laporan secara singkat kira-kira 1 atau 5 halaman saja.
- ✍ memberikan gambaran mengenai waktu, tempat, topik, dan peserta diskusi.
- ✍ Menulis kesimpulan mengenai pendapat peserta terhadap topik yang didiskusikan.
- ✍ Menuliskan hal-hal yang mungkin dianggap mempengaruhi hasil diskusi.

Sebagai sebuah metode dalam mengumpulkan data primer, FGD mempunyai atau memiliki banyak manfaat dan kelebihan. Namun demikian juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya peserta seringkali tidak mewakili seluruh kelompok sasaran, kelompok yang terlibat mungkin akan sulit untuk dikendalikan, hasil dan kesimpulan diskusi dapat dipengaruhi oleh pandangan atau pendekatan dari fasilitator, dan biasanya tidak cukup mempunyai data statistik.

Untuk membatasi kelemahan tersebut setidaknya dapat dengan melakukan dua hal. Pertama, fasilitator secara hati-hati menyusun pertanyaan panduan diskusi, melakukan uji coba pertanyaan, dan seksama mencatat/merekam pertanyaan dan reaksi yang muncul selama proses diskusi. Kedua, dalam menyeleksi dan mengumpulkan peserta, dilakukan secara seksama dengan memperhatikan representasi kelompok masyarakat sekaligus kemungkinan peserta tersebut membuat suasana diskusi menjadi terganggu.

## Teknik 2

# WAWANCARA SEMI TERSTRUKTUR (SEMI-STRUCTURED INTERVIEW)

Wawancara semi terstruktur merupakan teknik penting yang berfungsi sebagai alat bantu terhadap setiap teknik survey atau observasi yang digunakan dalam penelitian ini. Metode wawancara semi terstruktur yang digunakan merupakan metode wawancara yang menurut pengalaman banyak lembaga/organisasi telah menyumbangkan perbaikan dalam teknik wawancara. Teknik wawancara semi terstruktur lebih merupakan percakapan, sekalipun percakapan itu tetap dikendalikan dan terstruktur. Wawancara semi terstruktur (semi-structured interview) merupakan alat penggalian informasi yang berisikan tanya jawab sistematis tentang pokok-pokok tertentu.

Wawancara semi terstruktur bersifat semi terbuka, artinya jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu, pembicaraan lebih santai, namun dibatasi oleh topik yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama. Wawancara ini dapat dikembangkan sejauh tetap relevan dengan pokok bahasan yang disepakati; dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat/informan untuk menentukan hal-hal penting yang perlu digali sangat terbuka dalam proses diskusi.

### Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Wawancara:

- ✍ Kaji ulang informasi yang sudah ada, misal: informasi mengenai pemberdayaan keluarga muslim nelayan pesisir.
- ✍ Identifikasi informan yang benar-benar representatif untuk topik wawancara yang akan dilakukan, informan tidak harus tokoh atau pemimpin akan tetapi seseorang yang memiliki pengetahuan/informasi atas topik yang diangkat.
- ✍ Wawancara dilakukan sebagai bagian dari proses eksploratif, maka sedapat mungkin informan yang dipilih bervariasi.



- ✍ Apabila wawancara dilakukan terhadap keluarga muslim nelayan pesisir kebetulan ada dilokasi wawancara hendaknya juga diajak berpartisipasi.
- ✍ Proses dan isi wawancara didokumentasikan, disertai informasi yang cukup mengenai jalannya wawancara, meliputi hari dan tanggal wawancara, nama informan, lokal wawancara.
- ✍ Deskripsikan situasi saat wawancara terjadi, meliputi; deskripsi suasana afisil deskripsi suasana informan, dan membuat catatan akhir.
- ✍ Hindari pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya terarah (ya atau tidak)
- ✍ Wawancara semi terstruktur tidak sama dengan penyuluhan, karena itu jangan menasehati, banyaklah mendengar dengan empati dan sabar.

### **Langkah-Langkah Wawancara Semi Terstruktur**

- ✍ Lakukan perkenalan dengan suasana yang informal, akrab, tidak mengintrograsi; misalnya dimulai dengan “bagaimana kabarnya pak/bu”? dan dilanjutkan dengan obrolan-obrolan mengenai keadaan keluarga.
- ✍ Ketika suasana sudah kondusif, mulailah mengajukan pertanyaan dimulai dengan pertanyaan yang mudah dan sederhana, misal: bagaimana pekerjaan bapak/ibu sekarang? dll
- ✍ Kemudian setelah pertanyaan-pertanyaan umum, wawancara mulai diarahkan ke topik-topik wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
- ✍ Catata dan rekam hasil wawancara yang dilakukan, untuk hal ini diperlukan pembagian tugas, yaitu petugas khusus yang merekam jalannya wawancara, baik tertulis maupun direkam dengan menggunakan alat perekam.
- ✍ Setelah wawancara dirasakan cukup, akhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih kepada informan yang telah memberikan informasi bagi penelitian yang sedang dilakukan.



## Biodata Penulis



### **Dr. Abdul Aziz, M.Ag**

Lengkapnya adalah Abdul Aziz Munawar Albadri, nama bapak adalah Munawar dan kakek Albadri, lahir di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, 26 Mei 1973. S 1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (sekarang UIN), S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan S3 di Universitas Borobudur Jakarta. Setelah tamat langsung langsung menjadi Dosen Luar Biasa pada STAIN Cirebon, dan pada 2005 diangkat menjadi Dosen Tetap pada almamater yang sama, meskipun kini (dari 2010) berubah menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebagai dosen di Program Studi Akuntansi Syariah (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah (Ekos) Program Pascasarjana (S2) tidak menutup diri pada kegiatan sosial keagamaan. Penggagas dan pendiri Rumah Tahfidz al-Qur'an Sulthan Mauna dan Koperasi Kita Khazanah Mandiri (K3M), alumni Pondok Pesantren Al-Faqih Babakan Ciwaringin Cirebon, Tambakberas Jombang dan Kencong Pare Kediri kini diamanti sebagai Wakil Dekan III FSEI dari tahun 2015 – 2019.

Berbagai buku dan karya tulis ilmiah telah dipublikasikan, seperti; *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, Manajemen Investasi Syariah, Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali, Peran dan Kinerja Koperasi Syariah dalam Memberdayakan Sektor Perdagangan Usaha Kecil* dan sebagainya. Selain menjadi penulis aktif, ia juga di organisasi profesi menjabat ketua Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan ketua bidang pendidikan *Association Of Lectures For Financial And Economic Development* (Alfed). Selain itu, Suami Ratna Mardiani, S.Pd.I dan bapak dari Moh. Ismail Razi al-Faruqi dan Muh. Ramanda Aziz sering mengikuti berbagai diklat dan *training*, salah satunya adalah training auditor internal pada tahun 2008 dan audit mutu internal tahun 2018.



**Akhmad Shodiqin, M.H.I**

Lahir pada 04 November 1973 di Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Pendidikan formal diawali di MI Tarbiyatul Banin Dukupuntang Cirebon, lulus tahun 1986. Selanjutnya meneruskan sekolah di MTs Al-Ishlah Bobos Cirebon, lulus tahun 1989, dan di MA Al-Ishlah, lulus tahun 1989, selepas MA diterima di Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta sekarang) lulus tahun 1996. Kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Perdata Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Sejak tahun 1998 menjadi Dosen Luar Biasa Pada IAIN Cirebon, dan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Bobos (2005-2010), dan Sejak tahun 2007 diangkat menjadi Dosen Tetap (PNS) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Jurusan Akhwal Syakhsiyah.



**Mohamad Rana, M.H.I**

Pria kelahiran Cirebon, September tahun 1985 merupakan alumni PPs IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang lulus pada tahun 2014. Saat ini, Suami dari Lily Khalimah, S.Pd dan Babah dari Adzkiya Nur Fatiharurrahmah merupakan dosen tetap di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam Jabatan Asisten Ahli. Oleh Dekan FSEI, pria asli Cirebon ini diamanati untuk mengelola Buletin Seikplokedia yang terbit setahun dua kali.